



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12
R
T

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2015-2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disingkat TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

SPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2015 sampai dengan 2019 yang memuat rencana aksi daerah.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud penyusunan SPKD adalah untuk :

- a. merumuskan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan
- c. memandu intervensi program bagi SKPD dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Tujuan penyusunan SPKD adalah sebagai pedoman dalam :

- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, untuk mengatasi kemiskinan di daerah.
- b. membangun konsensus bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan
- c. memperkuat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan
- d. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung tujuan pembangunan millenium.

R
f

Pasal 5

- (1) SPKD memuat gambaran umum kondisi daerah, profil kemiskinan daerah, prioritas intervensi kebijakan, relevansi dan efektifitas APBD, kaji ulang kebijakan dan kelembagaan, isu strategis dan rencana aksi daerah dan sistem monitoring.
- (2) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian penurunan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kubu Raya Tahun 2014-2019.
- (3) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) SPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Kondisi Umum Daerah;
 - c. BAB III Profil Kemiskinan Daerah;
 - d. BAB IV Prioritas Intervensi Kebijakan;
 - e. BAB V Analisis Relevansi dan Efektifitas APBD;
 - f. BAB VI Kaji Ulang Kebijakan Dan Kelembagaan;
 - g. BAB VII Isu Strategis Dan Rencana Aksi Daerah;
 - h. BAB VIII Rencana Sistem Monitoring; dan
 - i. BAB IX Penutup.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan SPKD dan sistematika penulisan SPKD.
- (3) Kondisi Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat kondisi Geografi dan Demografi wilayah, administrasi wilayah, struktur dan pertumbuhan ekonomi wilayah serta laju inflasi.
- (4) Profil Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat konsep kemiskinan, kondisi umum kemiskinan daerah dan analisis kondisi umum kemiskinan daerah.
- (5) Prioritas Intervensi Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat prioritas masalah pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (prasarana) dasar, ketenagakerjaan dan kewirausahaan, ketahanan pangan, serta analisis akar masalah.
- (6) Analisis Relevansi dan Efektivitas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memuat evaluasi APBD, analisis anggaran pendapatan dan analisis anggaran belanja.
- (7) Kaji Ulang Kebijakan dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memuat pemetaan program, kaji ulang kebijakan menurut bidang/sector, kelembagaan, system koordinasi dan pengendalian, penguatan kelompok kerja TKPK dan permasalahan koordinasi penanggulangan kemiskinan.
- (8) Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat isu strategis dan rencana aksi daerah untuk penanggulangan kemiskinan.

2
f
f

- (9) Rencana Sistem Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, memuat mekanisme dan prosedur monitoring, indikator monitoring dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.
- (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, memuat kesimpulan dan saran.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD di daerah dilaporkan kepada Gubernur Kalimantan Barat selaku Penanggungjawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Kalimantan Barat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

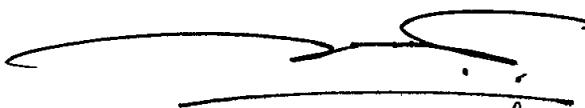
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

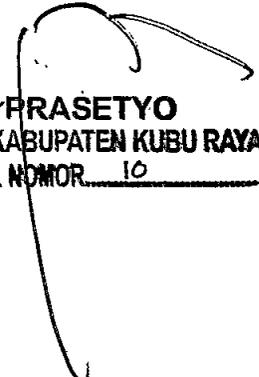
Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 4 April 2016

BUPATI KUBU RAYA, 



f RUSMAN ALI f

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal..... 4 April 2016
PK. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN..... 2016..... NOMOR..... 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
2015-2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum

1.1.1. Latar Belakang

Sejak dicanangkannya *Millenium Development Goals (MDGs)* pada KTT milenium tahun 2000, sebanyak 191 negara anggota PBB sepakat mengurangi jumlah penduduk miskin hingga setengahnya pada tahun 2015 dari jumlah penduduk miskin tahun 1990. Ekspose Bank Dunia tahun 2013, melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin dunia mengalami pengurangan sebanyak 721 juta jiwa sampai dengan akhir tahun 2010, dari 1,2 milyar jumlah penduduk miskin pada tahun 2000, (Kompas, 7 agustus 2005). Namun demikian, lebih lanjut dinyatakan bahwa perbandingan terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin tersebut tidak proporsional, karena satu dari tiga penduduk miskin dan kelaparan terjadi pada anak-anak.

Strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia dimulai dengan membangun data base kemiskinan. Validitas data base kemiskinan, tidak saja bermanfaat untuk mendata jumlah penduduk miskin yang terkena dampak program, lebih jauh data kemiskinan digunakan sebagai data base untuk memetakan secara menyeluru akar persoalan yang diprediksi menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Manfaat lain dari data kemiskinan adalah pada saat diakukannya evaluasi. Dengan membandingkan perkembangan kemiskinan antar waktu maupun antar wilayah, secara kasar dapat diketahui efektivitas tingkat capaian keberhasilan program. Berangkat dari evaluasi tersebut, pengambil kebijakan mereposisi program intervensi yang diambil, sehingga kebijakan selanjutnya menjadi lebih mengkerucut pada faktor yang menjadi penyebab utama kemiskinan beserta kondisi-kondisi lain yang menjadi komponen pendukung penyebab kemiskinan itu sendiri.



Pendekatan program yang dirancang pemerintah terkait dengan penanggulangan kemiskinan terbagi dalam 4 (empat) klaster, yang secara filosofi memiliki urgensi dan sasaran masing-masing sesuai dengan persoalan kemiskinan yang ditangani. Secara umum, tergambarkan dari rapor kinerja penanggulangan kemiskinan bahwa sub-sub program dan kegiatan yang terangkum pada 4 klaster tersebut, telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam memerangi kemiskinan di Indonesia. Namun perlu sangat dipahami bahwa pengentasan kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Pendekatan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, menyentuh akar masalah dengan beragam faktor yang terlibat satu sama lain. Dalam kerangka memaknai siklus kemiskinan (*vicious circle of poverty*), perspektif kebijakan yang akan dituangkan dalam dokumen ini akan dikaji dari sudut pandang indikator yang telah disepakati dalam MGDs. Pendekatan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tujuan agar lebih memudahkan pemangku kepentingan dalam menginterpretasikan data hasil capai program, secara lebih terukur dan terstruktur dengan ditunjang oleh ketersediaan data hasil capai di masing-masing tingkatan pemerintahan, dengan membandingkan data pencapaian target minimal yang ditetapkan secara nasional.

Kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya masih menjadi persoalan dasar yang memerlukan perhatian dalam pembangunan daerah. Di lihat dari perbandingan garis kemiskinan dan penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014, Kabupaten Kubu Raya menduduki posisi ke-3 (tiga) dengan persentase sebesar 5,57%, meningkat sebesar 6,04% dari Tahun 2013. Angka kemiskinan berada pada kisaran 8,07% (masih dibawah rata-rata Provinsi Kalimantan Barat) dengan angka pengangguran terbuka menurut angka statistik tercatat sebesar 6,06%, lebih tinggi dari angka pengangguran terbuka Provinsi (5,57%) dan Nasional (5,94%). Selain itu dari peringkat status kesejahteraan dilihat dari sebaran jumlah rumah tangga dan individu yang masuk katagori 10%-40% status kesejaterannya rendah berdasarkan pendataan ang dilakukan oleh TNP2K tahun 2011, terlihat bahwa proporsi penduduk yang identik miskin/tidak sejatera, lebih dominan terjadi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah perdesaan.

Tabel 1.1
PERSENTASE KEMISKINAN KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 – 2014

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	500.970	511.240	522.174	529.320	538.815
2	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	35.900	33.730	31.900	32.100	29.470
3	Persentase Kemiskinan (%)	6,78	6,27	6,27	6,04	5,57

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2015

Sesuai dengan amar Pasal 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota, percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan strategi dan program.



Terkait dengan hal tersebut, esensi utama yang akan di capai dari disusunnya dokumen ini adalah melihat seberapa efektif upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dengan merujuk pada bidang-bidang kemiskinan yang mendapatkan intervensi. Sedangkan dari sudut pandang perencanaan, dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Kubu Raya, menjadi rujukan penyusunan dalam merumuskan program perencanaan daerah yang berkolerasi dengan Penanggulangan Kemiskinan, penguatan-penguatan yang perlu ditindaklanjuti oleh SKPD melalui koordinasi Bappeda sebagai institusi Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.1.2. Maksud Dan Tujuan

1.1.2.1. Maksud

Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019 ini dimaksudkan untuk :

- a. Merumuskan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. Menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan;
- c. Memandu intervensi program bagi SKPD dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

1.1.2.2. Tujuan

Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019 disusun dengan tujuan :

- a. Menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan;
- b. Membangun konsensus bersama antara Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- c. Memperkuat pengarusutamaan (*mainstreaming*) penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan.
- d. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals*).

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

1.3. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Sistematika

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

- 2.1 Geografi dan demografi Wilayah
- 2.2 Administrasi Wilayah
- 2.3 Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
- 2.4 Inflasi



R

- BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH**
 - 3.1 Konsep Kemiskinan
 - 3.2 Kondisi Umum Kemiskinan Daerah
 - 3.3 Analisis Kondisi Umum Kemiskinan Daerah

- BAB IV PRIORITAS INTERVENSI KEBIJAKAN**
 - 4.1 Prioritas Masalah pada Bidang
 - 4.1.1 Bidang pendidikan
 - 4.1.2 Bidang Kesehatan
 - 4.1.3 Bidang Infrstruktur (prasarana) Dasar
 - 4.1.4 Bidang Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan
 - 4.1.5 Bidang Ketahanan Pangan
 - 4.2 Analisis akar Masalah per Indikator

- BAB V RELEVANSI DAN EFEKTIFITAS APBD**
 - 5.1 Evaluasi APBD
 - 5.2 Analisis Anggaran Pendapatan
 - 5.3 Analisis Anggaran Belanja

- BAB VI KAJI ULANG KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN**
 - 6.1 Pemetaan Program
 - 6.2 Kajiulang Kebijakan Menurut Bidang/Sektor
 - 6.3 Kelembagaan
 - 6.4 Sistem Koordinasi dan Pengendalian
 - 6.5 Penguatan kelompok Kerja TKPK
 - 6.6 Permasalahan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

- BAB VII ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH**
 - 7.1 Isu Strategis
 - 7.2 Rencana Aksi Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan

- BAB VIII RENCANA SISTEM MONITORING DAN EVALUASI**
- BAB IX PENUTUP**



f
n

BAB II

GAMBARAN UMUM

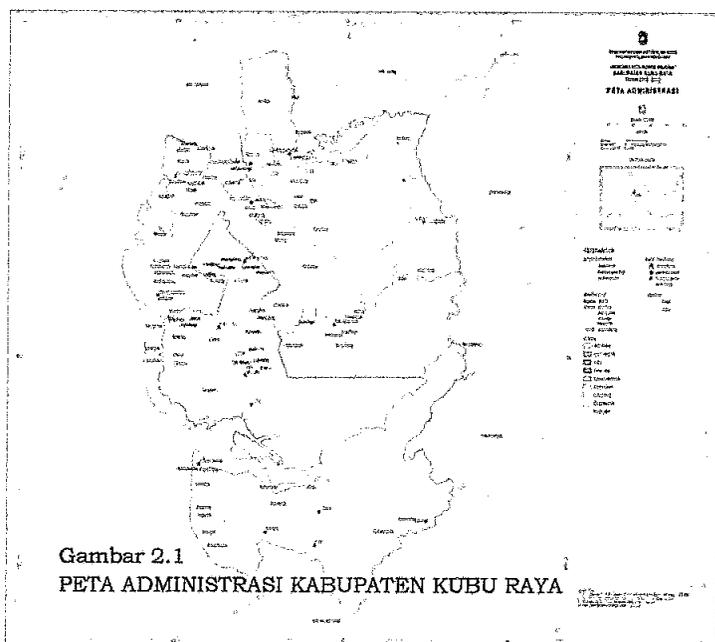
2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Geografi Wilayah

Secara geografis Kabupaten Kubu Raya terletak disisi Barat Daya Provinsi Kalimantan Barat atau berada pada koordinat $0^{\circ} 13' 27''$ Lintang Utara sampai dengan $1^{\circ} 00' 15''$ Lintang Selatan dan $109^{\circ} 02' 47''$ sampai dengan $109^{\circ} 58' 17''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Undang-Undang 35 Tahun 2007 tentang Pemekaran Wilayah $\pm 6.985,24 \text{ km}^2$ atau 698.524 Ha , dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Landak
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Selat Karimata



Dari perspektif geostrategis Kabupaten Kubu Raya memiliki posisi yang sangat strategis, yaitu sebagai wilayah *hinterland* yang masuk dalam tata ruang *Pontianak Metropolitan Area*. Letak yang sangat strategis tersebut menjadikan Kabupaten Kubu Raya menjadi simpul transportasi utama di Kalimantan Barat, baik transportasi udara, darat maupun transportasi sungai. Secara administratif Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 kecamatan dan 117 desa. Luas wilayah dan jumlah desa menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :



Tabel 2.1
LUAS WILAYAH DAN JUMLAH DESA MENURUT KECAMATAN

NO	KECAMATAN	IBUKOTA	JUMLAH DESA	LUAS (KM ²)	(%)
1	Batu Ampar	Padang Tikar	15	2.002,70	28,67
2	Terentang	Terentang	10	786,40	11,26
3	Kubu	Kubu	20	1.211,60	17,35
4	Teluk Pakedai	Teluk Pakedai	14	291,90	4,18
5	Sungai Kakap	Sungai Kakap	13	453,17	6,49
6	Rasau Jaya	Rasau Jaya	6	111,07	1,59
7	Sungai Raya	Arang Limbung	20	929,30	13,30
8	Sungai Ambawang	Ambawang Kuala	15	726,10	10,39
9	Kuala Mandor B	Kuala Mandor	5	473,00	6,77
Kabupaten Kubu Raya			118	6.985,24	100

Sumber : *Profil Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2015*

2.1.1.2. Topografi

Topografi Kabupaten Kubu Raya terdiri dari dataran rendah, sebagian besar datar, bergelombang dan sebagian kecil berbukit/bergunung dengan kemiringan 0% - >60%. Rata-rata bentang alam Kabupaten Kubu Raya berelief datar dan rawa-rawa dengan ketinggian < 10 m dan kemiringan < 2%. Pada beberapa wilayah, masih dapat dijumpai daerah dengan relief >10 m dan dengan kemiringan berkisar antara 2 - >60.

2.1.1.3. Geologi

Peta geologis, Kabupaten Kubu Raya sebagian besar terdiri dari endapan aluvial, pasang surut, danau, rawa dan undak dengan formasi aluvium dan endapan rawa (Qa) yang merupakan formasi paling muda. Formasi ini terdiri dari kerikil, pasir, lanau, lumpur dan gambut. Endapan ini menutupi dataran aluvial dan pasang surut di bagian barat, lembah sungai kapuas dan lembah-lembah sungai besar lainnya yang mengalir ke terain perbukitan yang terpotong-potong dan kedalam dataran aluvial. Bagian barat dan selatan terdiri dari endapan-endapan laut dan sungai baru berumur paling muda dan menempati seluruh zona pertanian bagian barat Kabupaten Kubu Raya. Zona pantai terdiri dari cekungan liat yang tertutup oleh rawa-rawa gambut dan dilintasi danau-danau dangkal dan rawa yang terkena banjir secara periodik yang berada diantara teras-teras tertutup gambut.

Jenis tanah yang ditemui di wilayah Kabupaten Kubu Raya yaitu jenis tanah aluvial, gleisol, organosol dan regosol.

1. Aluvial, jenis tanah Aluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, berumur masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai (hasil dari lumpur yang mengendap), dataran aluvial pantai, dan daerah cekungan (depresi).
2. Gleisol, tanah yang selalu jenuh air sehingga berwarna kelabu atau menunjukkan sifat-sifat



hidromorfik lain.

3. Organosol Gley Humus atau Tanah Gambut atau Tanah Organik, jenis tanah ini berasal dari bahan induk organik seperti dari hutan rawa atau rerumput rawa, dengan ciri dan sifat: ketebalan lebih dari 0.5 meter, warna coklat hingga kehitaman, tekstur debu lempung, tidak berstruktur, konsistensi tidak lekat hingga agak lekat, kandungan organik lebih dari 30% untuk tanah tekstur lempung dan lebih dari 20% untuk tanah tekstur pasir, umumnya bersifat sangat asam (pH 4.0), kandungan unsur hara rendah.
4. Regosol, tanah bertekstur kasar dengan kadar pasir lebih dari 60%, hanya mempunyai horison penciri ochrik, histik atau sulfurik.

2.1.1.4. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Kubu Raya terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas yang merupakan wilayah sungai strategis nasional karena melintasi beberapa kabupaten bahkan beberapa provinsi. Adapun wilayah sungai di Kabupaten Kubu Raya, meliputi:

1. Sungai besar terdapat di Sungai Kapuas, Sungai Kapuas Kecil, Sungai Punggur Besar, dan Sungai Landak; dan
2. Sungai kecil terdapat di Sungai Ambawang, Sungai Mandor, Sungai Sepatah, Sungai Jeruju Besar, Sungai Punggur Kecil, Sungai Rasau, Sungai Bulan, Sungai Sepauk Laut, Sungai Seruat, Sungai Terentang, Sungai Kelabau, Sungai Keluang, Sungai Mendawak, Sungai Kubu, Sungai Radak, Sungai Bara Besar, Sungai Bengkalan, Sungai Sepada, Sungai Sopar, Sungai Krawang, Sungai Durian Sebatang, Sungai Besar, Sungai Mesjid, Sungai Sekapau, Sungai Sekh, Sungai Baharu, Sungai Raja Setelu, Sungai Bumbun, Sungai Ayam, Sungai Padu Empat dan Sungai Nibung.

Sedangkan Daerah rawa terdiri dari:

1. Daerah Rawa (DR) Nasional, terdiri atas 27 DR, yaitu; DR. Kapuas Kecil I, DR. Kapuas Kecil II, DR. Kapuas Kecil III, DR. Jawi - Kalimas - Betutu, DR. Punggur- Selat Kering, DR. Rasau Jaya I, II, III, IV (Bintang Mas), DR. Sungai Bulan, DR. Sungai Asam - Bengkarek, DR. Tebang Kacang, DR. Pinang Komplek, DR. Jangkang I + II, DR. Air Putih, DR. Kubu Komplek (Kelang, Tl. Nangka, Sungai Terus), DR. Sungai Terus, DR. Olak Olak Kubu, DR. Dabung - Dabung SP II, DR. Sungai Selamat - Seruat, DR. Kerawang Komplek, DR. Teluk Nibung, DR. Nipah Panjang, DR. Mendawak Linda, DR. Sungai Nipah, DR. Teluk Pakedai, DR. Radak I + II, DR. Terentang, DR. Terentang Hulu;
2. Daerah Rawa Provinsi, terdiri atas 3 DR, yaitu: DR Ambangah, DR. Kuala Karang, dan DR Sungai Selamat;
3. Daerah Rawa Kabupaten, terdiri dari 68 DR, yaitu; DR. Sepuk Keladi, DR. Sepuk Perupok, DR. Sepuk Laut, DR. Tanjung Saleh, DR. Pulau Nyamuk, DR. Tanjung Wangi, DR. Pematang Tujuh, DR. Sangkar Dunia, DR. Teluk Bakung, DR. Kuala Dua, DR. Kapur, DR. Mekar Baru, DR. Dusun Obyek Sungai Durian, DR. Teluk Kapuas, DR. Pulau Limbung, DR. Gunung Tamang, DR. Pelita Jaya, DR. Bemban, DR. Ambawang, DR. Kampung Baru,



DR. Mengkalang, DR. Teluk Nibung, DR. Nipah Panjang, DR. Suka Maju, DR. Padang Tikar I, DR. Padang Tikar II, DR. Padang Tikar, DR. Sungai Jawi, DR. Ambarawa, DR. Tasik Malaya, DR. Tanjung Harapan, DR. Sungai Deras, DR. Arus Deras, DR. Selat Remis, DR. Teluk Gelam, DR. Tanjung Bunga, DR. Sungai Nibung, DR. Karya Jaya, DR. Betuah, DR. Teluk Empening, DR. Teluk Bayur, DR. Permata, DR. Terentang Hilir, DR. Sungai Ambawang Kuala, DR. Durian, DR. Jawa Tengah, DR. Simpang Kanan, DR. Puguk, DR. Pasak Piang, DR. Pasak, DR. Loncek, DR. Tamang, DR. Korek, DR. Lingga, DR. Pancaroba Sungai, DR. Pancaroba, DR. Lais, DR. Tapah, DR. Teluk Lerang, DR. Biong, DR. Lintang Batang, DR. Jalo, DR. Benuah, DR. Kuala Mandor A, DR. Kuala Mandor B, DR. Sungai Enau, DR. Kubu Padi, DR. Retok;

4. Daerah Irigasi Kabupaten, meliputi Daerah Irigasi Baharu Ambawang, Daerah Irigasi Bemban Timur, Daerah Irigasi Bemban Barat, Daerah Irigasi Ence Manan, Daerah Irigasi Nuri, Daerah Irigasi Padu Ampat dan Daerah Irigasi Samak di wilayah Kecamatan Kubu dengan keseluruhan seluas 944 Ha dan setelah perubahan menjadi 3.360 Ha.

2.1.1.5. Klimatologi

Sebagai daerah tropis yang dilalui garis khatulistiwa, Kabupaten Kubu Raya memiliki suhu dan kelembaban udara yang relatif tinggi sehingga memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Pada tahun 2012 rata-rata curah hujan di Kabupaten Kubu Raya adalah 256,8 mm. Curah hujan terendah berdasarkan catatan BMG Supadio, tercatat pada bulan Agustus yaitu 73 mm dan tertinggi tercatat pada bulan Desember yaitu sebesar 502 mm. Sedangkan rata-rata banyak hari hujan pada tahun 2012 adalah 18 hari. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November yaitu 30 hari, sedangkan terendah terjadi pada bulan Juni yaitu 6 hari. Temperatur udara rata-rata di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2012, yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Supadio, berkisar antara 22,1°C sampai dengan 32,9°C. Suhu terendah tercatat pada bulan Agustus yang tercatat sebesar 22,1°C sedangkan temperatur udara tertinggi tercatat pada bulan April yaitu sebesar 32,9°C.

3. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2010 masih didominasi oleh kawasan hutan (hutan negara dan hutan rakyat), sebesar 59,02% dari luas wilayah Kabupaten Kubu Raya, yang tersebar di semua kecamatan, kemudian diikuti dengan sawah (meliputi sawah irigasi sederhana, sawah tadah hujan, dan sawah pasang surut) sebesar 9,88%, dan perkebunan sebesar 9,68%.



R
f

Tabel 2.2
PENGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2010

NO	Penggunaan	Luas (Ha)	(%)
1	Tegalan/ Ladang	31.651,75	4,53
2	Semak	42.308,06	6,06
3	Perkebunan Rakyat	55.278,85	7,91
4	Perkebunan Besar	175.496,83	25,12
5	Kebun Campuran	9.955,67	1,43
6	Hutan Sejenis	53.737,70	7,69
7	Hutan Lebat	150.508,14	21,55
8	Hutan Belukar	173.993,00	24,91
9	Sawah	5.594,00	0,80
Jumlah		698.524,00	100,00

Sumber : RUPA BUMI INDONESIA (RBI) TAHUN 2010

2.1.1.6. Demografi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kubu Raya, Pada Tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya tercatat sebesar 538.815 jiwa, dengan seks rasio atau perbandingan jenis kelamin antara penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 103 yang artinya jika ada 100 penduduk perempuan maka terdapat 103 penduduk laki-laki. Dilihat dari kelompok umur, penduduk Kubu Raya masih masuk dalam kelompok penduduk muda. Jumlah penduduk kelompok umur dibawah 15 tahun mencapai 31,37% dari total penduduk yang ada, sedangkan penduduk yang berusia 75 tahun ke atas hanya 1,02%. Sedangkan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kubu Raya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2011 sebesar 1,89%, tahun 2012 sebesar 2,14%, tahun 2013 sebesar 1,37%, dan tahun 2014 sebesar 1,79%. Jika dibagi dengan luas wilayah Kabupaten Kubu Raya, yakni 6.985,24 Km², maka kepadatan penduduk tercatat sebesar 77 jiwa per Km², dengan persebaran kepadatan yang tidak merata antar wilayah kecamatan. Perkembangan demografi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010-2014, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
JUMLAH DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2010 – 2014

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)					Laju Pertumbuhan (%)			
		2010	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
1	Batu Ampar	33.113	33.660	34.252	34.554	35.173	1,52	1,76	0,88	1,79
2	Terentang	10.177	10.375	10.584	10.720	10.913	1,79	2,01	1,28	1,80
3	Kubu	36.469	36.829	37.252	37.434	38.106	0,91	1,15	0,49	1,80
4	Teluk Pakedai	18.767	19.064	19.404	19.549	19.900	1,46	1,78	0,75	1,80
5	Sungai Kakap	101.200	103.966	106.846	108.939	110.891	2,52	2,77	1,96	1,79
6	Rasau Jaya	23.499	24.084	24.691	25.123	25.573	2,30	2,52	1,75	1,79
7	Sungai Raya	188.014	191.929	196.102	198.885	202.453	1,92	2,17	1,42	1,79
8	Sei Ambawang	65.879*)	67.207*)	68.616	69.544	70.793	1,86	2,10	1,35	1,80
9	Kuala Mandor B	23.852	24.121	24.427	24.572	25.013	1,04	1,27	0,59	1,79
Jumlah		500.970	511.235	522.174	529.320	538.815	1,89	2,14	1,37	1,79

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2015

*) Belum termasuk warga perum IV yang pengakuannya masuk Kota Pontianak



Dari tabel 2.3 terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kubu Raya dari tahun 2011 sampai dengan 2014 mengalami kecenderungan meningkat dengan angka rata-rata peningkatan diatas 2% pertahun. Dengan demikian laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kubu Raya dapat dikatakan masih relaif tinggi. Sedangkan secara ekonomi, perkembangan beberapa wilayah pemukiman secara masive di beberapa kecamatan (sungai kakap, sungai raya dan sungai ambawang), memberikan *multiplier effect* terhadap perkembangan ekonomi wilayah, yang diperkirakan menjadi sala satu faktor terjadinya migrasi sehingga mengakibatkan penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Kubu Raya secara signifikan.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Selama kurun waktu 2009 - 2014, kinerja perekonomian Kabupaten Kubu Raya yang ditunjukkan dengan nilai PDRB (atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan) selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sektor industri pengolahan masih mendominasi perekonomian di Kabupaten Kubu Raya, diikuti sektor pertanian, perdagangan, serta sektor hotel dan restoran. Secara struktur, penguatan perekonomian Kabupaten Kubu Raya masih didominasi Industri Pengolahan, Pertanian, dan Perdagangan Hotel & Restoran. Sektor Industri Pengolahan penyumbang sebesar 43.67 persen diikuti Sektor Pertanian 17.18 persen dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 16.52 persen.

PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2014 tercatat sebesar Rp. 16,70 triliun atau meningkat 13,84 % jika dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 14,64 triliun. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan refleksi nyata kondisi perekonomian karena sudah terkoreksi dengan inflasi. Mencermati perkembangan PDRB AHB, terlihat kondisi perekomian Kabupaten Kubu Raya cukup stabil dari efek konjungtur perekomian global. PDRB Tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel 2.4 dan tabel 2.5.



Tabel 2.4
**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT
 LAPANGAN USAHA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2009 - 2014 (JUTA)**

No	Sektor / Subsektor	2009	2010	2011	2012	2013	2014
		Jml (Rp)	Jml (Rp)	Jml (Rp)	Jml (Rp)	Jml (Rp)	Jml (Rp)
1	Pertanian	1.582.139,42	1.661.105,83	1.862.353,78	2.016.346,74	2.159.491,12	2.307.642,67
2	Pertambangan & Penggalian	39.285,27	45.528,55	51.888,00	62.806,30	71.247,00	81.372,72
3	Industri Pengolahan	3.467.052,55	4.160.676,97	4.548.793,81	4.958.894,72	5.566.211,02	6.161.008,89
4	Listrik, Gas & Air Bersih	36.750,15	39.400,86	57.228,00	65.639,04	80.394,28	95.765,75
5	Bangunan	77.365,70	137.148,04	284.830,24	359.860,00	456.713,31	537.854,97
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.405.902,36	1.539.344,30	1.687.227,52	1.921.944,68	2.105.405,59	2.315.205,98
7	Pengangkutan & Komunikasi	531.880,35	686.827,69	849.153,36	1.039.745,69	1.272.500,14	1.537.272,17
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	169.175,82	187.366,35	234.380,12	281.158,28	330.401,55	390.437,84
9	Jasa-jasa	305.021,69	343.132,94	392.746,34	498.466,43	566.463,75	658.233,01
	Jumlah Total	7.614.573,31	8.800.531,53	9.968.601,17	11.204.861,88	12.608.827,76	14.084.793,99

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2015

Laju pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku selama empat tahun terakhir cenderung berfluktuasi, demikian juga dengan sektor-sektornya. Berdasarkan Tabel 2.5 diatas, pada tahun 2014 sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku, dengan nilai kontribusi sebesar 43,74%, sedangkan nilai PDRB terkecil terjadi di sektor Pertambangan dan Penggalian dengan nilai kontribusi 0,57%. Dari aspek peranan sektoral, sektor Pertanian sebagai kontributor utama setelah sektor industri pengolahan, peranannya cenderung menurun setiap tahun. Pengurangan produktivitas di sektor ini, disebabkan besarnya perubahan fungsi lahan yang semula dipergunakan untuk pertanian menjadi ke non pertanian, diperkirakan menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Dari perspektif yang lebih luas, implikasi berkembang beberapa Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) sebagai pusat kawasan permukiman serta rencana kawasan metropolitan Pontianak, mendorong terjadinya alih fungsi lahan pada beberapa kecamatan di Kabupaten Kubu Raya yang selama ini menjadi sentra produksi pertanian.



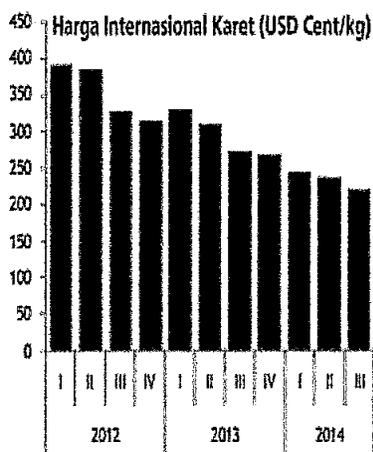
R

Tabel 2.5
KONTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT LAPANGAN USAHA KAB. KUBU RAYA TAHUN 2009 – 2014

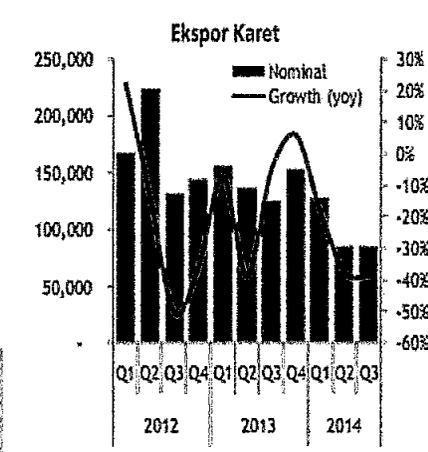
No	Sektor / Subsektor	2009	2010	2011	2012	2013	2014
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Pertanian	20,77	18,91	18,68	18,00	17,12	16,38
2	Pertambangan dan Penggalian	0,52	0,52	0,52	0,56	0,56	0,58
3	Industri Pengolahan	45,53	47,36	45,63	44,26	44,14	43,74
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,48	0,45	0,57	0,59	0,63	0,68
5	Bangunan	1,02	1,57	2,86	3,21	3,62	3,82
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	18,46	17,52	16,93	17,15	16,69	16,44
7	Pengangkutan & Komunikasi	6,98	7,82	8,52	9,28	10,09	10,91
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2,22	1,92	2,35	2,51	2,62	2,77
9	Jasa-jasa	4,00	3,90	3,94	4,45	4,49	4,67
	Jumlah Total	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2015

Sedangkan dari sisi permintaan (ekspor), dari statistik Bank Indonesia lesunya perekonomian secara global yang berdampak juga pada aktivitas ekonomi di daerah, berdampak langsung pada permintaan sektor ini. Pada sub sektor pertanian, kontraksi peranan sektor pertanian lebih diakibatkan dari melemahnya permintaan Karet yang menjadi komoditi ekspor utama



Sumber: Bloomberg



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Kalimantan Barat. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan dan kontribusi dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7.

Secara nominal, PDRB Kabupaten Kubu Raya tahun 2014 menurut penggunaan yang dihitung berdasarkan harga konstan 2010 mencapai Rp.13,67triliun, menunjukkan

peningkatan sekitar 6,44 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat Rp. 12,84 triliun. Pergerakan PDRB atas dasar harga konstan, lebih riil menggambarkan kondisi perekonomian tahun analisa, karena sudah terkoreksi dengan inflasi. Selama tahun 2009-2014, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan, diikuti oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan diikuti sektor jasa-jasa. Nilai PDRB juga mengalami kenaikan dari 5.60 triliun rupiah pada tahun 2012 menjadi 5.98 triliun rupiah di tahun 2013. Dengan



demikian dapat diartikan bahwa perekonomian Kabupaten Kubu Raya mengalami pertumbuhan sekitar 6.44%.

Tabel 2.6

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2009 - 2014 (JUTA)

No	Sektor / Subsektor	2009	2010	2011	2012	2013	2014
		Jml (Rp)					
1	Pertanian	922.399,07	977.880,61	1.039.780,45	1.089.036,39	1.150.712,19	1.213.626,50
2	Pertambangan & Penggalian	18.835,67	20.578,83	22.260,12	24.360,32	25.330,13	28.307,94
3	Industri Pengolahan	2.154.578,52	2.265.932,13	2.366.766,11	2.458.679,69	2.570.472,59	2.706.289,60
4	Listrik, Gas & Air Bersih	24.907,95	25.101,02	28.793,80	32.247,91	35.852,61	38.698,09
5	Bangunan	40.608,81	54.356,77	65.014,39	73.590,64	82.431,88	85.278,91
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	787.238,47	816.002,11	853.946,21	909.492,24	940.108,51	999.676,98
7	Pengangkutan & Komunikasi	382.307,24	438.909,64	514.445,99	620.357,59	745.860,29	855.365,12
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	103.459,97	107.979,89	117.262,52	129.724,63	143.717,94	153.225,16
9	Jasa-jasa	212.982,30	229.911,99	249.759,52	272.301,85	295.130,85	319.080,80
	Total	4.647.308,00	4.936.652,99	5.258.029,11	5.609.791,26	5.989.616,98	6.399.549,10

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2015

Tabel 2.7

KONTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA KAB. KUBU RAYA TAHUN 2009 – 2014

No	Sektor / Subsektor	2009	2010	2011	2012	2013	2014
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Pertanian	19,85	19,81	19,78	19,41	19,21	18,96
2	Pertambangan dan Penggalian	0,41	0,42	0,42	0,43	0,42	0,44
3	Industri Pengolahan	46,36	45,90	45,01	43,83	42,91	42,29
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,54	0,51	0,55	0,57	0,59	0,60
5	Bangunan	0,87	1,10	1,24	1,31	1,37	1,33
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	16,94	16,53	16,24	16,21	15,69	15,62
7	Pengangkutan dan Komunikasi	8,23	8,89	9,78	11,06	12,45	13,37
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2,23	2,19	2,23	2,31	2,39	2,39
9	Jasa-jasa	4,58	4,66	4,75	4,85	4,92	4,99
	Jumlah Total	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2015



Dari Tabel 2.7 dapat dilihat bahwa dalam empat tahun terakhir telah terjadi peningkatan kontribusi PDRB terhadap perekonomian domestik Kabupaten Kubu Raya meskipun tidak signifikan. Secara persentase struktur perekonomian Kabupaten Kubu Raya mengalami perubahan pada tiga tahun terakhir, dimana pada sektor primer mengalami trend menurun, yang mengandung arti bahwa tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 1,06 persen, pada tahun 2014 sektor ini juga mengalami penurunan sebesar 2,07 persen dibanding tahun 2013. Demikian juga untuk sektor Sekunder, pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen dibanding tahun 2012 demikian juga pada tahun 2014 mengalami kenaikan kontribusi sebesar 1,04 persen. Di sisi lain Sektor tersier memiliki tren yang meningkat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Pada Sektor Primer yang mengalami Penurunan sebesar 2,07 persen terjadi pada tahun 2014 karena hampir semua sub sektor pada kategori pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2013. Selanjutnya kenaikan kontribusi pada Sektor Sekunder dan Tersier yang cukup signifikan juga dipengaruhi oleh kontribusi sektor primer pada pembentukan distribusi Sektor Ekonomi di Kabupaten Raya pada tahun 2014.

Analisis lain yang penting untuk diuraikan untuk mengkaji pergerakan perekonomian daerah adalah PDRB per kapita. Dari Tabel 2.8 bahwa indeks kesejahteraan ekonomi penduduk Kabupaten Kubu Raya selama tahun 2009-2014 cenderung meningkat, kendatipun peningkatan tersebut tidak terjadi secara merata.

Tabel 2.8
PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PERKAPITA
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2009 - 2014

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	PDRB per kapita ADHb	PDRB per kapita ADHk
2009	490.408	1,64	15.318.175,90	9.232.096,24
2010	500.970	2,15	17.566.983,11	9.854.188,85
2011	511.235	2,05	19.518.618,97	10.284.955,27
2012	522.174	2,14	21.458.099,94	10.743.145,50
2013	529.320	1,37	24.079.668,00	11.317.951,00
2014	538.815	1,79	26.140.315,00	11.877.080,00

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2015

2.2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi regional Kabupaten Kubu Raya selama dekade 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang baik. Dari grafik 2.1 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Kubu Raya berada diatas rata-rata Propinsi Kalimantan Barat. Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya tahun 2014 tercatat sebesar 6,44%, sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 6,66%. Hal ini mengindikasikan Kabupaten Kubu

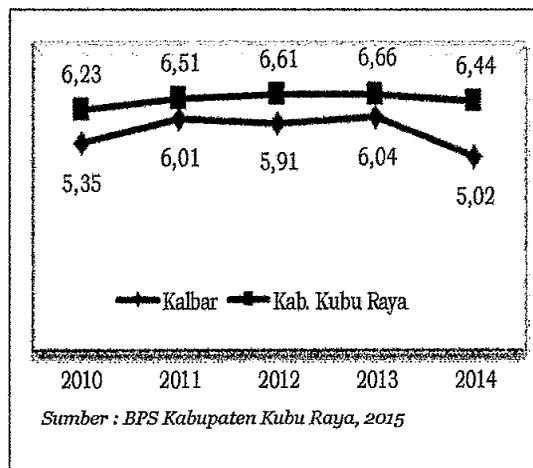


Raya memainkan peranan cukup significant dalam perekonomian regional di Kalimantan Barat. Beberapa sektor yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya yaitu sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta sektor Industri Pengolahan dan Pertanian.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya ditunjang dengan peningkatan kontribusi PDRB sebagai komponen pembentuk utama perekonomian. Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya tahun 2014 adalah Kategori Konstruksi yaitu mencapai 12,58 persen kemudian diikuti Kategori Informasi dan Komunikasi yang mencapai 11,68 persen. Sedangkan Sektor

Industri pengolahan dan sektor Pertanian sebagai penyumbang dominan dalam pembentukan PDRB pertumbuhannya cenderung menurun dan berada dibawah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi.

Grafik 2.1
GRAFIK LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
KABUPATEN KUBU RAYATAHUN 2010 - 2014



2.2.1.3. Inflasi

Mengingat wilayah Kabupaten Kubu Raya berbatasan langsung dengan Kota Pontianak, maka pergerakan harga (inflasi) Kota Pontianak juga menjadi barometer tingkat kestabilan perekonomian Kabupaten Kubu Raya. Pergerakan harga komoditi konsumsi di tingkat lokal relatif tidak mengkhawatirkan. Meski demikian, dalam dua tahun terakhir ini laju inflasi di Kabupaten Kubu Raya (acuan Kota Pontianak) menampakkan trend meningkat. Pergerakan laju inflasi di Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat sejak Tahun 2008 hingga Tahun 2012 disajikan pada tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9
INFLASI KABUPATEN KUBU RAYA DAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2010 – 2014

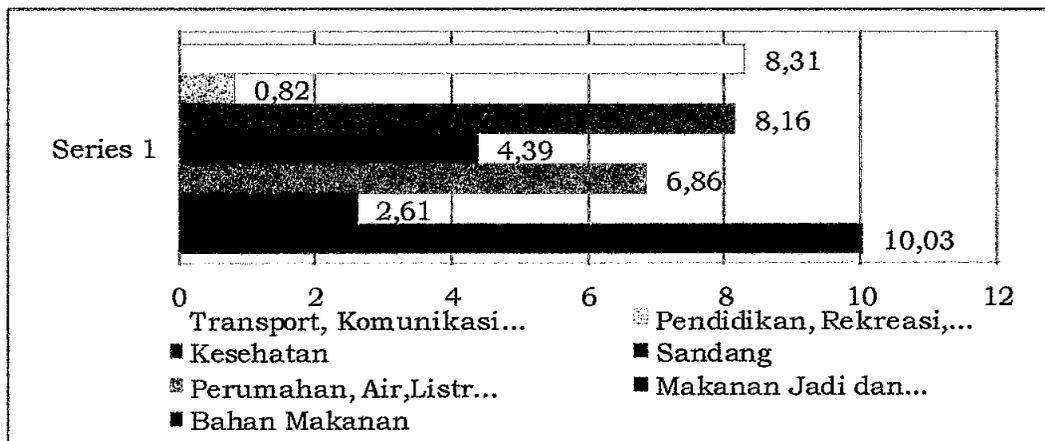
Tahun	Kabupaten Kubu Raya		Inflasi Provinsi Kalimantan Barat (%)
	Indeks Harga Implisit	Inflasi (%)	
2010	163,85	4,35	4,91
2011	105,05	5,05	5,85
2012	108,84	3,61	5,22
2013	114,23	4,95	6,19
2014	122,18	6,95	6,17

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2015



Mencermati data inflasi, laju inflasi Atas Dasar Harga Produsen Tahun 2014 sebesar 6,95% menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2013 yaitu sebesar 4,95%, dan sedikit di atas inflasi Kalbar yang sebesar 6,17%. Dilihat dari kelompok barang, inflasi tertinggi di Kabupaten Kubu Raya berada pada kelompok bahan makanan (10,03%), diikuti kelompok transportasi, komunikasi dan jasa (8,31%), serta kelompok kesehatan (8,16%). Kendatipun inflasi bergerak naik dari tahun sebelumnya, secara umum al tersebut tidak mempengaruhi kinerja perekonomian Kabupaten Kubu Raya secara keseluruhan.

Grafik 2.2
TINGKAT INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2012



Sumber: BPS KKR, Kabupaten Kubu Raya dalam Angka 2013 (diolah)

- 2.3. Penanggulangan Kemiskinan
- 2.3.1. Fokus Kesejahteraan Sosial
- 2.3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia mencakup indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita disesuaikan, dan angka usia harapan hidup. Tabulasi data angka IPM Kabupaten Kubu Raya beserta indikator pendukungnya tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 – 2014

Uraian	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
Angka Harapan Hidup	69,60	69,62	69,64	69,64	69,64
Angka Harapan Lama Sekolah	11,51	10,80	11,98	12,14	12,34
Rata-rata Lama Sekolah	5,85	5,87	6,01	6,16	6,41
Pengeluaran Per Kapita	7.168	7.488	7.821	7.935	7.973
IPM	61,87	62,56	63,42	63,94	64,52
Peringkat IPM	3	4	4	4	3

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2015

Kinerja perekonomian daerah diyakini dapat menjadi daya ungkit pada perbaikan IPM suatu



daerah secara keseluruhan. Dari sisi pengeluaran perkapita rata-rata pengeluaran Per Kapita penduduk Kubu Raya terus menunjukkan peningkatan. IPM Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013 menempati urutan 3 dari 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kubu Raya juga menggambarkan peningkatan ke arah yang baik setiap tahunnya. Dari tahun 2010 sampai tahun 2013, rata-rata harapan lama sekolah di Kabupaten Kubu Raya terus meningkat. Hal tersebut berarti sebagian besar anak usia sekolah di Kabupaten Kubu Raya, menuntaskan pendidikan yang ditempuh hingga jenjang pendidikan menengah. Demikian pula kondisi rata-rata lama sekolah terus menunjukkan perkembangan yang membaik sampai di tahun 2014. Sehingga di Kabupaten Kubu Raya secara umum Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kubu Raya cenderung membaik dan berada pada setelah Kota Pontianak, dan Kota Singkawang.

2.3.1.2. Kemiskinan

Kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya masih menjadi persoalan dasar yang memerlukan perhatian dalam pembangunan daerah. Di lihat dari perbandingan garis kemiskinan dan penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014, Kabupaten Kubu Raya menduduki posisi ke-3 (tiga) dengan persentase sebesar 5,57%, meningkat sebesar 6,04% dari Tahun 2013. Angka kemiskinan berada pada kisaran 8,07% (masih dibawah rata-rata Provinsi Kalimantan Barat) dengan angka pengangguran terbuka menurut angka statistik tercatat sebesar 6,06%, lebih tinggi dari angka pengangguran terbuka Provinsi (5,57%) dan Nasional (5,94%).

Dari sudut perencanaan, pengangguran dianggap menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Selama ini, sektor industri primer menjadi penopang penghidupan penduduk Kabupaten Kubu Raya. Kolapsnya industri primer (perkayuan dan produk turunnya), mengakibatkan membengkaknya angka pengangguran di Kabupaten Kubu Raya. Sementara itu, peranan sektor pengganti (perkebunan) belum memainkan andil yang cukup berarti terhadap daya serap tenaga kerja. Diperkirakan dalam satu dekade ke depan peranan sektor perkebunan (sawit) dan sektor perdagangan, akan menjadi jawaban terhadap permasalahan pengangguran di Kabupaten Kubu Raya. Berikut Persentase Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya tahun 2011-2014.

Tabel 2.11
PERSENTASE KEMISKINAN KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2011 – 2014

No	Indikator	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Penduduk (jiwa)	511.240	522.174	529.320	538.815
2.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	33.730	31.900	32.100	29.470
3.	Persentase Kemiskinan (%)	6,27	6,27	6,04	5,57

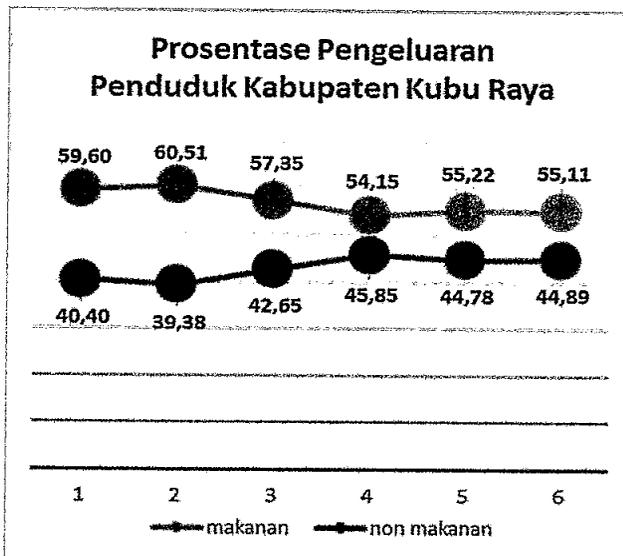
Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2015



2.3.2. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.3.2.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Analisis fokus kemampuan ekonomi daerah akan didekati dari indikator kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya, yang diukur dari perhitungan pengeluaran baik konsumsi. Dari sisi permintaan (pengeluaran), kinerja sumber-sumber pencapaian pertumbuhan ekonomi diukur dari konsumsi rumah tangga untuk makanan. Pada tahun 2013 konsumsi rumah



tangga tercatat sebesar Rp. 6.894.939,08 meningkat dari tahun 2012 yang sebesar Rp. 5.994.113,19. Peningkatan konsumsi rumah tangga tahun 2012 sebagian besar disumbang pengeluaran untuk konsumsi makanan yang berkontribusi sebesar 55,22% dibandingkan pengeluaran rumah tangga untuk non makanan yang tercatat sebesar 44,78%. Peningkatan konsumsi rumah tangga per kapita tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Kubu Raya yang mengakibatkan meningkatnya konsumsi barang dan jasa. Selain itu, membaiknya kondisi ekonomi masyarakat serta perkembangan ilmu dan teknologi juga mempengaruhi perubahan selera maupun perilaku konsumsi masyarakat.

2.3.2.2. Pengeluaran Pemerintah

Selain rumah tangga, pemerintah juga melakukan konsumsi. Konsumsi pemerintah yang terjabarkan dalam berbagai program/kegiatan yang teruang dalam APBD. Pengeluaran konsumsi Pemerintah dalam berbagai kegiatan di daerah memerlukan biaya-biaya operasional yang merupakan pengeluaran untuk konsumsi terkait tugas pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengeluaran konsumsi Pemerintah dalam hal ini dapat disebut juga sebagai investasi pemerintah. Konsumsi pemerintah di Kabupaten Kubu Raya terus meningkat seiring dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya serta berbagai kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat lainnya di berbagai sektor yang menjadi kewenangannya.

Pada tahun 2008 konsumsi pemerintah sebesar Rp. 1.336.184,45, dan cenderung terus meningkat menjadi Rp. 1.686.588,01 dan Rp. 1.712.353,76 di tahun 2009 dan 2010 serta di tahun 2011 sebesar Rp. 1.761.120,76, hingga pada tahun 2012 dan tahun 2013 menjadi Rp.



2.067.370,19 dan Rp. 2.281.625,47. Peningkatan konsumsi pemerintah Kabupaten Kubu Raya dimungkinkan sebagai kabupaten baru, diperlukan berbagai investasi publik guna mendorong peningkatan sarana dan prasarana di segala bidang. Selama tiga tahun terakhir nilai konsumsi pemerintah menunjukkan pola fluktuatif, masing-masing dari 19,39 % pada tahun 2008 menjadi sebesar 22,15 % di tahun 2009 dan 19,46 % pada tahun 2010 menjadi 17,65 % di tahun 2011 dan hingga akhirnya menjadi 18,45 % di tahun 2012.

Selain investasi pemerintah, minat swasta (investasi) yang dilakukan oleh pelaku usaha menjadialah satu barometer dalam mengukur kemampuan ekonomi daerah (daya saing daerah). Ekonomi regional Kabupaten Kubu Raya yang berkinerja baik selama 5 tahun terakhir direspon positif oleh pelaku ekonomi daerah di Kabupaten Kubu Raya. Perkembangan nilai investasi baik PMDN maupun PMA di Kabupaten Kubu Raya mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Naik turun nilai investasi terkait dengan kondisi perekonomian baik pada skala internasional, nasional, regional maupun domestik. Pada tahun 2010 reliasi nilai investasi (PMDN dan PMA) tercatat sebesar Rp.1.375.250.921.471,- dari target investasi sebesar Rp.1.141.577.910.000. Tahun 2011 realisasi investasi mencapai Rp.2.797.147.734.260,- dari target senilai Rp.1.655.786.480.000. Sampai dengan tahun 2013, kinerja investasi di Kabupaten Kubu Raya terus melampaui target yang telah ditetapkan. Di Tahun 2014, target investasi telah berhasil terlampaui di semester I (221,58 %), dengan nilai investasi mencapai Rp.6.072.539.980.000 untuk PMDN dan Rp. 1.648.453.425.120. Pada semester II di tahun 2014, nilai investasi Kabupaten Kubu Raya di tutup pada nominal Rp. 6.072.539.980.000 (PMDN) dan Rp1.648.453.425.120 (PMA).

Tabel 2.12
KONSUMSI PEMERINTAH DAN KONSUMSI RUMAH TANGGA DI
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2008 - 2013 (JUTA RUPIAH)

Tahun	Konsumsi Pemerintah	Konsumsi Rumah Tangga		
		Makanan	Non Makanan	Jumlah
2008	1.336.184,45	2.089.388,48	1.416.212,43	3.505.600,91
2009	1.686.588,01	2.263.883,85	1.473.563,50	3.741.447,35
2010	1.712.353,76	2.692.150,17	2.002.095,98	4.694.246,15
2011	1.761.120,76	2.877.363,98	2.436.025,08	5.313.389,06
2012	2.067.370,19	3.310.174,72	2.683.938,47	5.994.113,19
2013	2.281.625,47	3.799.897,14	3.095.041,94	6.894.939,08

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2014

2.3.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus Kedua dari Aspek daya Saing Daerah adalah Fokus Fasilitas Wilayah atau ketersediaan Infrastruktur yang memadai. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi



masyarakat merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 176, yang mengamatkan bahwa Pemerintah Daerah agar memberikan kemudahan bagi masyarakat atau investor dengan penyediaan sarana dan prasarana.

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah. Ketersediaan sarana prasarana wilayah yang didukung dengan infrastruktur yang memadai baik kualitas maupun kuantitas akan memberikan keunggulan kompetitif bagi daerah dalam upaya menarik investor untuk berinvestasi ke daerah ini. Ketersediaan sarana prasarana wilayah dan infrastruktur yang terus dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya meliputi sarana pendidikan, kesehatan, permukiman, perdagangan, perbankan, sarana perhubungan darat, serta sarana rekreasi dan olah raga. Selain itu pembangunan prasarana permukiman, prasarana perhubungan, prasarana jaringan, yang terdiri dari jaringan drainase, jaringan irigasi, serta jaringan utilitas lainnya, serta prasarana persampahan, tetap giat dilakukan penyediannya, sehingga mampu memperkuat keunggulan dinamis dan keunggulan statis yang sudah dimiliki sejak lama terkait dengan kondisi geografis Kabupaten Kubu Raya yang letaknya sangat strategis yaitu berdekatan dengan kota Pontianak.



Handwritten initials or signature

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan Kemiskinan, menyatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Dengan demikian percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi :

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil
4. Mensinergikan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.

Secara operasional strategi tersebut dijabarkan dengan instrument pendekatan klaster yang terdiri dari 4 (empat) klaster yaitu :

1. Program Penanggulangan Kemiskinan bersasaran Rumah Tangga atau Keluarga
2. Program Penanggulangan Kemiskinan bersasaran komunitas
3. Program Penanggulangan Kemiskinan bersasaran Usaha Mikro dan Kecil
4. Peningkatan dan Perluasan program Pro Rakyat.

3.2. Kondisi Umum Kemiskinan Daerah

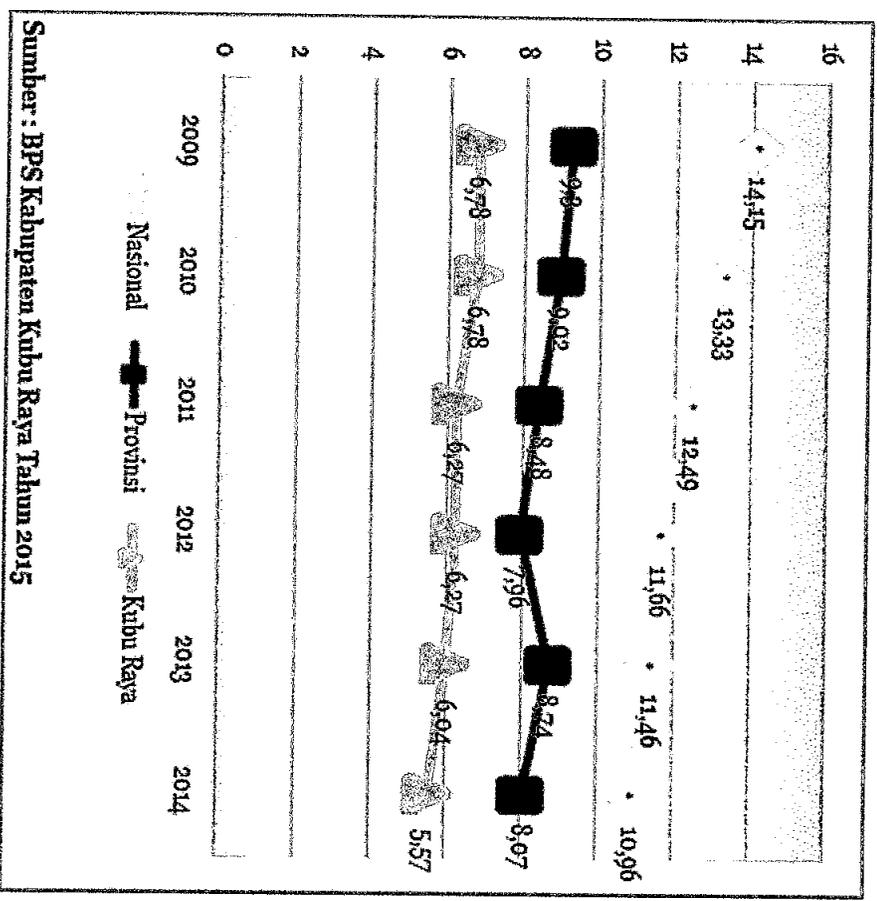
3.2.1. Jumlah Penduduk Miskin

Data kemiskinan Kabupaten Kubu Raya menurut data BPS sampai dengan tahun 2014, menempati urutan 3 terendah dari 14 kabupaten/ kota di Propinsi Kalimantan Barat, setelah Kabupaten Sanggau dan Kota Pontianak dengan persentase 5,57% atau 29.470 jiwa dari jumlah penduduk 538.815 jiwa. Secara grafik data persentase kemiskinan penduduk Kabupaten Kubu Raya selama 2009 sampai 2014 bergerak menurun. Pada tahun 2014, persentase penduduk miskin Kubu Raya tercatat sebesar 5,57%, berada dibawah dari rata-rata Provinsi Kalimantan Barat sebesar 8,07% maupun data Nasional yang tercatat sebesar 10,96%. Sedangkan secara absolut, jumlah penduduk miskin yang berhasil didekati dari 4 klaster program kemiskinan tersebut masing-masing 31.900 jiwa (2011), 32.800 jiwa (2012), 32.100 jiwa (2013) dan 29.470 jiwa (2014).



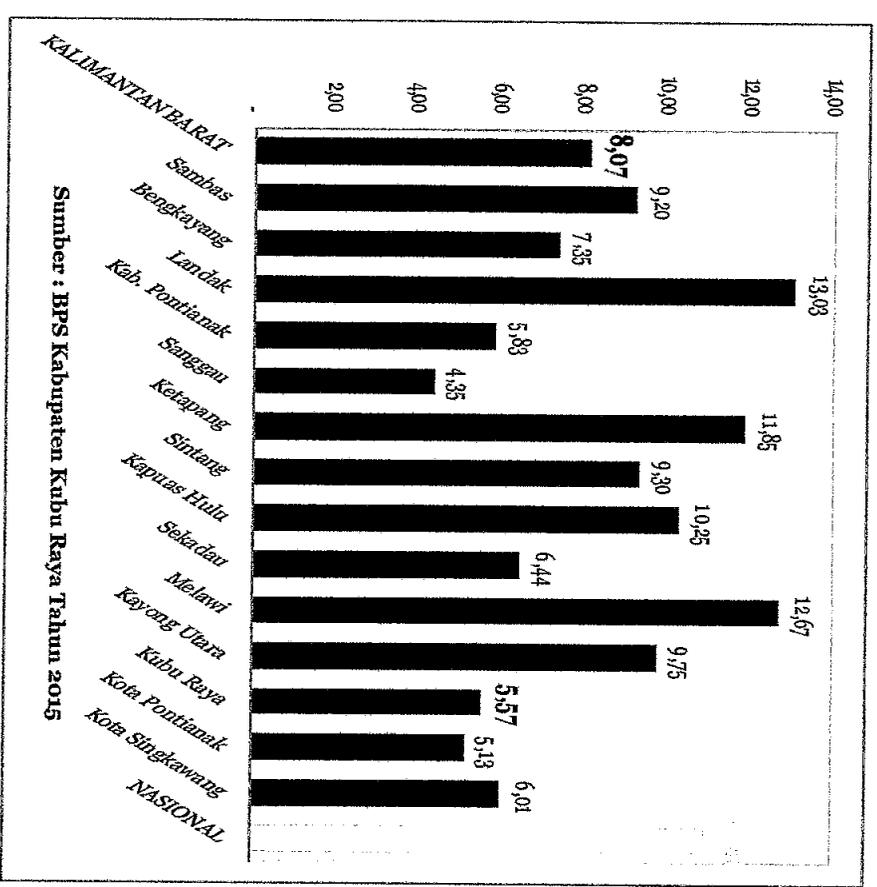
Handwritten signature or initials

GRAFIK 3.1
 PERSENTASE KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA



Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

GRAFIK 3.2
 PERBANDINGAN PERSENTASE KEMISKINAN NASIONAL, PROVINSI
 KALBAR DAN KAB. KUBU RAYA TAHUN 2014



Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015



Handwritten signature or mark.

3.2.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Selain persentase kemiskinan/ penduduk miskin, dimensi lain yang perlu dilihat adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Keparahannya/kedalaman kemiskinan berkaitan dengan upaya memberdayakan (empowerment) seseorang untuk mampu keluar dari kemiskinan. Sehingga intervensi program kemiskinan disamping harus mampu memperkecil/mengurangi jumlah penduduk miskin, juga dirancang untuk mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan, sebagai bagian yang paling penting dari ukuran penilaian keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melihat perbandingan tentang indeks kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya terhadap rerata propinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Karakteristik Kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2009-2013

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	P ₀	P ₁	P ₂	GK
Kabupaten Kubu Raya					
2009	37.090	6,78	1,05	0,26	177.219
2010	37.090	6,78	1,06	0,25	177.219
2011	31.900	6,27	0,55	0,08	263.525
2012	32.800	6,27	0,58	0,12	247.828
2013	32.100	6,04	0,45	0,06	269.835
Propinsi Kalimantan Barat					
2013	407.300	8,74	1,30	0,32	270.306

Sumber: BPS Kubu Raya

Keterangan :

- P₀ : Persentase Kemiskinan.
- P₁ : Indeks Kedalaman Kemiskinan.
- P₂ : Indeks Keparahannya Kemiskinan.
- GK : Garis Kemiskinan.

Pada Periode 2009 -2013 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P₂) menunjukkan trend yang menurun, Indeks Kedalaman Kemiskinan menurun dari 1,05 pada tahun 2009 menjadi 0,45 pada tahun 2013. Demikian pula Indeks Keparahannya Kemiskinan menurun dari 0,26 pada tahun 2009 menjadi 0,06 pada tahun 2013. Penurunan pada kedua nilai indeks ini mengidentifikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga makin menyempit. Secara rata-rata, Indeks Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya masih berada di bawah rata-rata Propinsi Kalimantan Barat pada tahun 2012.



Garis Kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp.269.835 perkapita perbulan. Garis kemiskinan ini lebih besar daripada Garis Kemiskinan Propinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar Rp. 270,306, hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata pengeluaran perkapita perbulan penduduk miskin Kabupaten Kubu Raya semakin membaik dan hampir sama dengan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan penduduk Propinsi Kalimantan Barat. Dikaitakan dengan data pengeluaran penduduk untuk konsumsi, maka meningkatnya pengeluaran konsumsi untuk makanan oleh penduduk miskin setidaknya merefleksikan membaiknya daya beli penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya salah satunya juga dipengaruhi oleh bentang geografis wilayah yang luas. Secara analisis, kondisi geografis yang jauh dari pusat pemerintahan dan minim aksesibilitas akan mempengaruhi ketersediaan barang dan jasa yang dapat didistribusikan. Kondisi ini ini menjadi pemicu terjadinya kenaikan harga-harga barang sampai ke tingkat konsumen (inflasi atas dasar harga konsumen). Dampak dari meningkatnya harga tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi kemampuan daya beli penduduk, sehingga peningkatan pendapatan tidak terlalu berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk. Jumlah desa-desa tertinggal yang ada di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel sebagai 3.4.



TABEL 3.2
DAFTAR DESA TERTINGGAL KABUPATEN KUBU RAYA

NO	KECAMATAN / DESA	NO	KECAMATAN / DESA	NO	KECAMATAN / DESA
A.	BATU AMPAR	C.	KUBU	G.	SUNGAI RAYA
	1. Tanjung Harapan		28. Olak-Olak Kubu		52. Kapur
	2. Ambarawa		29. Pelita Jaya		53. Sungai Ambangah
	3. Sungai Jawi		30. Seruat III		54. Tembang Kacang
	4. Sungai Besar		31. Seruat II		55. Sungai Bulan
	5. Tasik Malaya		32. Sungai Selamat		56. Sungai Asam
	6. Nipah Panjang		33. Ambawang		57. Pulau Limbung
	7. Teluk Nibung		34. Air Putih		58. Gunung Tamang
	8. Sei. Kerawang		35. Sei. Bemban		59. Madu Sari
	9. Sumber Agung		36. Sepakat Baru		60. Mekar Sari
	10. Muara Tiga		37. Mengkalang	H.	SUNGAI AMBAWANG
	11. Tanjung Beringin	D.	TELUK PAKEDAI		61. Sei. Durian
B.	TERENTANG		38. Sei. Nibung		62. Simpang kanan
	12. Sungai Dungun		39. Seruat I		63. Puguk
	13. Terentang Hulu I		40. Kuala Karang		64. Bengkarek
	14. Teluk Bayur		41. Tanjung Bunga		65. Pasak Piang
	15. Teluk Empening		42. Teluk Gelam		66. Pasak
	16. Sungai Radak I		43. Pasir Putih		67. Lingga
	17. Sungai Radak II		44. Madura		68. Korek
	18. Permata		45. Sungai Deras		69. Jawa Tengah
	19. Betuah		46. Arus Deras		70. Mega Timur
C.	KUBU		47. Sungai Nipah		71. Teluk Bakung
	20. Dabung	E.	SUNGAI KAKAP	I.	SUNGAI AMBAWANG
	21. Kubu		48. Sepuk Laut		72. Kuala Mandor A
	22. Sungai Terus		49. Sungai Nipah		73. Kuala Mandor B
	23. Teluk Nangka	F.	RASAU JAYA		74. Sungai Enau
	24. Jangkang I		50. Bintang Mas		75. Kubu Padi
	25. Jangkang II		51. Pematang Tujuh		76. Retok
	26. Pinang Dalam				
	27. Kampung Baru				
Total					76 Desa

Sumber : SK Bupati Kubu Raya Nomor 102 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 366 Tahun 2009 tentang Desa Tertinggal di Daerah Kabupaten Kubu Raya

3.3. Indeks Pembangunan Manusia

3.3.1. Peringkat IPM Kabupaten Kubu Raya

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saat ini merupakan ukuran yang umum digunakan untuk memahami perkembangan kesejahteraan rakyat dalam satu daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan agregasi dari tiga indikator pembangunan, yaitu ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kubu Raya berdasarkan metode perhitungan baru secara umum berada pada peringkat ke 3 se Propinsi Kalimantan Barat. Dibandingkan dengan metode terdahulu, kendatipun nilai Indeks



Pembangunan Manusia (IPM) terus mengalami peningkatan, yaitu dari 66,77 pada tahun 2009 menjadi 69,32 pada tahun 2013, namun masih berada dari nilai rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Barat yang mencapai 70,93 pada tahun 2013. Dengan metode lama semua indikator pembentuk IPM di Kabupaten Kubu Raya lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat. Nilai yang paling mengkhawatirkan adalah masih rendahnya persentase Angka Melek Huruf yang pada tahun 2013 baru sekitar 89,10%. Artinya, hingga tahun 2013 masih ditemukan sebanyak 10,9% penduduk berusia 15 tahun ke atas yang buta huruf di Kabupaten Kubu Raya. Besaran angka buta huruf Kabupaten Kubu Raya tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat. Sehingga dikarenakan tingginya angka buta huruf itulah salah satu yang menyebabkan menurunnya peringkat IPM Kabupaten Kubu Raya dari peringkat 9 tahun 2010 ke tahun peringkat 10 pada tahun 2011-2012 dan peringkat 11 pada 2013.

Pada tahun 2014, BPS merilis pendekatan baru dalam perhitungan IPM dengan mengacu pada penyempurnaan metodologi penghitungan IPM sejak tahun 2010. Tahun 2011 dan tahun 2014 dilakukan penyempurnaan metodologi (IPM Metode Baru). Indonesia mulai mengimplementasikannya pada tahun 2014 untuk penghitungan LPM 2010-2014 berdasarkan pendekatan baru yang dilakukan oleh **UNDP (United Nations Development Program)**. Keunggulan metode baru dalam penghitungan IPM adalah menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif), dengan kata lain meliputi indikator **Angka Melek Huruf (AMH)** diganti dengan **Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)** dan **Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita** diganti dengan **Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita**. Untuk ditingkat Regional/Provinsi, mengingat etersediaan angka PNB perkapita tidak tersedia maka diproksi dengan **pengeluaran per kapita disesuaikan (PPP)** yang bersumber data SUSENAS. Dengan memasukkan **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** dan **Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)**, didapat gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Demikian juga PNB menggantikan PDB (PPP di level Provinsi) lebih menggambarkan pendapatan masyarakat suatu wilayah

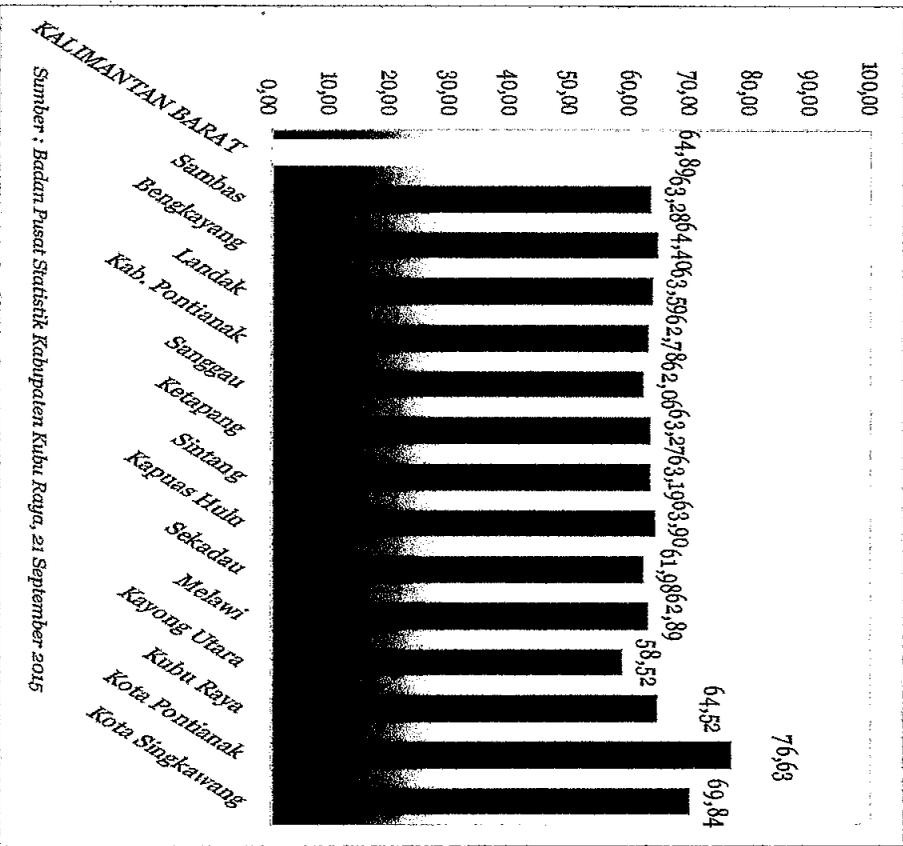
TABEL 3.5
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010-2014

Uraian	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
Angka Harapan Hidup	69,60	69,62	69,64	69,64	69,54
Angka Harapan Lama Sekolah	11,51	10,80	11,98	12,14	12,34
Rata-rata Lama Sekolah	5,85	5,87	6,01	6,16	6,41
Pengeluaran Per Kapita	7.168	7.488	7.821	7.935	7.973
IPM	61,87	62,56	63,42	63,94	64,52
Peringkat IPM	3	4	4	4	3

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya, 21 September 2015

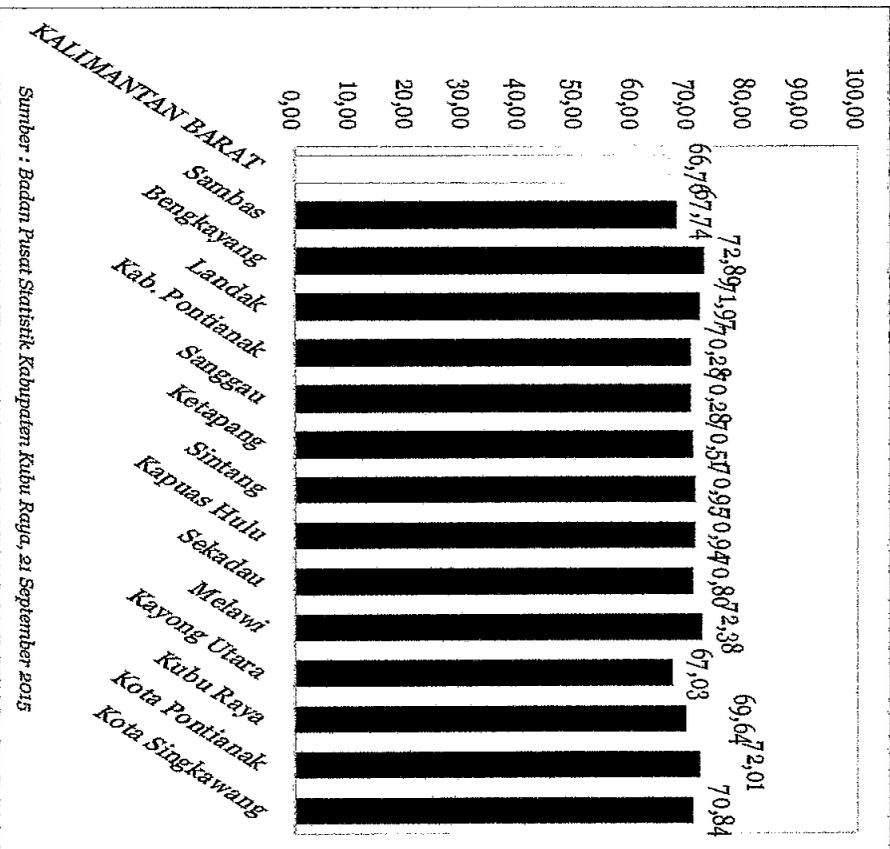


GRAFIK 3.6
 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya, 21 September 2015

GRAFIK 3.7
 ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014

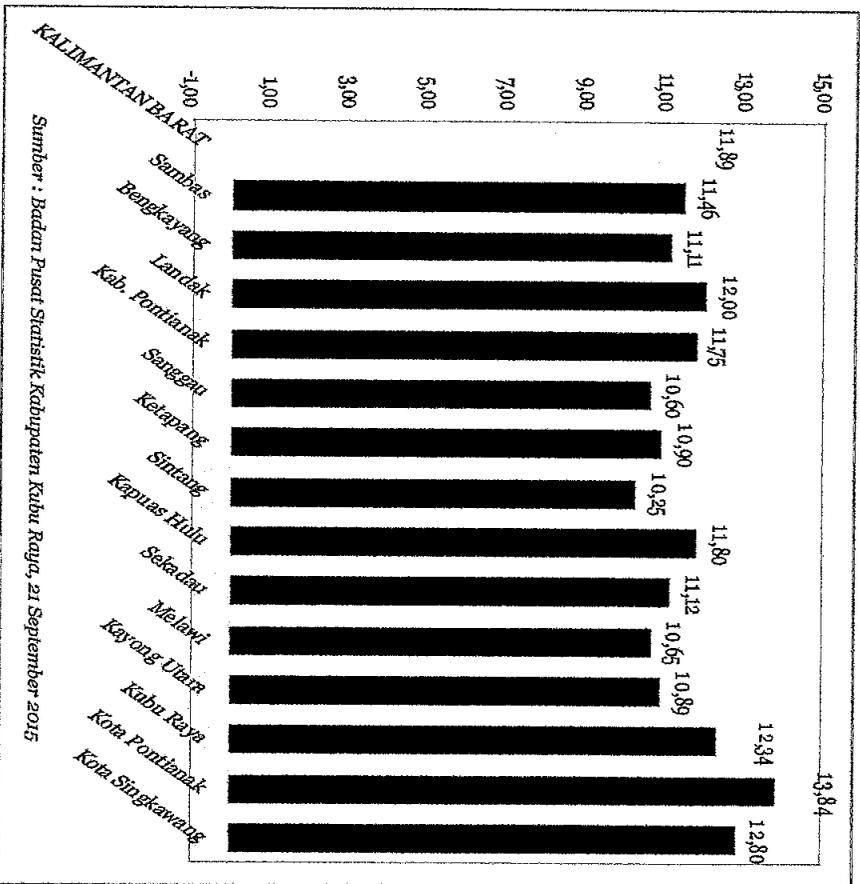


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya, 21 September 2015



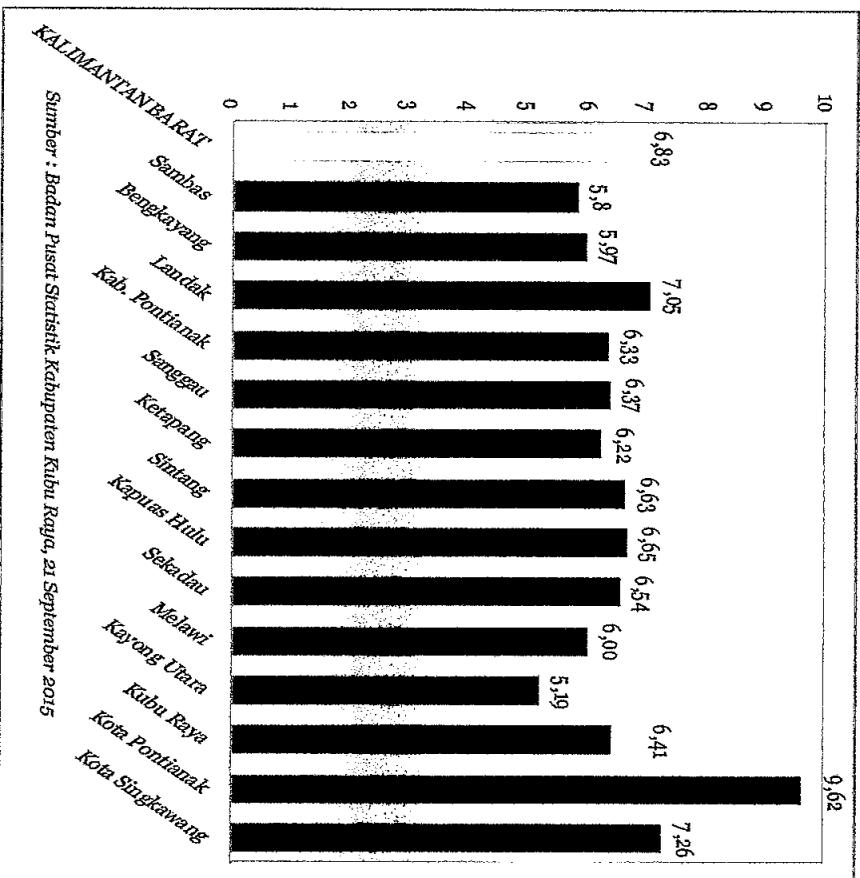
2
R

GRAFIK 3-8
 ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH (EYS) KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya, 21 September 2015

GRAFIK 3-9
 ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH (MYS) KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014

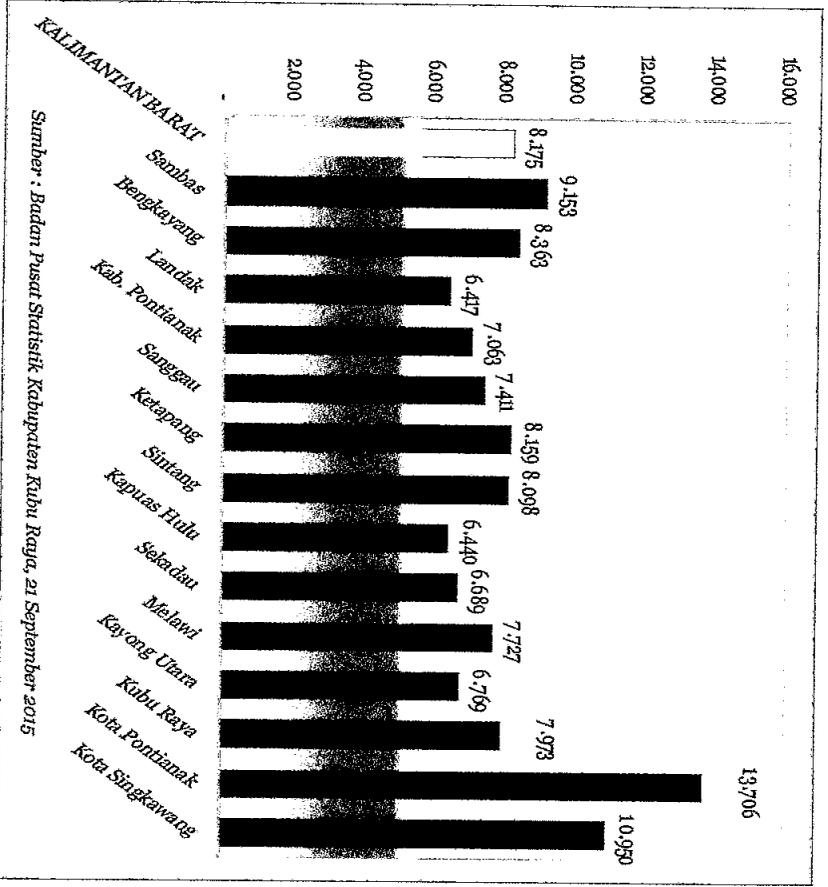


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya, 21 September 2015



Handwritten mark resembling a stylized 'R' or '2'.

ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH (MYS) KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya, 21 September 2015



Handwritten signature or initials.

BAB III

PROFIL KEMISKINAN

3.1. Konsep Kemiskinan

Konsep atau definisi kemiskinan yang digunakan di Indonesia sesuai dengan konsep Badan Pusat Statistik adalah Kemiskinan Absolut diukur yaitu kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti Pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan Pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum/kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Dengan demikian penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan absolut, sejauh ini dinilai mampu untuk membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan absolut sangat penting untuk menilai efek dari kebijakan penanggulangan kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu program terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit usaha kecil). Angka kemiskinan akan dapat dibandingkan antara satu Negara dengan Negara lain, jika garis kemiskinan absolut yang digunakan sama di Negara yang dibandingkan. Bank dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar Negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan kemana menyalurkan sumber daya sosial atau dana yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Pemerintah Indonesia menggunakan ukuran pendapatan US \$1 perkapita per hari sebagai garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah US\$1 perkapita per hari dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Tidak tercapainya standar hidup layak oleh seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sifatnya multidimensi seperti tidak mencukupinya kualitas SDM, kurangnya kesempatan produktif dan tidak mencukupinya perlindungan sosial. Rendahnya kualitas SDM dipengaruhi oleh akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya yang diselenggarakan pemerintah. Sementara kurangnya kesempatan produktif dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan dan iklim wirausaha khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sehingga jaminan perlindungan sosial yang cukup akan melindungi masyarakat dari guncangan sosial yang dapat menyebabkan seseorang jatuh kedalam kemiskinan ketika terjadi bencana, sakit ataupun krisis ekonomi.



BAB IV

PRIORITAS INTERVENSI

Prioritas intervensi kebijakan ditentukan dengan menganalisis determinan kemiskinan yang berhubungan dengan kondisi umum kemiskinan di daerah. Determinan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya berkaitan erat dengan masih rendahnya angka melek huruf, ketidakmerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar perumahan dan lainnya. Penyebab lain adalah budaya masyarakat untuk dapat keluar dari garis kemiskinan serta terbatasnya kemampuan wirausaha masyarakat. Bidang-bidang yang menjadi determinan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya adalah :

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Infrastruktur Dasar
4. Bidang Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan
5. Bidang Ketahanan Pangan
6. Bidang Ekonomi

4.1. Bidang Pendidikan

Tingginya tingkat Pendidikan yang berhasil ditamatkan menjadi salah satu peluang bagi masyarakat untuk keluar dari perangkap kemiskinan yang melilitnya. Dengan pendidikan yang berkualitas, seseorang memiliki peluang yang lebih besar untuk mengakses kesempatan kerja sehingga akan mempertinggi pendapatan perkapita untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi keluarganya. Bagi keluarga miskin, kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan formal menjadi lebih sulit untuk dipenuhi. Di perkotaan ataupun pedesaan anak-anak dari keluarga dengan ekonomi yang kurang mapan, dipaksa untuk terlibat membantu ekonomi keluarga. Peran ganda tersebut menjadikan mereka tidak bisa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Pada akhirnya anak dari keluarga miskin relatif lebih sulit bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang dapat mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan absolut.

Relevan dengan hal tersebut, indikator tingkat kemiskinan dari sisi pendidikan adalah (1) Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, (2) Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs., (3) Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA., (4) Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, (5) Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs., (6) Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA, (7) Persentase Angka



Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, (8) Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs, (9) Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, dan (10) Persentase Angka Melek Huruf (AMH). Kondisi dari perbandingan capaian indikator bidang pendidikan Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat dan Nasional, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Perbandingan Capaian Indikator Pendidikan Kabupaten Kubu Raya,
Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

NO	Jenjang Pendidikan	Capaian Daerah 2013	Capaian Provinsi 2013	Capaian Nasional 2013
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	111,29	111,33	107,71
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	89,09	76,15	85,96
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)	53,06	60,24	66,61
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	95,04	94,72	95,59
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	80,85	66,85	73,88
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)	50,94	58,98	54,25
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI (%)	98,90	97,02	98,41
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	94,55	86,97	90,81
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA (%)	57,14	60,06	63,84
10	Angka Melek Huruf (%)	89,91	92,75	94,14

Sumber: BPS Prov. Kalbar dan BPS-RI, Susenas 2003-2013

Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya dari sisi pendidikan berada di tingkat pendidikan Menengah Atas. Terlihat pada tabel bahwa seluruh parameter yang tergambar dari indikator pendidikan di tingkatan Menengah atas meliputi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA, dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, masih berada dibawah level Provinsi dan Nasional. Kendatipun secara kuantitatif pemerintah pusat dan daerah sudah berusaha untuk melakukan perbaikan kuantitas, kualitas serta aksesibilitas dunia pendidikan, akan tetapi permasalahan opportunity cost sering kali menjadi penghalang keberhasilan program.

Kendatipun Pemerintah telah berupaya meringankan biaya pendidikan dengan program BOS, akan tetapi dana kompensasi BBM tersebut hanya mampu menanggung sebagian kecil kebutuhan. Sekolah penerima biaya operasional hanya mampu menggratiskan antara lain formulir pendaftaran, buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan, biaya pemeliharaan, ujian sekolah, ulangan umum bersama, dan ulangan umum harian, yang mana hal-hal sebagaimana tersebut hanyalah kebutuhan pokok siswa. Padahal kebutuhan siswa jauh lebih besar dari itu. Dengan hanya menanggung sejumlah biaya pokok pendidikan orang tua murid masih harus menanggung biaya terbesar sekolah siswa. Orang tua siswa masih harus menyiapkan pengeluaran untuk keperluan penunjang, seperti biaya seragam dan perlengkapan sekolah, transportasi, dan uang saku siswa. Sehingga bagi penduduk miskin (orang tua maupun peserta didik), secara sadar ataupun terpaksa terdorong untuk memasuki ke pasar kerja secara lebih awal. Fenomena tersebut, menjadikan posisi tawar penduduk yang



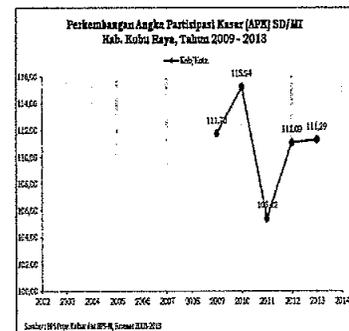
kurang memiliki pengalaman dan keahlian saat masuk ke dalam pasar kerja menjadi rendah dalam hal penggajian.

Hal yang sama juga terlihat pada indikator Angka Melek Huruf yaitu sebesar 89,91 % masih dibawah capaian provinsi Kalimantan Barat (92,75%) dan Nasional (94,14%). Dari sudut pandang kesempatan kerja, kemampuan intelektual masih menjadi salah satu indikator yang dipertimbangkan dalam menempati suatu kedudukan tertentu. Kemampuan intelektual dasar berkaitan dengan kemampuan kognitif dalam meningkatkan produktivitas kerja yang dihasilkan. Dengan kondisi angka melek huruf yang masih besar, terindikasi bahwa kondisi pasar kerja yang berpeluang untuk dimasuki masyarakat di Kabupaten Kubu Raya masih banyak yang berada pada keahlian yang diwarisi secara turun temurun.

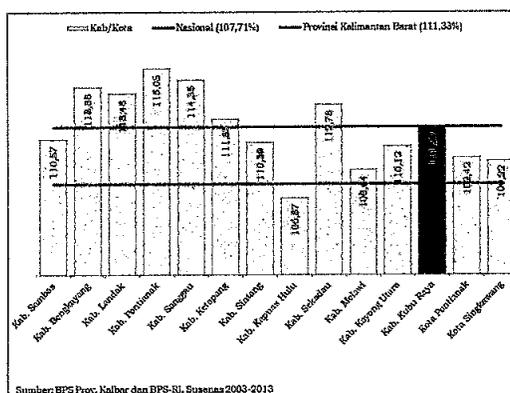
Kendatipun secara prioritas intervensi, APK SD/MI KKR tidak bermasalah, akan tetapi posisi nya hampir bersinggungan dengan garis pada kwadran 2, sehingga upaya perbaikan perlu terus dilakukan untuk mempertahankan posisi tidak bermasalah dengan peningkatan kinerja pada jenjang pendidikan SD/MI

4.1.1. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)
4.1.1.1. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI

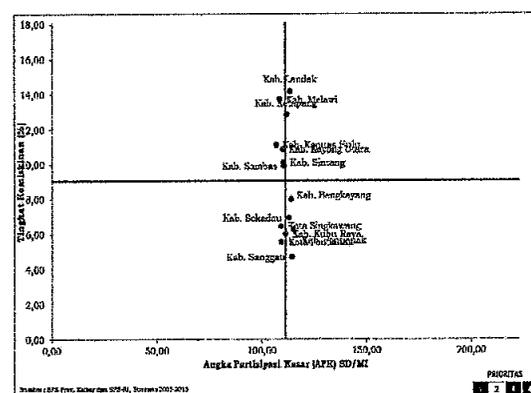
Merujuk posisi relatif capaian APK SD/MI, secara prosentase Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berada pada urutan ke 7 dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat dengan nilai sebesar 111,29%. Kondisi tersebut masih dibawah angka rata-rata Provinsi sebesar 111,33% dan lebih baik dari rata-rata angka Nasional yang tercatat sebesar 107,71%. Sedangkan capaian APK SD/MI berdasarkan perkembangan antar waktu, capaian APK SD/MI mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2011 APK SD/MI mengalami lonjakan yang menurun berada pada angka 105,42% di tahun 2011. Namun pada dua tahun berikutnya menunjukkan perkembangan yang meningkat secara bertahap sebesar 111,09% (2012) dan 111,29% (2014). Posisi relatif capaian indikator bidang pendidikan, perkembangan antar waktu, dan prioritas intervensi wilayah dapat dilihat pada grafik 4.1 dan 4.2 berikut.



Grafik 4.1
Posisi Relatif dan Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Tahun 2013



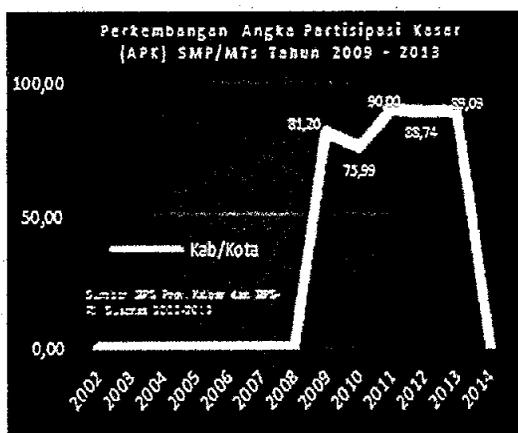
Grafik 4.2
Prioritas Intervensi Wilayah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Tahun 2013



4.1.1.2. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTs

Daya serap sekolah yang dibangun di Kabupaten Kubu Raya untuk jenjang SMP/MTs secara absolut cukup baik. Prosentase APK SMP/MTs Kabupaten Kubu Raya terpaut 3,13 % diatas angka Nasional dan berada jauh diatas rata-rata Kalimantan Barat yang tercatat 60,24%.

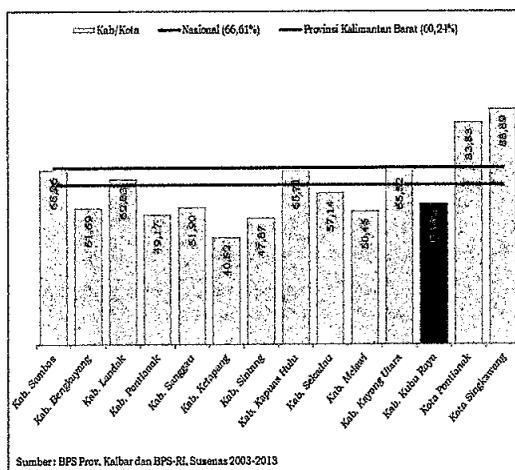
Pada grafik 4.3 dan 4.4 di atas dapat dijelaskan bahwa posisi relatif capaian APK SMP/MTs Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berada pada urutan ke 1 dari 14 kabupaten/kota di Kalbar dengan nilai sebesar 89,09%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian indikator APK SMP/MTs Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berada diatas rata-rata capaian Provinsi sebesar 76,15% dan



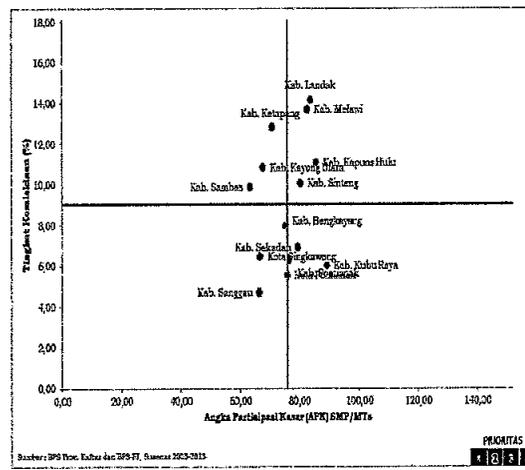
lebih baik dari rata-rata Nasional yang sebesar 85,96%. Sedangkan perkembangan antar waktu capaian APK SMP/MTs berfluktuasi dimana terjadi penurunan pada tahun 2010 sebesar 5,21% dari tahun 2009 menjadi sebesar 75,99% dan meningkat tajam menjadi sebesar 90,00% di tahun 2011 dan kembali turun di tahun 2012 menjadi sebesar 88,74% dan di tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 89,09%. Dilihat dari Prioritas Wilayah Indikator APK SMP/MTs Kabupaten Kubu

Raya Tahun 2013 pada grafik 4.4, maka indikator ini tidak bermasalah karena berada pada kuadran 4 (biru) yang berarti tidak prioritas. Posisi relatif capaian indikator bidang pendidikan, perkembangan antar waktu, dan prioritas intervensi wilayah dapat dilihat pada grafik.

Grafik 4.3
Posisi Relatif dan Perkembangan Antar Waktu
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Tahun 2013



Grafik 4.4
Prioritas Intervensi Wilayah
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Tahun 2013

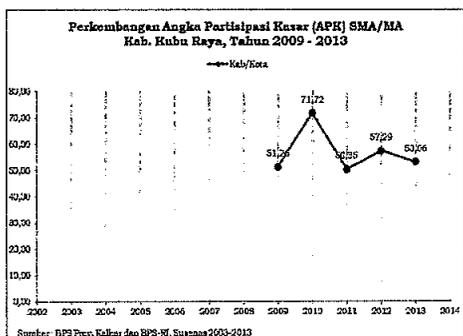


4.1.1.3. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMA/MA

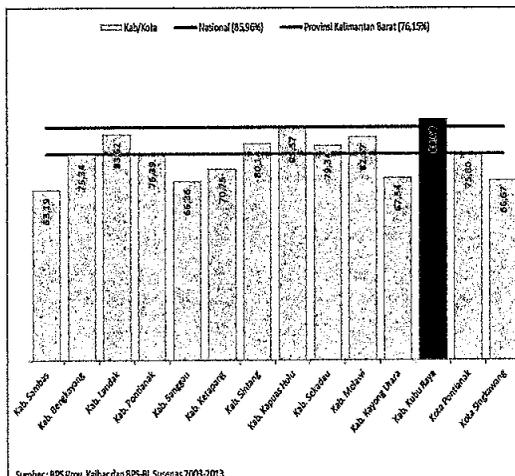
Capaian indikator APK untuk pendidikan usia SMA/MA di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 masih berada dibawah rata-rata capaian Provinsi maupun nasional. Posisi relatif APK SMA/MI Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013 berada pada urutan ke 8 dari 14 kabupaten/kota di

Kondisi APK SMA/MA Kabupaten Kubu Raya masih perlu mendapatkan perhatian yang serius. Prosentase APK SMU/MI berada di bawah rata-rata angka Kalimantan Barat dan Nasional. Pemerintah Kupaten Kubu Raya, perlu memetakan cluster-cluster yang APK SMU/MI-nya masih rendah, sehingga dapat dilakukan review secara spesifik untuk meningkatkan capaian hasil program.

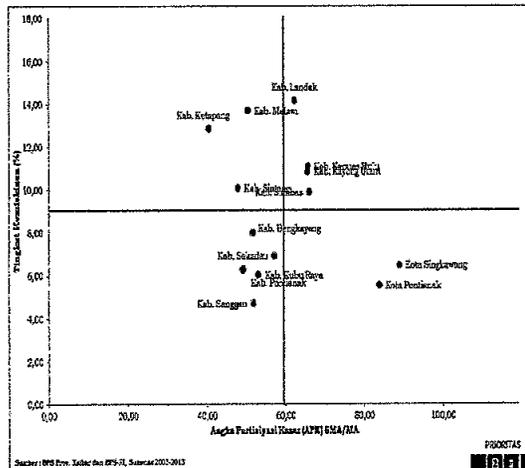
Kalbar dengan nilai sebesar 53,06%. Sementara posisi relatif APK SMA/MI Provinsi dan Nasional pada tahun yang sama sebesar sebesar 60,24% dan 66,61%. Melihat dari jumlah ketersediaan fasilitas belajar SMA/MI di Kabupaten Kubu Raya yang berjumlah 93 unit, maka tingkat efensiensi atas sekolah yang terbangun dengan rombongan belajar hanya sebesar 431 %. Dalam kaitannya dengan penyebab kemiskinan, prosentase terhadap prosentase pencapaian APK SMU/MI mengindikasikan bahwa jumlah anak putus sekolah pada tingkat SMP/MTs yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA/MI di Kabupaten Kubu Raya cukup besar. Dari data yang dikeluarkan oleh BPS, jumlah penduduk yang bekerja dengan pedidikan setingkat SMP terdata sebesar 52.801. Penduduk yang bekerja dengan pendidikan rendah tersebut, akan mempengaruhi kemampuannya untuk keluar dari perangkap kemiskinan sebagai akibat rendahnya pendidikan yang berhasil di tamatkan.



Grafik 4.5
Posisi Relatif dan Perkembangan Antar Waktu
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Tahun 2013



Grafik 4.6
Prioritas Intervensi Wilayah
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Tahun 2013



Sedangkan perkembangan antar waktu capaian APK SMA/MA terjadi kenaikan dan penurunan tiap tahunnya dimana pada tahun 2010 capaian indikator APK SMA/MA Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sebesar 71,72% mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi sebesar 50,33%, kemudian di tahun 2012 naik menjadi sebesar 57,29% dan kembali



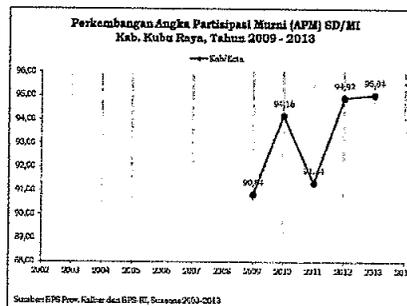
turun di tahun 2013 menjadi sebesar 53,06%. Dilihat dari Prioritas Wilayah Indikator APK SMA/MA Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berada pada kuadran 2 yaitu zona kuning yang berarti indikator ini masih bermasalah dan menjadi prioritas untuk didorong kinerjanya ditahun berikutnya. Posisi relatif capaian indikator bidang pendidikan, perkembangan antar waktu, dan prioritas intervensi wilayah dapat dilihat pada grafik 4.5 dan 4.6 berikut.

4.1.2. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)

4.1.2.1. ANGKA PARTISIPASI MURNI SD/MI

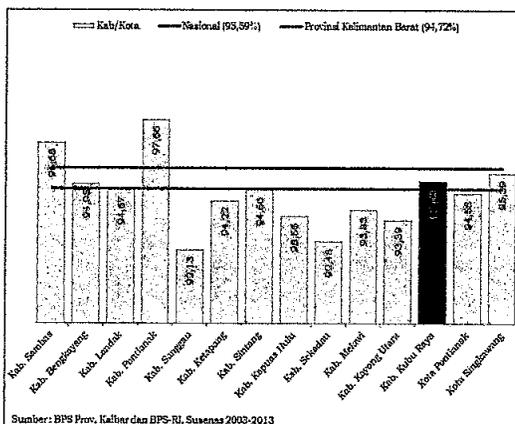
Berdasarkan grafik 4.7 dan 4.8, posisi relatif capaian indikator bidang pendidikan, perkembangan antar waktu, dan prioritas intervensi wilayah untuk APM SD/MI Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berada pada urutan ke 4 dari 14 kabupaten/kota di Kalbar dengan nilai sebesar 95,04%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian indikator APM SD/MI Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 lebih baik dari rata-rata capaian Provinsi sebesar 94,72%, kendatipun masih berada dibawah capaian relatif dari rata-rata Nasional yang tercatat sebesar 95,59%.

Terkait dengan hal itu, dari perkembangan antar waktu capaian APM SD/MI secara keseluruhan menunjukkan kenaikan selama periode dua tahun berjalan. Pada tahun 2009 prosentase angka capaian APM SD/MI sebesar 90,84% dan di tahun 2010 bergerak naik menjadi sebesar 94,16%. Pada perodesasi 2010-2011 tetapi terjadi penurunan sebesar 2,82% menjadi sebesar 91,34% dan kemudian secara

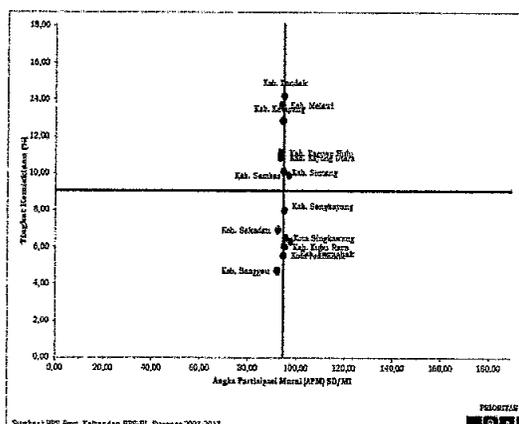


APM SD/MI di Kabupaten Kubu Raya berada diatas rata-rata Kalimantan Barat. Dengan angka APM SD/MI sebesar 95,04%, maka proporsi anak usia SD/MI Kabupaten Kubu Raya yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya, 95,04% lebih sesuai dibandingkan proporsi rata-rata anak SD/MI usia yang sama yang sedang bersekolah di Provinsi Kalimantan Barat.

Grafik 4.7
Posisi Relatif dan Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Tahun 2013



Grafik 4.8
Prioritas Intervensi Wilayah
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Tahun 2013



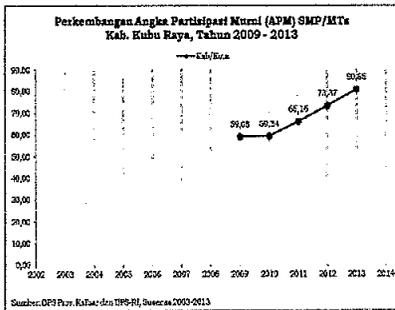
signifikant bemonjak tajam di tahun 2012 menjadi sebesar 94,92%. Pada tahun analisa (2013) angka capaian APM SD/MI kembali meningkat menjadi sebesar 95,04%. Melihat data sebagaimana tergambar pada grafik, apabila dilakukan konversi ke tahapan analisa Prioritas



Intervensi Wilayah, APM SD/MI Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berada pada kuadran 4 yaitu zona biru yang berarti indikator ini **tidak bermasalah** dan bukan merupakan prioritas utama dalam intervensi kebijakan di bidang pendidikan. Posisi-posisi angka capaian APM SD/MI di Kabupaten Kubu Raya, dapat dilihat pada tabel berikut

4.1.2.2. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMP/MTs

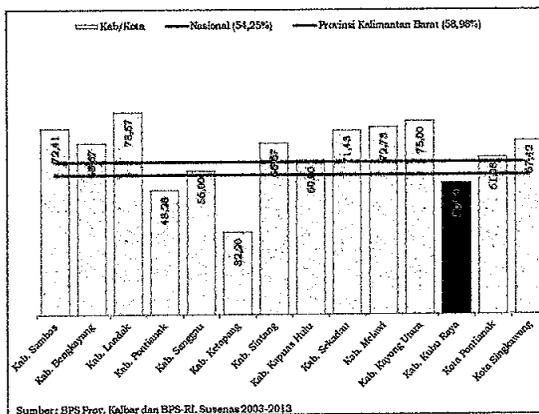
Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, posisi relatif capaian APM SMP/MTs Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berada pada urutan ke 3 dari 14 kabupaten/kota di Kalbar dengan nilai sebesar 80,85%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian indikator APM SMP/MTs Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 jauh lebih baik dari rata-rata capaian Provinsi sebesar 66,85% dan berada diatas rata-rata Nasional yang sebesar 73,88%. Sedangkan perkembangan antar waktu capaian APM SMP/MTs secara keseluruhan terjadi kenaikan yang signifikan tiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan kenaikan pertahunnya sebesar 6,48% sehingga pada tahun 2013 capaian indikator APM SMP/MTs sebesar 80,85%. Dilihat dari Prioritas Wilayah Indikator APM SMP/MTs Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 pada grafik 4.8, berada pada kuadran 4 yaitu zona biru yang berarti indikator ini **tidak bermasalah** dan bukan



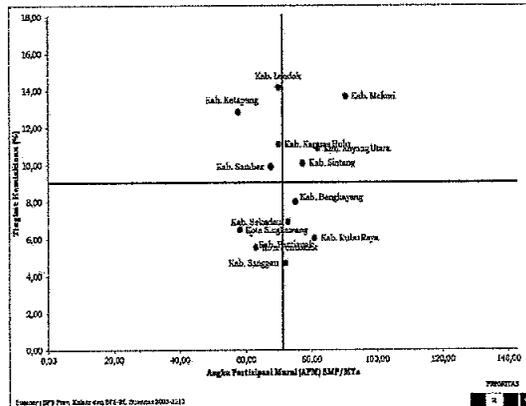
merupakan prioritas utama dalam intervensi kebijakan di bidang pendidikan. Posisi relatif capaian indikator bidang pendidikan, perkembangan antar waktu, dan prioritas intervensi wilayah dapat dilihat pada grafik 4.9 dan 4.10 berikut.

APM SMP/MTs di Kabupaten Kubu Raya secara relatif bergerak naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 APM SMP/MTs diatas rata-rata Kalimantan Barat maupun Nasional. Perkembangan angka APM SMP/MTs menunjukkan penerapan kurikulum jenjang pendidikan SD/MI cukup berhasil diterapkan dan ditunjang dengan ketersediaan guru yang berkualitas.

Grafik 4.9
Posisi Relatif dan Perkembangan Antar Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Tahun 2013

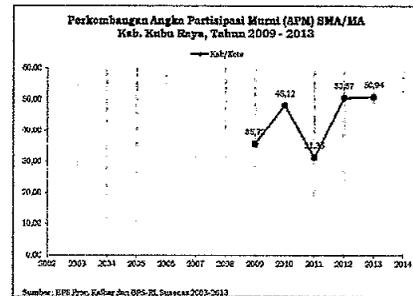


Grafik 4.10
Prioritas Intervensi Wilayah Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Tahun 2013



4.1.2.3. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMA/MA

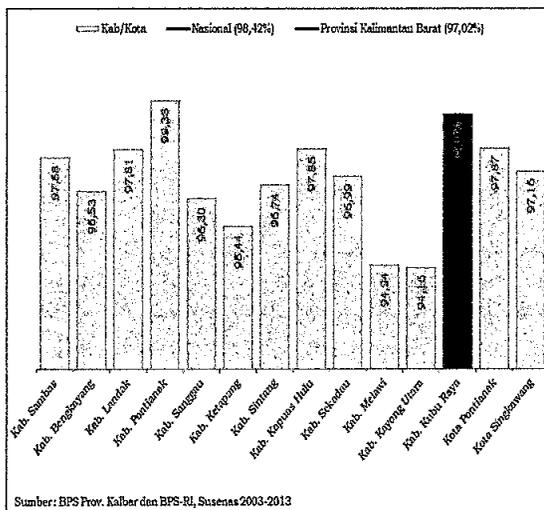
Pada grafik 4.11 dan 4.12 terlihat bahwa posisi relatif capaian APM SMA/MA Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berada pada urutan ke 12 dari 14 kabupaten/kota di Kalbar dengan nilai sebesar 50,94%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian indikator APM SMA/MA Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berada dibawah rata-rata capaian Provinsi sebesar 58,98% dan lebih buruk dari rata-rata Nasional yang sebesar 54,25%. Sedangkan perkembangan antar waktu capaian APM SMA/MA terjadi kenaikan dan penurunan tiap tahunnya dimana pada tahun 2010 capaian indikator APM SMA/MA Kabupaten Kubu Raya sebesar 48,12% mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi sebesar 31,35%, kemudian di tahun 2012 naik menjadi sebesar 50,57% dan pada di tahun 2013 menjadi sebesar 50,94%. Dilihat dari Prioritas Wilayah Indikator APM SMA/MA Kabupaten Kubu Raya Tahun grafik 4.12, berada pada kuadran 2 yaitu zona indikator ini **masih bermasalah** dan menjadi prioritas utama untuk segera dilakukan intervensi kebijakan sehingga capaian indikator tersebut dapat meningkat ditahun berikutnya.



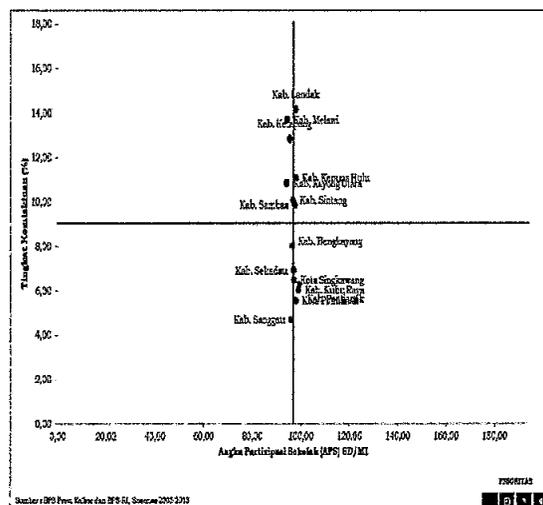
Kondisi APM SMA/MI di Kabupaten Kubu Raya berada di bawah rata-rata level provinsi dan nasional. Kondisi mengindikasikan masih besarnya siswa berusia lebih tua dari kelompok usia yang semestinya (overage) di tingkat SMU/MI. Beberapa hal yang diperkirakan menjadi penyebab adalah ketersediaan guru yang berkualitas dan merata, rombongan belajar yang melebihi kapasitas daya tampung kelas (overload), sehingga proses belajar mengajar menjadi tidak efektif

2013 pada kuning yang berarti

Grafik 4.11
Posisi Relatif dan Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Kabupaten Kubu Raya



Grafik 4.12
Prioritas Intervensi Wilayah Angka Partisipasi Murni (APM)



Handwritten signature or mark.

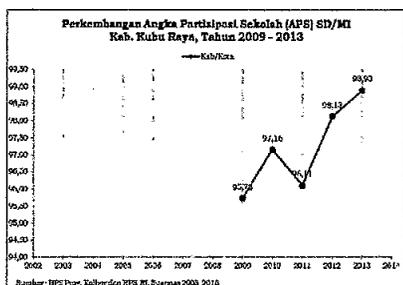
4.1.3. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)

4.1.3.1. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) SD/MI

Secara umum posisi relatif capaian indikator bidang pendidikan, perkembangan antar waktu, dan prioritas intervensi wilayah dari indikator partisipasi sekolah di Kabupaten Kubu Raya untuk jenjang pendidikan SD/MI lebih baik dibandingkan dengan rata-rata angka APS SD/MI di tingkat Provinsi Kalbar maupun secara nasional. Posisi relatif capaian APS SD/MI Kabupaten

APS SD/MI di Kabupaten Kubu Raya secara relatif berada di posisi diatas 95%. Dengan kondisi wilayah geografis yang terpisahkan oleh perairan dan tingkat persebaran penduduk yang tidak merata, Kabupaten Kubu Raya cukup berhasil memberikan kesempatan kepada siswa SD/MI untuk memperoleh pendidikan yang layak di tingkat SD/MI.

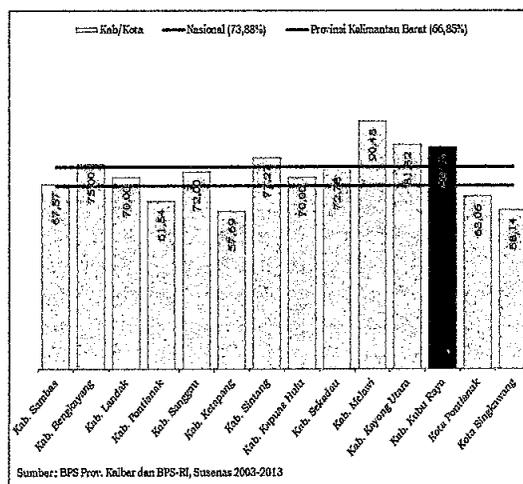
Kubu Raya Tahun 2013 berada pada urutan ke 2 dari 14 kabupaten/kota di Kalbar dengan nilai sebesar 98,90%. Sedangkan capaian indikator APS SD/MI Provinsi sebesar 97,02% dan rata-rata Nasional sebesar 98,42%.



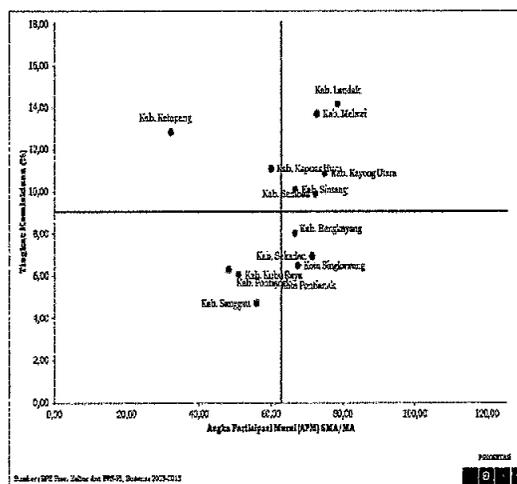
Demikian pula halnya dengan perkembangan antar waktu capaian APS SD/MI secara keseluruhan terjadi kenaikan tiap tahunnya dimana pada tahun 2009 angka capaian APS SD/MI sebesar 95,73% meningkat pada tahun 2010 menjadi sebesar 97,16%, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 1,05% menjadi

sebesar 96,11% dan kemudian naik pada tahun 2012 menjadi sebesar 98,13% dan pada tahun 2013 menjadi sebesar 98,90%. Dilihat dari Prioritas Wilayah Indikator APS SD/MI Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 pada grafik 4.14, berada pada kuadran 4 yaitu zona biru yang berarti indikator ini **tidak bermasalah** dan bukan merupakan prioritas utama dalam intervensi kebijakan di bidang pendidikan. Perkembangan capaian indikator PS SD/MI Kabupaten Kubu Rayadapat dilihat pada grafik 4.13 dan 4.14.

Grafik 4.13
Posisi Relatif dan Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Kabupaten Kubu Raya



Grafik 4.14
Prioritas Intervensi Wilayah Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013



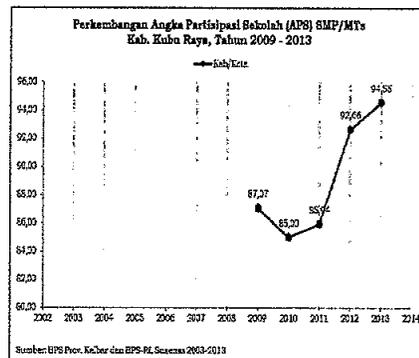
4.1.3.2. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) SMP/MTs

Perkembangan posisi relatif capaian indikator bidang pendidikan dan perkembangan antar waktu APS SMP/MTs di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013 berada pada urutan ke 1 dari 14 kabupaten/kota di Kalbar dengan nilai sebesar 94,55%.

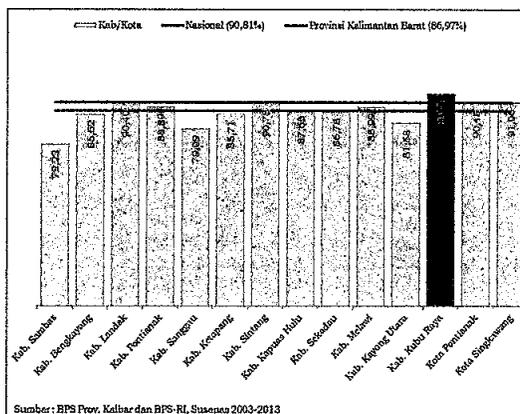
Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian indikator APM SMP/MTs Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 jauh lebih baik dari rata-rata capaian Provinsi (86,97%) dan rata-rata Nasional (90,81%).

Sedangkan grafik perkembangan antar waktu capaian APS SMP/MTs sejak tahun 2011 sampai dengan 2013 menunjukkan kecenderungan meningkat. Setelah mengalami penurunan terhadap APS SMP/MTs di tahun 2010 dengan prosentase capaian sebesar 85,00% dibandingkan tahun 2009 yang sebesar 87,07% di tahun 2011 capaian APS kembali meningkat (naik 0,94%) menjadi sebesar 85,94%. Pada perkembangan berikutnya secara berturut-turut mulai dari tahun 2012 dan 2013 terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap APS dengan prosentase pencapaian sebesar 92,66% dan kembali

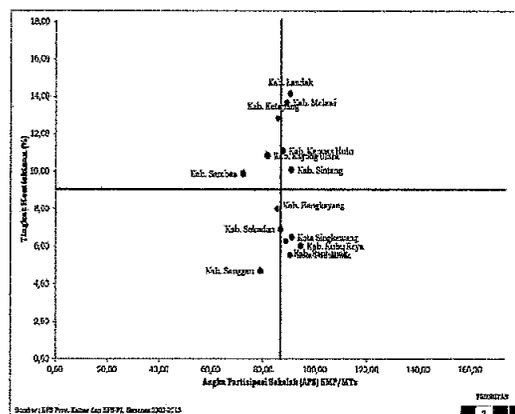
Kondisi APS SMP/MTs di Kabupaten Kubu Raya secara relatif sama dengan perkembangan APS SD/MI. Pada level sekolah lanjutan pertama, 94,55% penduduk usia SMP/MTs, berkesempatan untuk mengenyam pendidikan.



Grafik 4.15
Posisi Relatif dan Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs Tahun 2013



Grafik 4.16
Prioritas Intervensi Wilayah Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013



Dari perspektif penanganan masalah, prioritas intervensi wilayah APS jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Kubu Raya berada pada kuadran 4 (zona biru), yang berarti kondisi secara teknis **tidak bermasalah** dan bukan merupakan prioritas utama dalam intervensi kebijakan di bidang pendidikan. Grafik 4.15 dan 4.16 berikut menggambarkan posisi relatif capaian APS SMP/MTs Kabupaten Kubu Raya.

4.1.3.3. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) SMA/MA

Posisi relatif capaian indikator bidang pendidikan, perkembangan antar waktu, dan prioritas

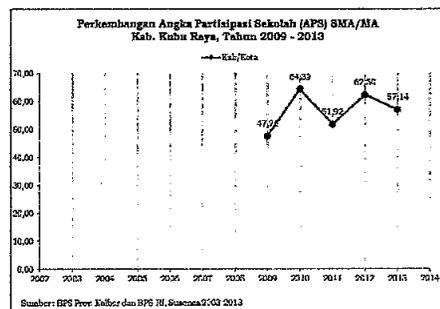


intervensi wilayah dapat dilihat pada grafik pada grafik 4.17 dan 4.18. Perkembangan posisi relatif capaian APS SMA/MA Kabupaten Kubu Raya tahun 2013 berada pada urutan ke 10 dari 14 kabupaten/kota di Kalbar dengan nilai sebesar 57,14%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian indikator APS SMA/MA Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berada dibawah rata-rata capaian Provinsi sebesar 60,06% dan lebih buruk dari rata-rata Nasional yang sebesar 63,84%.

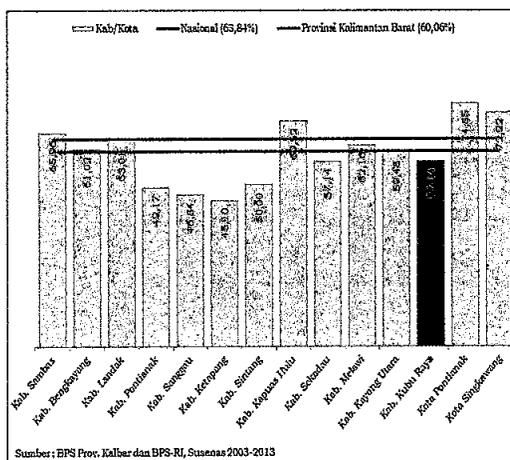
Rata-rata pencapaian APS SMA/MI di Kabupaten Kubu Raya berkisar selama 5 tahun (2009-2013) sebesar 56,72%, dengan rata-rata kemampuan memberikan kesempatan untuk bersekolah di jenjang pendidikan yang sama sebesar 2,34%. Strategi alternatif yang tepat dapat membantu siswa usia SMA/MI untuk menghadapi kemungkinan jebakan kemiskinan sebagai akibat rendahnya posisi tawar dalam memasuki pasar kerja.

Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah SMA/MI mengindikasikan bahwa pada tahun 2013 ada hampir sekitar setengah siswa usia SMA/MI (42,86% siswa) yang sedang tidak bersekolah atau tidak berkesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMU/MI. Kondisi tersebut, jika dikaitkan dengan pendekatan kemiskinan yang menjadi bahasan dalam dokumen ini, memiliki relevansi yang kuat dengan kemungkinan terjadinya proses pemiskinan sebagai akibat ketidakberdayaan untuk mengakses kesempatan kerja

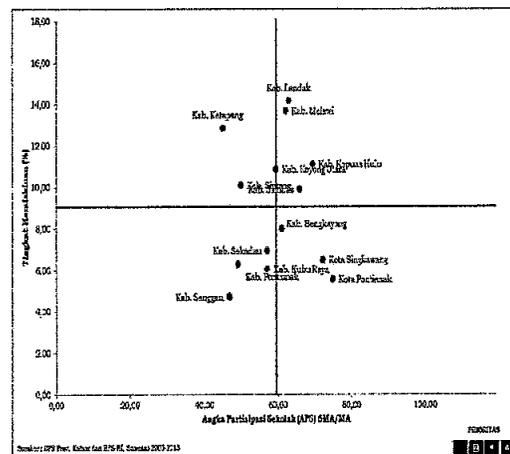
yang lebih baik. Dalam menyikapi hal ini, Sehingga Pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya, perlu memikirkan strategi alternatif melalui meningkatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah lainnya, sehingga saat memasuki pasar kerja memiliki keterampilan yang cukup untuk penguatan posisi tawar dalam bekerja.



Grafik 4.17
Posisi Relatif dan Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA Raya Tahun 2013



Grafik 4.18
Prioritas Intervensi Wilayah Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA Tahun 2013



Sedangkan perkembangan antar waktu capaian APS SMA/MA terjadi kenaikan dan penurunan tiap tahunnya dimana pada tahun 2010 capaian indikator APS SMA/MA Kabupaten Kubu Raya sebesar 64,39% mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi sebesar 51,92%, kemudian di



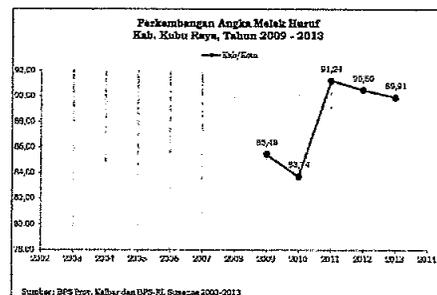
tahun 2012 naik menjadi sebesar 62,50% dan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi sebesar 57,14%. Dilihat dari Prioritas Wilayah Indikator APS SMA/MA Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 pada grafik 4.18, berada pada kuadran 2 yaitu zona kuning yang berarti indikator ini **masih bermasalah** dan menjadi prioritas utama untuk segera dilakukan intervensi kebijakan sehingga capaian indikator tersebut dapat meningkat ditahun berikutnya

4.1.4. ANGKA MELEK HURUF

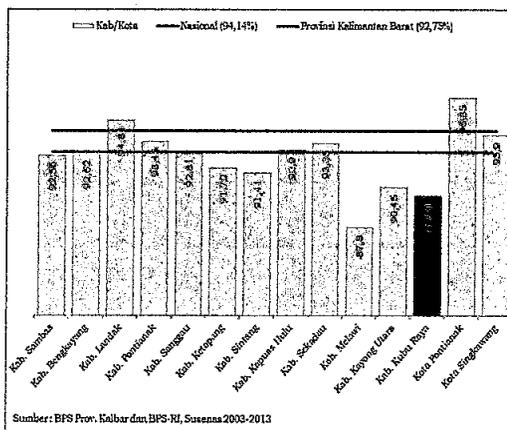
Posisi relatif capaian Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berada pada urutan ke 10 dari 14 kabupaten/kota di Kalbar dengan nilai sebesar 57,14%. Kondisi ini menggambarkan bahwa dalam akses dan pemerataan pendidikan yang ditunjukkan dari capaian indikator Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 masih belum berhasil melapau target yang ditetapkan. Terlihat dari grafik bahwa rata-rata capaian Provinsi sebesar 92,75% dan rata-rata Nasional sebesar 94,14%, lebih tinggi dari posisi relatif yang berhasil di capai oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Sedangkan perkembangan antar waktu capaian Angka Melek Huruf terjadi kenaikan dan penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2010 capaian indikator Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Kubu Raya sebesar 83,74% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 1,74% dan terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebesar 7,5 % pada tahun 2011 menjadi sebesar 91,24%, kemudian di tahun 2012 mengalami penurunan menjadi sebesar 90,50% dan pada tahun 2013 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 89,91%. Dilihat dari Prioritas Wilayah Indikator Angka Melek Huruf

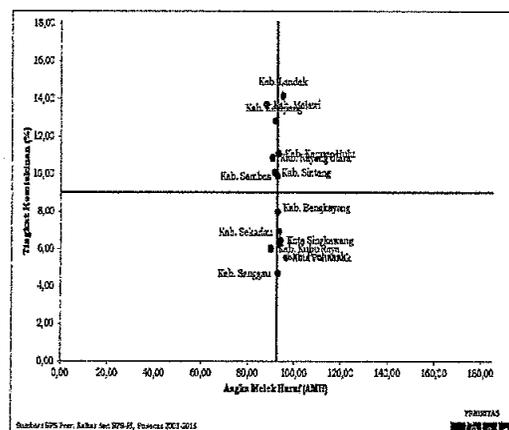
Perkembangan indikator AMH di Kabupaten Kubu Raya cukup mengkhawatirkan. Selama tahun 2011-2013 terjadi pertambahan penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat menamatkan pendidikannya di jenjang pendidikan dasar. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu memberikan penguatan terhadap upaya pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan/terisolir, yang diperkirakan menjadi konsentrasi penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD



Gambar 4.19
Posisi Relatif dan Perkembangan Antar Waktu Angka Melek Huruf Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013



Grafik 4.20
Prioritas Intervensi Wilayah Angka Melek Huruf Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013



(AMH) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 pada grafik 4.20, berada pada kuadran 2 yaitu zona kuning yang berarti indikator ini **masih bermasalah** dan menjadi prioritas utama untuk segera dilakukan intervensi kebijakan sehingga capaian indikator tersebut dapat meningkat ditahun berikutnya. Capaian indikator bidang pendidikan, perkembangan antar waktu, dan prioritas intervensi wilayah dapat dilihat pada grafik 4.19 dan 4.20.

Berdasarkan hasil analisis bidang pendidikan, maka indikator yang masih bermasalah dan menjadi prioritas utama didalam intervensi kebijakan yaitu :

1. Angka Partisipasi Kasar SMA/MA
2. Angka Partisipasi Murni SMA/MA
3. Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA
4. Angka Melek Huruf (AMH)

4.2. Bidang Kesehatan

Pendekatan kemiskinan dari sudut pandang kesehatan diawali dengan seberapa baik asupan gizi dari Ibu mulai mengandung, bayi dalam kandungan, setelah lahir sampai dengan 1 (satu) tahun dan sampai anak berumur 5 tahun serta dalam perkembangannya. Selain dari aspek fase tumbuh kembang anak, perilaku hidup sehat serta ketersediaan aksesibilitas dan tenaga medik juga akan mempengaruhi upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah . Dalam kaitannya hal tersebut, Indikator-indikator kesehatan yang diperkirakan mempunyai pengaruh secara langsung dengan peningkatan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat dari perspektif kemiskinan, meliputi (1) Angka Kematian Bayi per 1000 KH, (2) Angka Kematian Balita per 1000 KH, (3) Angka Kematian Ibu per 100.000KH, (4) Prevalensi Balita Gizi Buruk (%), (5) Prevalensi Balita Gizi Kurang (%) (6) Persalinan Kesehatan Tenaga Kesehatan Terlatih (%), (7) Universal Child Immunization (UCI) dan (7) Penduduk dengan keluhan kesehatan (%). Secara umum capaian indikator-indikator Bidang Kesehatan yang mempengaruhi angka kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Perbandingan Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Kubu Raya,
Propinsi Kalimantan Barat dan Nasional

Uraian	Capaian Daerah 2013	Capaian Prov 2012	Capaian Nas 2012
Angka Kematian Bayi /1.000 Kelahiran Hidup	3,11	31	32
Angka Kematian Balita /1.000 Kelahiran Hidup	3,46	37	40
Angka Kematian Ibu /100.000 Kelahiran Hidup	44,42	-	-
Prevelansi Balita Gizi Buruk (%)	0,16	-	-
Prevelansi Balita Gizi Kurang (%)	1,07	19,7	13,0
Persalinan Tenaga Kesehatan Terlatih (%)	83,12	86,46	90,88
Universal Child Immunization (UCI) (%)	37,07	70,3	79,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 (Data Olahan)

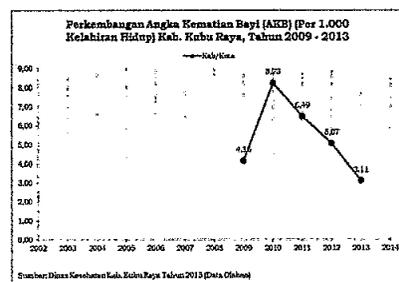


4.2.1. ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP

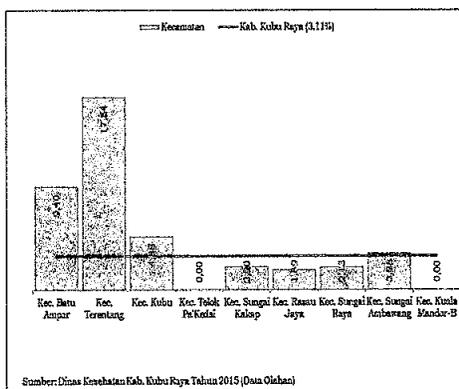
Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000KH dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pada umumnya. Posisi relatif capaian indikator bidang kesehatan, perkembangan antar waktu, dan prioritas intervensi wilayah dapat dilihat pada grafik 4.21 dan 4.22.

Secara kumulatif posisi relatif capaian Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000KH Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sebesar 3,11 %. Capaian posisi relatif capaian Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000KH per kecamatan di Kabupaten Kubu Raya memperlihatkan masih terdapat beberapa kecamatan yang Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000KH masih cukup memprihatinkan. Beberapa kecamatan dengan

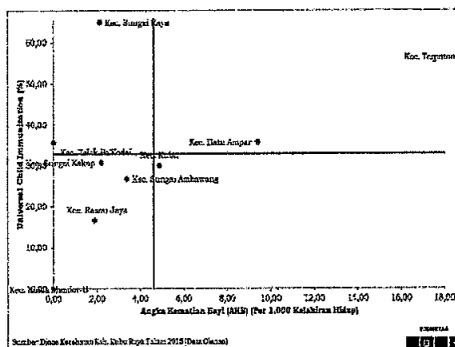
Ada banyak faktor yang diduga menjadi penyebab tingginya Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kubu Raya. Ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas, kecepatan dalam memberikan pelayanan medik serta norma atau cara pandang masyarakat untuk merubah dari metode tradisional ke teknik kesehatan modern, masih menjadi faktor penyebab terjadinya AKB.



Grafik 4.21
Posisi Relatif dan Perkembangan Antar Waktu
Angka Kematian Bayi Per 1.000 Tahun 2013



Grafik 4.22
Prioritas Intervensi Wilayah Angka Kematian Bayi
Per 1000 KH Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013



kondisi masih relatif besarnya angka kematian bayi dibandingkan dengan rata-rata kabupaten meliputi kecamatan Terentang dengan AKB per 1000KH sebesar 17,54%, kemudian kecamatan Batu Ampar(9,40%) dan kecamatan Kubu sebesar (4,88%), mengindikasikan berbagai faktor pelayanan neonatal masih memerlukan perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah.

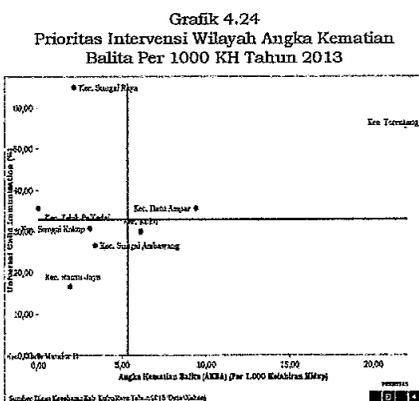
Kondisi perkembangan antar waktu capaian Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000KH secara keseluruhan menunjukkan perbaikan setiap tahun, kendatipun sempat terjadi peningkatan atas AKB per1000KH di tahun 2010. terjadi peningkatan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya sebesar 4,07% menjadi 8,23%. Pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi sebesar 6,49% dan terus menurun hingga tahun 2013 menjadi sebesar 3,11. Dilihat dari Prioritas Wilayah Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000KH Kabupaten Kubu



Raya Tahun 2013 berada pada kuadran 2 yaitu zona kuning yang berarti indikator ini **masih bermasalah** dan menjadi prioritas utama untuk segera dilakukan intervensi kebijakan sehingga capaian indikator tersebut dapat meningkat ditahun berikutnya. Kecamatan yang perlu segera dilakukan intervensi kebijakan pada grafik 4.22, yaitu kecamatan Kubu (Prioritas 1), kecamatan Batu Ampar dan Terentang (Prioritas 2). Dimana untuk mengurangi angka kematian bayi dapat dilakukan intervensi terhadap peningkatan dan pemerataan jumlah tenaga kesehatan terlatih.

4.2.2. ANGKA KEMATIAN BALITA (AKABA) PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP

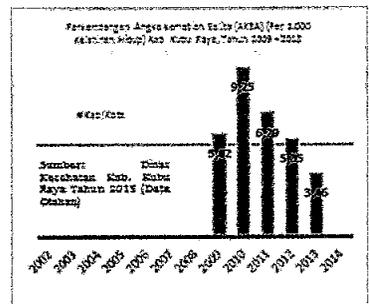
Angka Kematian Balita atau disingkat AKABA dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kematian Balita dengan jumlah kelahiran hidup, dan dinyatakan dalam satuan per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2013 AKABA per 1000KH mencapai angka 3,46% lebih baik dari capaian tahun 2012 dengan capaian sebesar 5,35%. Kondisi terparah dalam hal AKABA per 1000KH terjadi pada tahun 2010 dengan prosentase AKABA per 1000KH mencapai 9,40% dan pada tahun 2011–2013 terus mengalami kecenderungan menurun.



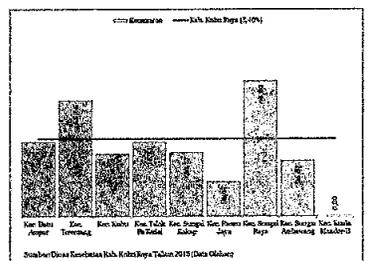
Kendatipun rata-rata posisi relatif dan perkembangan antar waktu Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000KH Kabupaten Kubu Raya Tahun sudah menunjukkan kinerja yang diharapkan, namun masih terdapat kecamatan-kecamatan yang perlu mendapatkan prioritas dalam penanganan AKABA. Posisi relatif capaian Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000KH per kecamatan yang menunjukkan perkembangan cukup tinggi AKABA per per 1000KH di Kabupaten Kubu Raya

yaitu kecamatan Terentang sebesar 21,93%, kecamatan Batu Ampar sebesar 35,71% dan kecamatan Kubu sebesar 6,10% dan masih diatas rata-rata kabupaten. Sehingga perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk mengupayakan pencapaian capaian target tersebut, diantaranya dengan memperluas cakupan pelayanan kunjungan neonatal, imunisasi, pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. Pelayanan tersebut agar dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk yang berada di kantong-kantong kemiskinan. Hal penting lainnya adalah upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan ibu dan anak.

Pada grafik 4.23 dan 4.24 di atas dapat dijelaskan bahwa posisi relatif capaian Dilihat dari Prioritas Wilayah Indikator



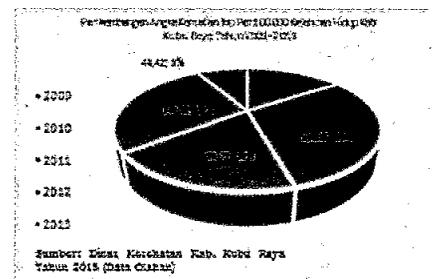
Grafik 4.23
Posisi Relatif dan Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup



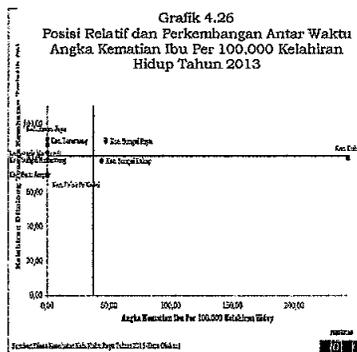
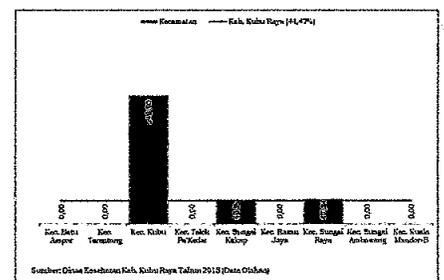
Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000KH Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berada pada kuadran 2 yaitu zona kuning yang berarti indikator ini **masih bermasalah** dan menjadi prioritas utama untuk segera dilakukan intervensi kebijakan sehingga capaian indikator tersebut dapat meningkat ditahun berikutnya. Kecamatan yang perlu segera dilakukan intervensi kebijakan pada grafik 4.24, yaitu kecamatan Kubu (Prioritas 1), kecamatan Batu Ampar dan Terentang (Prioritas 2). Dimana untuk mengurangi angka kematian balita dapat dilakukan intervensi terhadap peningkatan jumlah balita yang telah dilakukan UCI.

4.2.3. ANGKA KEMATIAN IBU PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP

Angka Kematian Ibu atau disingkat AKI, adalah perbandingan jumlah kematian ibu dengan jumlah kelahiran hidup, dan dinyatakan dengan angka per 100.000 kelahiran hidup. Posisi relatif capaian indikator bidang kesehatan, perkembangan antar waktu, dan prioritas intervensi wilayah dapat dilihat pada grafik berikut. Pada grafik 4.25 dan 4.26 di atas dapat dijelaskan bahwa posisi relatif capaian Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000KH Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 sebesar 44,42%. Sedangkan posisi relatif capaian Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000KH per kecamatan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kecamatan yang lebih tinggi AKI dari rata-rata capaian kabupaten yaitu kecamatan Kubu sebesar 243,90% dan kecamatan Sungai Raya sebesar 47,34%. Kondisi perkembangan antar waktu capaian Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000KH secara keseluruhan terjadi kenaikan dan penurunan tiap tahunnya pada tahun 2009 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000KH Kabupaten Kubu Raya adalah sebesar 83,19% meningkat signifikan sebesar 79,46% pada tahun 2010 menjadi sebesar 162,65% dan mengalami penurunan kembali di tahun 2011 sebesar 62,86% menjadi sebesar 99,79%.



Grafik 4.25
Posisi Relatif dan Perkembangan Antar Waktu
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran
Hidup Tahun 2013



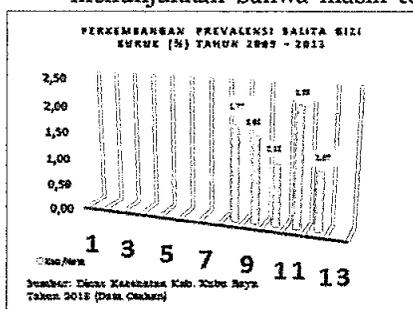
Pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 47,83% dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 147,62 dan pada tahun 2013 terjadi penurunan yang sangat signifikan sebesar 103,2% sehingga Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000KH Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 menjadi sebesar 44.42%. Dilihat dari Prioritas Wilayah Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) per 1000KH Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berada pada kuadran 2 yaitu zona kuning yang berarti indikator ini **masih bermasalah** dan menjadi prioritas utama untuk segera dilakukan intervensi kebijakan sehingga capaian indikator tersebut dapat meningkat ditahun berikutnya.



Kecamatan yang perlu segera dilakukan intervensi kebijakan pada grafik 4.26, yaitu kecamatan Kubu dan Sungai Kakap (Prioritas 1), serta Kecamatan Sungai Raya (Prioritas 2). Penyebab utama masih tingginya AKI antara lain belum optimalnya cakupan pelayanan antenatal (K4) dan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. Untuk mengurangi angka kematian ibu (AKI) dapat dilakukan usaha peningkatan dan pemerataan jumlah tenaga kesehatan terlatih, dan yang aling utama adalah meningkatkan kesadaran Bumil untuk senantiasa meningkatkan frekwensi kunjungan ke tenaga kesehatan terlatih menjelang masa melahirkan.

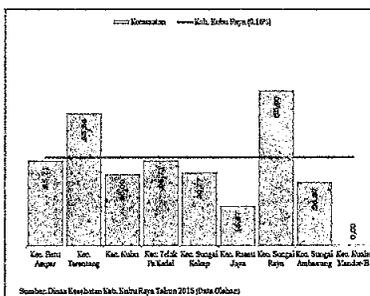
4.2.4. PREVELANSI BALITA GIZI BURUK (%)

Pada grafik 4.27 dan 4.28 di atas dapat dijelaskan bahwa posisi relatif capaian Indikator Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 adalah sebesar 0,16%. Sedangkan posisi relatif capaian Indikator Prevalensi Balita Gizi Buruk per kecamatan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kecamatan yang Prevalensi Balita Gizi Buruk

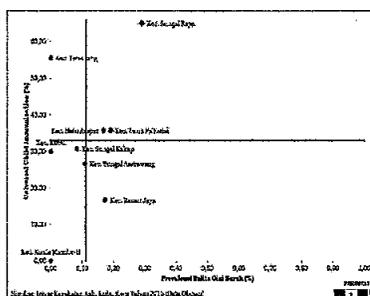


ai kabupaten yaitu kecamatan Sungai Raya sebesar 0,29%, ar 0,19%, kecamatan Rasau Jaya sebesar 0,17% dan kecamatan kondisi perkembangan antar waktu capaian indikator Prevalensi ruhan bergerak menurun tiap tahun. Pada tahun 2009 capaian alah sebesar 0,62% menurun pada tahun 2010 menjadi sebesar terus menurun menjadi sebesar 0,08%. Tetapi pada tahun ur 0,08% menjadi sebesar 0,16%.

Grafik 4.27
Posisi Relatif dan Perkembangan Antar Waktu Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013



Grafik 4.28
Prioritas Intervensi Wilayah Prevalensi Balita Gizi Buruk Kab. Kubu Raya Tahun 2013



Dilihat dari Prioritas Wilayah capaian Indikator Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berada pada kuadran 2 yaitu zona kuning yang berarti indikator ini **masih bermasalah** dan menjadi prioritas utama untuk segera dilakukan intervensi

kebijakan sehingga capaian indikator tersebut dapat meningkat ditahun berikutnya. Kecamatan yang perlu segera dilakukan intervensi kebijakan pada grafik 4.28, yaitu kecamatan Rasau Jaya (Prioritas 1), kecamatan Batu Ampar, Teluk Pakedai dan Sungai Raya (Prioritas 2). Dimana untuk mengurangi Prevalensi Balita Gizi Buruk dapat dilakukan intervensi terhadap peningkatan jumlah balita yang telah dilakukan UCI.

4.2.5. Prevelansi Balita Gizi Kurang (%)

Posisi relatif capaian Indikator Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 adalah sebesar 1,07%. Sedangkan posisi relatif capaian Indikator Prevalensi Balita Gizi Kurang

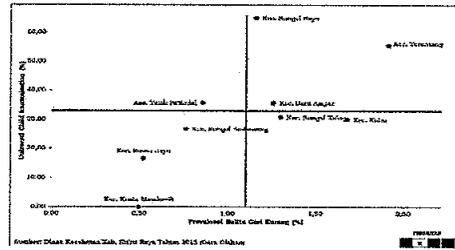


Handwritten marks: 'R' and 'P'.

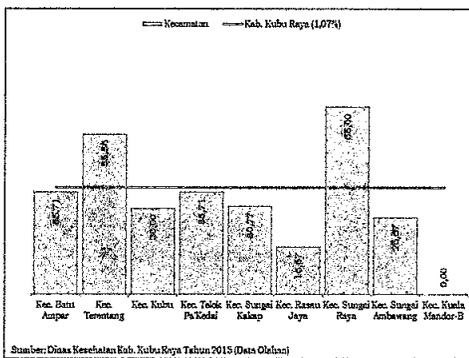
per kecamatan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kecamatan yang Prevalensi Balita Gizi Kurang lebih tinggi dari rata-rata capaian kabupaten yaitu kecamatan Terentang sebesar 1,91%, kecamatan Kubu sebesar 1,68%, kecamatan Sungai Kakap sebesar 1,30%, kecamatan Batu Ampar sebesar 1,26% dan kecamatan Sungai Raya sebesar 1,16%.

Kondisi perkembangan antar waktu capaian indikator Prevalensi Balita Gizi Kurang secara keseluruhan bergerak menurun pada tahun 2009 capaian Prevalensi Balita Gizi Buruk adalah sebesar 1,77% menurun pada tahun 2010 menjadi sebesar 1,61% hingga tahun 2011 menjadi sebesar 1,12%. Tetapi pada tahun 2012 terjadi peningkatan 1,07% menjadi sebesar 2,19% dan kembali turun pada tahun 2013 menjadi sebesar 1,07%. Dilihat dari Prioritas Wilayah capaian Indikator Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berada pada kuadran 2 yaitu zona kuning yang berarti indikator ini **masih bermasalah** dan menjadi prioritas utama untuk segera dilakukan intervensi kebijakan sehingga capaian indikator tersebut dapat meningkat ditahun berikutnya.

Grafik 4.30
Prioritas Intervensi Wilayah Balita Gizi Kurang Tahun 2013

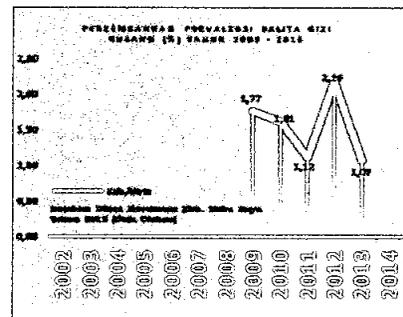


Grafik 4.29
Posisi Relatif dan Perkembangan Antar Waktu Prevelansi Balita Gizi Kurang



jumlah balita yang telah dilakukan UCI. Posisi relatif capaian indikator bidang kesehatan, perkembangan antar waktu, dan prioritas intervensi wilayah dapat dilihat pada grafik sebagai berikut

Kecamatan yang perlu segera dilakukan intervensi kebijakan pada grafik 4-30, yaitu kecamatan Kubu dan Sungai Kakap (Prioritas 1), serta kecamatan Batu Ampar, Terentang dan Sungai Raya (Prioritas 2). Dimana untuk mengurangi Prevalensi Balita Gizi Kurang dapat dilakukan intervensi terhadap peningkatan

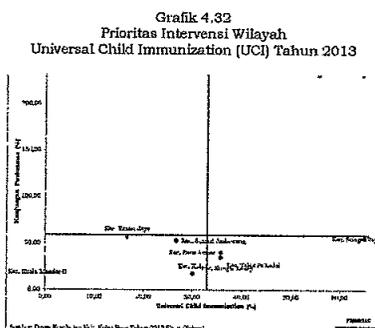
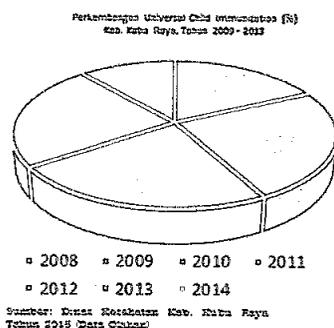


4.2.6. Universal Child Immunization (UCI)

Upaya penurunan AKB memiliki kaitan erat dengan luasnya cakupan imunisasi dan cakupan kunjungan neonatal pertama (KN₁). Cakupan imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Kubu Raya terus mengalami peningkatan. Posisi relatif capaian indikator bidang kesehatan, perkembangan antar waktu, dan prioritas intervensi wilayah dapat dilihat pada grafik sebagai grafik 4.31 dan 4.32 berikut.



Posisi relatif capaian Indikator Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 adalah sebesar 37,07%. Sedangkan posisi relatif capaian Indikator Universal Child Immunization (UCI) per kecamatan menunjukkan bahwa hampir rata-rata kecamatan masih dibawah capaian kabupaten, dan hanya terdapat 2 (dua) kecamatan yang capaian UCI diatas rata-rata kabupaten yaitu kecamatan Sungai Raya sebesar 65,00% dan kecamatan Terentang sebesar 55,56%. Kondisi perkembangan antar waktu capaian indikator Universal



Child Immunization (UCI) secara rata-rata mengalami penurunan yaitu pada tahun 2010 capaian Universal Child Immunization (UCI) adalah sebesar 79,25% mengalami penurunan menjadi sebesar 75,45% dan terus menurun hingga pada tahun 2013 menjadi sebesar 37,07%. Dilihat

Grafik 4.31
Posisi Relatif dan Perkembangan Antar Waktu Universal Child Immunization



dari Prioritas Wilayah capaian Indikator Child Immunization (UCI) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berada pada kuadran 4 yaitu zona biru yang berarti indikator ini sudah **tidak bermasalah** dan bukan merupakan prioritas utama didalam intervensi kebijakan. Tetapi walaupun demikian masih perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan kunjungan puskesmas di beberapa kecamatan yang masih berada dibawah rata-rata capaian kabupaten sehingga jumlah desa yang mendapatkan Indikator Child Immunization (UCI) semakin meningkat.

Berdasarkan hasil analisis bidang kesehatan, maka indikator yang masih bermasalah dan menjadi prioritas utama didalam intervensi kebijakan yaitu :

1. Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup
2. Angka Kematian Balita (Akaba) Per 1.000 Kelahiran Hidup
3. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
4. Prevelansi Balita Gizi Buruk (%)
5. Prevelansi Balita Gizi Kurang (%)

4.3 Bidang Infrastruktur Dasar

Infrastruktur dasar dalam pendekatan kemiskinan difokuskan pada terjaminnya ketersediaan infrastruktur dasar penduduk dalam memenuhi kebutuhan fisik dasar. Secara diskriptif, kebutuhan fisik dasar utama penduduk yang dijadikan sebagai indikator masuk tidaknya terminologi miskin adalah rumah tangga dengan sanitasi layak, indikator rumah tangga dengan air minum layak dan indikator rumah tangga dengan akses listrik, yang semuanya diukur dalam prosentase dalam pemenuhannya. Dari data tahun 2013, capaian indikator-indikator kemiskinan



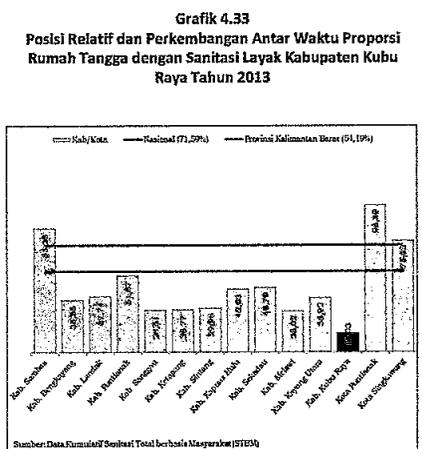
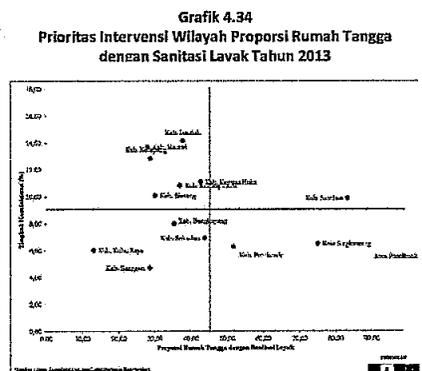
infrastruktur di Kabupaten Kubu Raya, cenderung masih bermasalah, sehingga masih menjadi prioritas utama yang perlu mendapatkan perhatian. Tabulasi capaian indikator-indikator Bidang Infrastruktur Dasar yang mempengaruhi angka kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013, dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 4.3
Perbandingan Capaian Indikator Infrastruktur Dasar Perumahan
Kab. Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2013

Indikator	Capaian Daerah 2013	Capaian Prov. 2013	Capain Nas. 2013
Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)	13,03	45,80	60,91
Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)	59,07	53,95	67,70
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)	99,65	-	-

4.3.1. Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak

Posisi relatif capaian indikator Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berada pada urutan ke 14 terendah dari 14 kabupaten/kota di Kalbar dengan nilai sebesar 13,03%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian indikator Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berada dibawah rata-rata capaian Provinsi sebesar 54,19% dan rata-rata Nasional yang sebesar 71,59%. Dilihat dari Prioritas Wilayah capaian indikator Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 pada grafik 4.34, berada pada kuadran 2 yaitu zona kuning yang berarti indikator ini **masih bermasalah** dan merupakan prioritas utama untuk dilakukan intervensi kebijakan. Kondisi relatif capaian indikator bidang infrastruktur dasar, perkembangan antar waktu, dan prioritas intervensi wilayah dapat dilihat pada grafik grafik 4.33 dan 4.34 sebagai berikut.



Rendahnya tingkat sanitasi penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya Terkait dengan perilaku penduduk miskin yang menjadikan sungai sebagai sarana sanitasi masyarakat. Beberapa program dalam memenuhi kebutuhan sanitasi masyarakat baik yang didanai oleh pemerintah pusat maupun daerah, belum mampu sepenuhnya menjangkau pendudu miskin yang cenderung berdomisili secara parsial. Kondisi geografis yang terpisah oleh wilayah perairan ikut menjadi penyebab tingkat efektivitas



Handwritten mark

capaian indikator Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 pada grafik 4., berada pada kuadran 4 yaitu zona biru yang berarti indikator ini tidak bermasalah dan bukan merupakan prioritas utama untuk dilakukan intervensi kebijakan.

Tabel 4.4
Target MGDs terhadap Sektor Air Minum

Paremeter	2000	2015	GAP
Cakupan Pelayanan	39 %	69 %	30 %
Penduduk Terlayani	33 Juta	90 Juta	57 Juta
Jumlah Sambungan	5,2 Juta	15 Juta	9,8 Juta
Kapasitas Produksi	94 m3/det	155 m3/det	61 m3/det
Investasi	Rp.600 M/thn	Rp.23 T	Rp 17 T

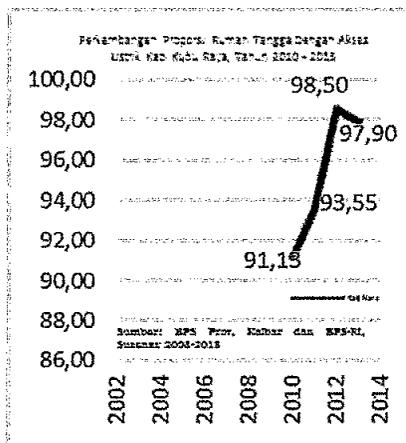
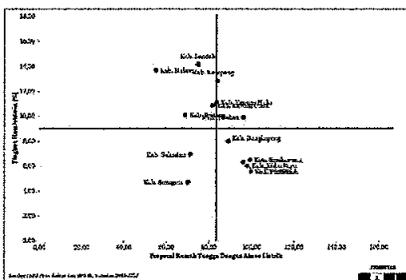
Sumber : Nasional Action Plan Water Supply Sub-Sector,2003, Bappenas

4.3.3. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik

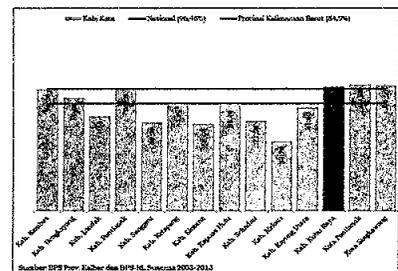
Upaya dalam pemenuhan kebutuhan listrik di Kabupaten Kubu Raya selama ini masih mengandalkan supplay listrik yang dipasok dari PLN. Kendatipun, semua ibukota kecamatan telah mendapatkan pelayanan listrik (pembangkit listrik tenaga diesel) akan tetapi belum seluruh desa di Kabupaten Kubu Raya dapat dijangkau oleh pelayanan listrik. Permasalahan utama pelayanan listrik lebih disebabkan oleh efisiensi, dimana jauhnya jangkauan pelayanan

berpengaruh kepada operasional dan berdampak pada cost - revenue yang akan diperoleh. Posisi relatif capaian indikator bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan, perkembangan antar waktu, dan prioritas intervensi wilayah dapat dilihat pada grafik sebagai berikut. Pada grafik 4. dan 4. Terlihat bahwa posisi relatif capaian indicator Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berada pada urutan ke 3 tertinggi dari 14 kabupaten/kota di Kalbar dengan nilai sebesar 97,90%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian indikator Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berada diatas rata-rata capaian Provinsi sebesar 84,90% dan lebih baik dari rata-rata Nasional yang sebesar 96,46%.

Grafik 4.38
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik Tahun 2013



Gambar 4.37
Posisi Relatif dan Perkembangan Antar Waktu Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik Tahun 2013



Sedangkan perkembangan antar waktu capaian indicator Proporsi Rumah Tangga Dengan



Akses Listrik bergerak naik tiap tahunnya dimana pada tahun 2010 angka capaian indikator Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik Kabupaten Kubu Raya sebesar 91,13% naik di tahun 2011 menjadi sebesar 93,35%. Terus meningkat pada tahun 2012 menjadi sebesar 98,50% dan pada tahun 2013 terjadi penurunan yang tidak terlalu signifikan sebesar 0,6% menjadi sebesar 97,90%. Dilihat dari Prioritas Wilayah capaian indikator Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 pada grafik 4., berada pada kuadran 4 yaitu zona biru yang berarti indikator ini tidak bermasalah dan bukan merupakan prioritas utama untuk dilakukan intervensi kebijakan.

Berdasarkan hasil analisis bidang Bidang Infrastruktur Dasar, maka indikator yang masih bermasalah dan menjadi prioritas utama didalam intervensi kebijakan adalah Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak.

4.4. Bidang Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan

Analisis bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan yang merupakan indikator daerah, juga sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan. Indikator-indikator tersebut adalah indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%), indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%), dan Indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%). Capaian indikator-indikator tersebut di Kabupaten Kubu Raya tahun 2013, sebagaimana besar masih bermasalah, sehingga masih menjadi prioritas utama dalam penanggulangan kemiskinan. Berikut Capaian indikator-indikator Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan yang mempengaruhi angka kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 :

Pada tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa determinan kemiskinan sangat berkaitan terhadap ketiga indikator ketenagakerjaan dan kewirausahaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 tersebut yang mana sebagaimana besar indikator tersebut masih berada dibawah capaian provinsi dan nasional. Pada indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang sebesar 64,19% lebih rendah capaiannya dibandingkan dengan capaian provinsi sebesar 69,75% dan capaian nasional 66,77%. Selanjutnya pada indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Kubu Raya angka capaian daerahnya juga lebih rendah dari provinsi dan nasional, dimana capaian daerah sebesar 90,74% lebih rendah dibandingkan dengan provinsi 95,97% dan capaian nasional sebesar 93,75%. Yang harus menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Kubu Raya yaitu adalah pada capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang capaian daerahnya masih lebih tinggi sebesar 9,26% dibanding dengan capaian provinsi sebesar 4,03% dan capaian nasional sebesar 6,17%.



R

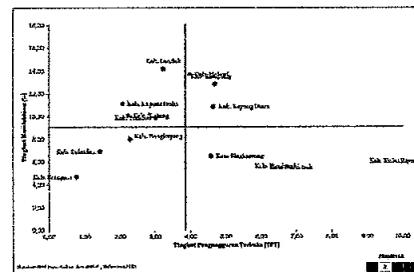
Tabel 4.5
Perbandingan Capaian Indikator Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2013

No	Uraian	Capaian Daerah 2013	Capaian Prov. 2013	Capaian Nas. 2013
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9,26	4,03	6,17
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	64,19	69,75	66,77
3	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	90,74	95,97	93,75

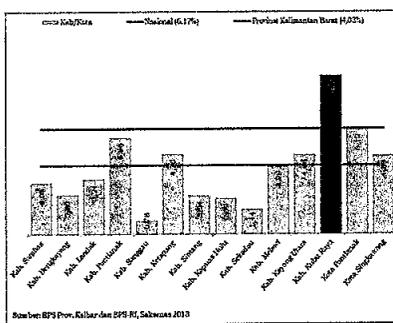
4.4.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt)

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja. Manfaat analisis terhadap indikator ini adalah untuk melihat keterjangkauan pekerjaan. Permasalahan pengangguran di Kabupaten Kubu Raya mulai mencuat sejak berakhirnya era booming kayu dan terjadinya krisis multi dimensi yang mendera sektor industri. Sebagai daerah yang mengandalkan sektor sekunder beserta turunannya, kontraksi pada sektor ekonomi berdampak langsung terhadap peluang dan kesempatan kerja, dan pada akhirnya menciptakan pemutusan hubungan kerja. Posisi relatif capaian indikator bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan, perkembangan antar waktu, dan prioritas intervensi wilayah dapat dilihat pada grafik 4. dan 4. berikut.

Grafik 4.40
Prioritas Intervensi Wilayah
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Tahun 2013



Grafik 4.39
Posisi Relatif dan Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2013



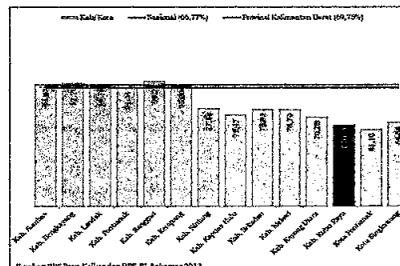
Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berada diatas rata-rata capaian Provinsi sebesar 4,03% dan lebih buruk dari rata-rata Nasional yang sebesar 6,17%, yang menjadikan Kabupaten Kubu Raya berada pada urutan ke 14 tertinggi dari 14 kabupaten/kota di Kalbar. Sementara itu perkembangan antar waktu capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terjadi kenaikan dan penurunan tiap tahunnya dimana pada tahun 2010 angka capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kubu Raya sebesar 6,20% menurun di tahun 2011



menjadi 4,52%. Tetapi pada tahun 2012 terjadi peningkatan yang signifikan sampai pada tahun 2013 dimana peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2013 yang meningkat sebesar 3,20% sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013 menjadi sebesar 9,26%.

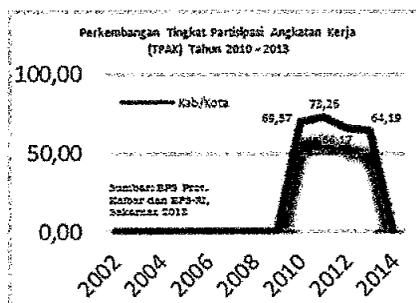
Dilihat dari Prioritas Wilayah capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 pada grafik 4., berada pada kuadran 2 yaitu zona kuning yang berarti indikator ini **masih bermasalah** dan menjadi prioritas utama untuk segera dilakukan intervensi kebijakan sehingga capaian indikator tersebut dapat meningkat ditahun berikutnya.

Gambar 4.41
Posisi Relatif dan Perkembangan Antar Waktu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2013



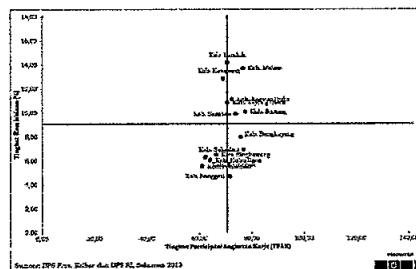
4.4.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Posisi relatif/Perbandingan antar wilayah di Kabupaten Kubu Raya yang merupakan indikator daerah dapat menggambarkan bagaimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kubu Raya. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja merupakan perbandingan antara Angkatan Kerja (bekerja + pengangguran) dengan jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas x 100.



Posisi relatif capaian indikator bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan, perkembangan antar waktu, dan prioritas intervensi wilayah pada dasarnya menggambarkan besarnya kesempatan penduduk untuk mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang ditawarkan. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang terlibat atau yang berusaha terlibat dalam kegiatan yang produktif dalam kurun waktu tertentu.

Grafik 4.42
Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2013



Pada grafik 4. dan 4. di atas dapat dijelaskan bahwa posisi relatif capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berada pada urutan ke 12 dari 14 kabupaten/kota di Kalbar dengan nilai sebesar 64,19%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berada dibawah rata-rata capaian Provinsi sebesar 69,75% dan lebih buruk dari rata-rata Nasional yang sebesar 66,77%. Sedangkan perkembangan antar waktu capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) bergerak cenderung menurun tiap tahunnya. Pada tahun 2010 capaian indikator

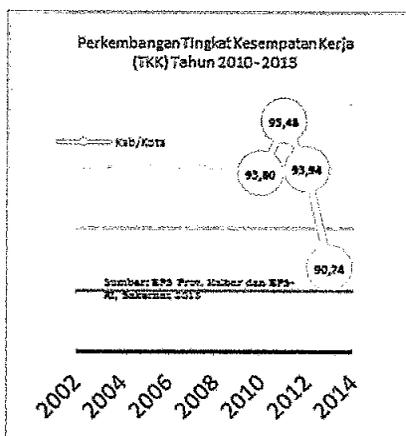
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,57% dan meningkat pada tahun 2011 sebesar 3,69% menjadi sebesar 73,26. Pada tahun 2012 terjadi penurunan drastis sebesar 7,09% menjadi sebesar 66,17% dan hingga akhir tahun 2013 menjadi sebesar 64,19%. Dilihat dari Prioritas Wilayah capaian indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 pada grafik 4., berada pada kuadran 2 yaitu zona kuning yang berarti indikator ini **masih bermasalah** dan menjadi prioritas utama untuk segera dilakukan intervensi kebijakan sehingga capaian indikator tersebut dapat meningkat ditahun berikutnya.

4.4.3. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

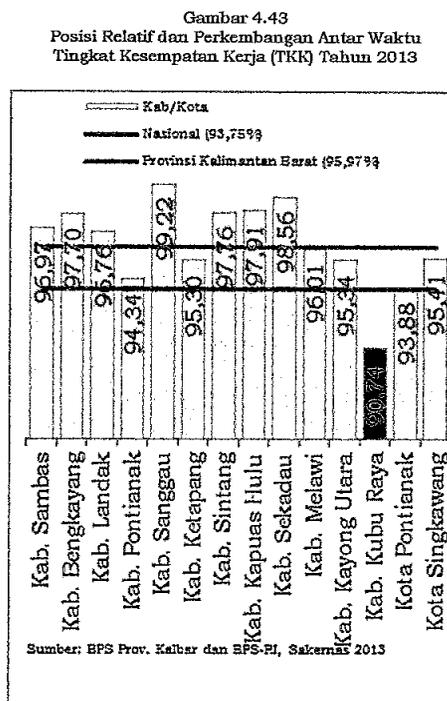
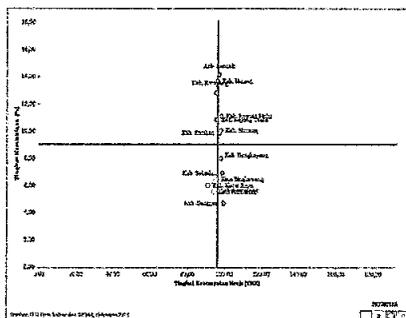
Posisi relatif/Perbandingan antar wilayah di Kabupaten Kubu Raya yang merupakan indikator daerah dapat menggambarkan peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. TKK menggambarkan seberapa besar peluang seseorang yang termasuk angkatan kerja untuk dapat terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja. Semakin besar angka TKK maka semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah. Manfaat

analisis TKK dapat menggambarkan peluang seseorang untuk dapat bekerja dalam suatu wilayah.

Posisi relatif capaian indikator bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan, perkembangan antar waktu, dan prioritas intervensi wilayah dapat dilihat pada grafik sebagai berikut. Posisi relatif capaian indikator



Grafik 4.44 Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Tahun 2013



Kerja (TKK) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berada pada urutan ke 14 terkecil dari 14 kabupaten/kota di Kalbar dengan nilai sebesar 90,74%. Kondisi ini

menunjukkan bahwa capaian indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 berada dibawah rata-rata capaian Provinsi sebesar 95,97% dan lebih buruk dari rata-rata Nasional yang sebesar 93,75%. Sedangkan perkembangan antar waktu capaian Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) bergerak cenderung menurun tiap tahunnya dari tahun 2012 hingga tahun 2013. Pada tahun 2010 capaian indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 93,80% dan meningkat pada tahun 2011 sebesar 1,68% menjadi sebesar 95,48%.



Pada tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 1,54% menjadi sebesar 93,94% dan pada tahun 2013 turun secara signifikan hingga menjadi sebesar 90,74%. Dilihat dari Prioritas Wilayah capaian indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 pada grafik 4., berada pada kuadran 2 yaitu zona kuning yang berarti indikator ini **masih bermasalah** dan menjadi prioritas utama untuk segera dilakukan intervensi kebijakan sehingga capaian indikator tersebut dapat meningkat ditahun berikutnya. Berdasarkan hasil analisis Bidang Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan, maka indikator yang masih bermasalah dan menjadi prioritas utama didalam intervensi kebijakan yaitu :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
3. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

4.5. Bidang Ketahanan Pangan

Analisis bidang ketahanan pangan baru dapat dilakukan pada indikator perbandingan harga beras antar wilayah Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan karena keterbatasan data dan informasi serta keterbatasan aplikasi dalam pengolahan datanya. Posisi relatif /Perbandingan antar wilayah dapat menggambarkan kondisi harga beras di Kabupaten Kubu Raya diantara Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat.

4.6. Bidang Ekonomi

Analisis bidang ekonomi difokuskan pada dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi dan deflasi. Kedua indikator ini yang dianggap paling berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

4.6.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari suatu kurun waktu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi mengindikasikan semakin baiknya tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga indikator ini merupakan indikator positif. Analisis terhadap indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya tahun 2013 mencapai 6,79% berada di diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Propinsi sebesar 5,57% dan Nasional sebesar 6,23%. Indikator ini masih bermasalah, sehingga menjadi prioritas untuk segera diperbaiki

4.6.2. Inflasi

Pergerakan inflasi di Kabupaten Kubu Raya masih mengacu kepada laju inflasi di Kota Pontianak. Perkembangan inflasi selama tahun-tahun terakhir kendati masih di bawah 10%, akan tetapi masih relatif diatas rata-rata inflasi Kalimantan Barat. Laju inflasi di Kabupaten Kubu Raya lebih disebabkan oleh inflasi produsen dalam pendistribusian kebutuhan pokok berupa bahan makanan dan transportasi. Kondisi daerah yang sebagian dipisahkan wilayah perairan, menjadikan terjadi kenaikan harga barang produksi sebelum sampai kepada konsumen akhir. Pembangunan infrastruktur penghubung menjadi salah satu upaya untuk



menekan laju inflasi dan meningkatkan arus barang ke pelosok-pelosok wilayah Kabupaten Kubu Raya.



Handwritten signature or initials

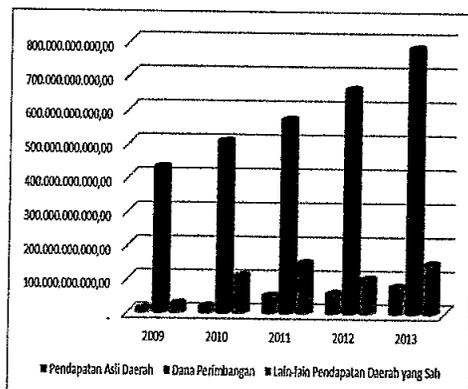
BAB V

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN RELEVANSI APBD

5.1. Evaluasi APBD

5.1.1. Struktur Anggaran Pendapatan

Evaluasi terhadap anggaran dari sudut kepentingan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, digunakan untuk mengukur kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah daerah dalam kerangka mendukung program-program penanggulangan kemiskinan di daerah. Konsekwensi pemberian otonomi daerah secara penuh kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota menjadikan pemerintah daerah ikut berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang diamanatkan oleh pemerintah pusat terkait dengan pendanaan terhadap urusan wajib maupun pilihan. Pemberian kewenangan penuh dalam penentuan dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah tersebut dijabarkan



dalam berbagai program yang selaras dengan pengentasan masalah baik nasional maupun lokal, yang salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan.

Analisa perkembangan Pendapatan dari sudut kepentingan penanggulangan kemiskinan pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mengerjakan sektor riil yang menjadi roda penggerak perekonomian di daerah. Komposisi atas perlehan Pendapatan Asli

Daerah yang salah satu komponennya adalah pajak daerah, menjadi referensi yang sedikit banyaknya menggambarkan iklim investasi. Berkembangnya aktivitas sektor swasta, menjadikan pemerintah daerah mempunyai sumber-sumber pembiayaan yang akan dihimpun menjadi Pendapatan Asli Daerah guna membiayai berbagai program, yang dalam hal ini



adalah penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, analisa terhadap struktur dan komposisi APBD, akan sangat menentukan kemampuan pemerintah dalam memberikan akase ang lebih besar kepada masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar Pendidikan, Kesehatan maupun Infrastruktur dasar.

Secara rinci perbandingan jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain- lain Pendapatan daerah yang sah dapat dilihat pada gambar 5.1.

Secara umum kemampuan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya mengalami perkembangan meningkat. Berdasarkan Tabel 5.1 terlihat bahwa perkembangan Pendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan setiap tahun. Sumber terbesar PAD Kabupaten Kubu Raya berasal dari Pajak Daerah meliputi pajak hotel dan restaurant. Melihat komposisi pergeseran struktur ekonomi, diperkirakan kontribusi PAD yang bersumber dari sektor sekunder dan tersier akan terus mengalami peningkatan. Berkembangnya ke dua sektor tersebut tidak terlepas dari semakin menariknya iklim investasi di Kabupaten Kubu Raya, yang berdampak secara langsung pada berkembangnya kegiatan usaha di masyarakat. Di sisi lain pertambahan Pendapatan melalui dana perimbangan juga mengalami kenaikan dari tahun 2009 sebesar Rp. 398,382 Milyar lebih menjadi Rp. 724,700 Milyar lebih pada tahun 2013. Besarnya pendanaan tersebut, akan memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam menyusun program-program pro rakyat yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan di kabupaten ini.

5.1.2. Ruang Fiskal

Ruang fiskal menunjukkan seberapa tingkat keleluasaan pemerintah daerah menggunakan anggaran yang dimilikinya setelah memenuhi semua kewajibannya. Semakin besar ruang fiskal, maka akan semakin mudah bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan untuk program dan kegiatan termasuk program-program yang difokuskan untuk penanggulangan kemiskinan. Perkembangan Ruang Fiskal Kabupaten Kubu Raya dari Tahun 2009-2013 semakin baik dari tahun 2009 sebesar Rp.198.477.640.979,33 atau 41,95% dari total belanja bertambah baik pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp.484.228.660.786,05 atau 47,98%.

Secara rinci perbandingan jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain- lain Pendapatan daerah yang sah dapat dilihat pada gambar 5.2.



5.1.3. Derajat Otonomi Fiskal

Derajat otonomi fiskal dapat dilihat dari rasio kemandirian suatu daerah. Rasio kemandirian daerah adalah jumlah Pendapatan Asli Daerah dibagi Total pendapatan x 100 dan dinyatakan dalam persen. Rasio kemandirian Kabupaten Kubu Raya dari Tahun 2009-2013 dilihat pada tabel 5.3. Kendatipun secara progres tahun pertahun pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat memperbaiki kinerja Derajat Otonomi Fiskal, akan tetapi tingkat ketergantungan pemerintah terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat masih tinggi (dibawah 10%).

Dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya telah berupaya secara terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangannya sendiri. Namun demikian beberapa kendala masih ditemui, terutama adalah kelemahan dalam hal penilaian atas pungutan daerah. Untuk mendukung itu perlu diadakan penilaian sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan

Secara rinci perbandingan jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain- lain Pendapatan daerah yang sah dapat dilihat pada gambar 5.3.



R

Tabel 5.1 Struktur Anggaran Pendapatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013

Uraian Pendapatan	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
Pendapatan Asli Daerah	11.600.422.000,00	18.150.911.325,54	51.468.327.031,42	58.903.525.000,00	79.531.383.008,35
Hasil Pajak Daerah	5.981.277.000,00	8.847.900.000,00	40.489.510.000,00	42.898.659.000,00	41.205.435.000,00
Hasil Retribusi Daerah	2.256.645.000,00	3.864.250.000,00	5.656.480.500,00	7.154.866.000,00	10.476.550.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.362.500.000,00	5.738.761.325,54	5.322.336.531,42	8.850.000.000,00	27.849.398.008,35
Dana Perimbangan	429.170.624.047,00	507.161.961.047,00	570.780.015.000,00	661.008.448.570,50	782.413.248.034,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	35.164.094.047,00	44.164.094.047,00	43.687.353.000,00	44.688.012.570,50	55.595.147.034,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	375.538.530.000,00	414.760.167.000,00	460.516.762.000,00	535.464.386.000,00	627.894.391.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	18.468.000.000,00	48.237.700.000,00	66.575.900.000,00	80.856.050.000,00	98.923.710.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	25.965.846.359,33	110.602.858.412,00	148.465.081.772,00	102.496.636.047,48	146.841.279.306,70
Pendapatan Hibah	6.250.000.000,00	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	-	-
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	9.355.235.569,33	20.376.386.412,00	41.285.476.412,00	36.986.094.547,48	37.269.002.571,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2.957.611.000,00	40.792.209.000,00	16.409.545.000,00	-	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda Lainnya	7.403.000.000,00	14.853.000.000,00	16.105.500.000,00	8.341.500.000,00	21.724.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	72.164.560.360,00	57.169.041.500,00	87.848.276.735,70
Dana Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi	-	29.581.263.000,00	-	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah	466.736.892.406,33	635.915.730.784,54	770.713.423.803,42	822.408.609.617,98	1.008.785.910.349,05

Sumber data : APBD Kabupaten Kubu Raya Th. 2009-2013



Handwritten signature or mark.

Tabel 5.2 Perkembangan Ruang Fiskal Kab. Kubu Raya Tahun 2009-2013

URAIAN	Pendapatan dan Belanja				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pendapatan Asli Daerah	11.600.422.000,00	18.150.911.325,54	51.468.327.031,42	58.903.525.000,00	79.531.383.008,35
Dana Perimbangan	429.170.624.047,00	507.161.961.047,00	570.780.015.000,00	661.008.448.570,50	782.413.248.034,00
DAK	18.468.000.000,00	48.237.700.000,00	66.575.900.000,00	80.856.050.000,00	98.923.710.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	25.965.846.359,33	110.602.858.412,00	148.465.081.772,00	102.496.636.047,48	146.841.279.306,70
Hibah	6.250.000.000,00	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	-	-
Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	2.957.611.000,00	40.792.209.000,00	16.409.545.000,00	-	-
Pendapatan	466.736.892.406,33	635.915.730.784,54	770.713.423.803,42	822.408.609.617,98	1.008.785.910.349,05
Belanja Tidak Langsung	272.737.251.427,00	328.634.914.674,00	371.003.661.969,00	413.084.562.651,74	498.255.419.563,00
Belanja Pegawai	243.541.251.427,00	296.917.897.674,00	330.793.817.969,00	373.843.212.651,74	425.633.539.563,00
Belanja Langsung	200.411.959.048,00	346.676.797.475,00	435.169.407.010,00	456.261.069.328,00	510.939.529.812,00
Total Belanja	473.149.220.475,00	675.311.711.849,00	806.173.068.979,00	869.345.631.979,74	1.009.194.949.375,00
Ruang Fiskal (Rp)	198.477.640.979,33	285.760.133.110,54	370.843.795.834,42	367.709.346.966,24	484.228.660.786,05
Ruang Fiskal (%)	41,95%	42,32%	46,00%	42,30%	47,98%

Sumber data : APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013

Tabel 5.3 Rasio kemandirian Fiskal Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013

URAIAN	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pendapatan Asli Daerah	11.600.422.000,00	18.150.911.325,54	51.468.327.031,42	58.903.525.000,00	79.531.383.008,35
Dana Perimbangan	429.170.624.047,00	507.161.961.047,00	570.780.015.000,00	661.008.448.570,50	782.413.248.034,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	25.965.846.359	110.602.858.412	148.465.081.772	102.496.636.047	146.841.279.307
Rasio Kemandirian	2,49	2,85	6,68	7,16	7,88
Pendapatan	466.736.892.406,33	635.915.730.784,54	770.713.423.803,42	822.408.609.617,98	1.008.785.910.349,05

Sumber data : APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013



2

Tabel 5.4 Sumber-sumber Pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013-2015

Uraian Pendapatan	2009		2010		2011		2012		2013	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pendapatan Asli Daerah	11.600.422.000,00	18.150.911.325,54	51.468.327.031,42	58.903.525.000,00	79.531.383.008,35					
Hasil Pajak Daerah	5.981.277.000,00	8.847.900.000,00	40.489.510.000,00	42.898.659.000,00	41.205.435.000,00					
Hasil Retribusi Daerah	2.256.645.000,00	3.564.250.000,00	5.656.480.500,00	7.154.866.000,00	10.476.550.000,00					
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.362.500.000,00	5.738.761.325,54	5.322.336.531,42	8.850.000.000,00	27.849.398.008,35					
Dana Perimbangan	429.170.624.047,00	507.161.961.047,00	570.780.015.000,00	661.008.448.570,50	782.413.248.034,00					
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	35.164.094.047,00	44.164.094.047,00	43.687.353.000,00	44.688.012.570,50	55.595.147.034,00					
Dana Alokasi Umum (DAU)	375.538.530.000,00	414.760.167.000,00	460.516.762.000,00	535.464.386.000,00	627.894.391.000,00					
Dana Alokasi Khusus (DAK)	18.468.000.000,00	48.237.700.000,00	66.575.900.000,00	80.856.050.000,00	98.923.710.000,00					
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	25.965.846.359,33	110.602.858.412,00	148.465.081.772,00	102.496.636.047,48	146.841.279.306,70					
Pendapatan Hibah	6.250.000.000,00	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	-	-					
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	9.355.235.359,33	20.376.386.412,00	41.285.476.412,00	36.986.094.547,48	37.269.002.571,00					
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2.957.611.000,00	40.792.209.000,00	16.409.545.000,00	-	-					
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda Lainnya	7.403.000.000,00	14.853.000.000,00	16.105.500.000,00	8.341.500.000,00	21.724.000.000,00					
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	72.164.560.360,00	57.169.041.500,00	87.848.276.735,70					
Dana Tujuan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi	-	29.581.263.000,00	-	-	-					
Jumlah Pendapatan Daerah	460.736.892.406,33	635.915.730.784,54	770.713.423.803,42	822.408.609.617,90	1.008.785.910.349,05					

Sumber data : APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013



5.1.4. Sumber-sumber Pendapatan

Pendapatan Kabupaten Kubu Raya dari tahun 2009-2013 bersumber dari 12 (dua belas) sumber pendapatan. Pendapatan asli daerah bersumber dari 3 sumber pendapatan, Pendapatan dana Perimbangan bersumber dari 3 sumber pendapatan dan Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari 6 sumber pendapatan. Perkembangan pendapatan Kabupaten Kubu Raya dari lima belas sumber dari tahun 2013-2015 dapat dilihat pada Tabel 5.4.

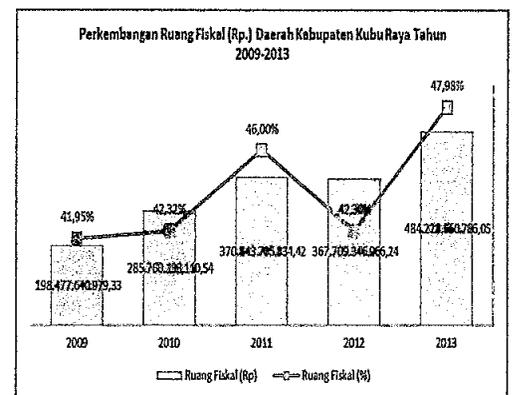
Terkait dengan sumber pendapatan bagi hasil pajak sumber tertentu (cukai rokok, kehutanan, dll), ketentuan mengenai peruntukan yang sudah spesifik dan dikhususkan penggunaannya pada sektor yang menjadi sumber, menjadikan salah satu kendala sendiri bagi pemerintah daerah dalam mendorong potensi dana untuk mempercepat program-program penanggulangan kemiskinan.

5.2. Analisis Anggaran Pendapatan

5.2.1. Analisis Ruang Fiskal

Analisis ruang fiskal Kabupaten Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013 dilihat dari nilainya terus mengalami peningkatan. Tahun 2009 ruang fiskal Kabupaten Kubu Raya senilai Rp. 198.477.640.979,33 meningkat menjadi Rp. 484.228.660.786,05 pada tahun 2013 atau 77,15% dengan rata-rata peningkatan sebesar 24,24% per tahunnya. Dilihat dari peningkatan nilai ruang fiskal Kabupaten Kubu Raya, dibandingkan dengan peningkatan pendapatan perkapita penduduk dan penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya dari tahun 2009-2013 sudah sejalan dan ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dalam rangka mengelola sumber daya keuangan yang dimilikinya sudah baik dan sesuai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga dengan persentase ruang fiskal daerah dari Tahun 2009 sebesar 41,95% meningkat pada tahun 2013 sebesar 47,98%. Hal ini berarti bahwa selama 3 (tiga) tahun peningkatan persentase ruang fiskal daerah hanya sebesar 1% dengan rata-rata peningkatan pertahunnya sebesar 0,25% Lebih jelasnya perkembangan nilai Ruang Fiskal dan persentase ruang fiskal Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013 dilihat pada gambar 5.2.

Gambar 5.2
Perkembangan Ruang Fiskal Daerah
Tahun 2009-2013



Sumber data : APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-

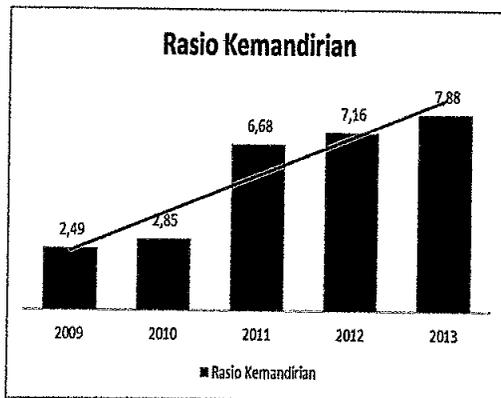
5.2.2 Analisis Derajat Otonomi Fiskal

Analisis derajat otonomi fiskal dapat dilihat dari rasio kemandirian suatu daerah. Rasio kemandirian daerah dapat menunjukkan seberapa besar derajat ketergantungan daerah



dalam rangka membiayai seluruh belanjanya yang dituangkan dalam bentuk program-program pembangunan. Rasio ketergantungan adalah selisih dari 100% dikurangi dengan rasio kemandirian daerah. Bila rasio kemandirian daerah adalah 50,00%, maka rasio ketergantungannya adalah $100\% - 50,00\% = 50,00\%$.

Gambar 5.3
Rasio Kemandirian Fiskal (%) Kabupaten Kubu Raya danPerkembangannya selama tahun 2009-2013



Sumber data : APBD Kabupaten Kubu Raya 2009-2013

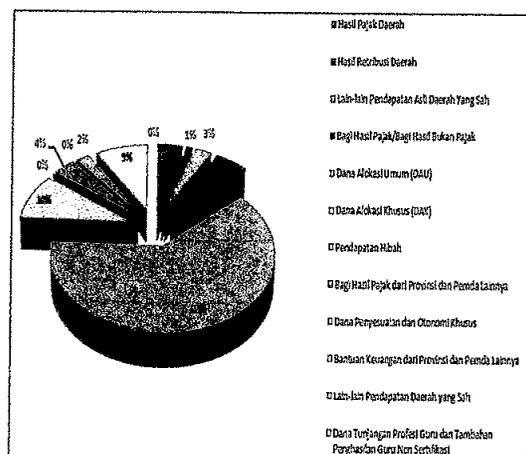
Berdasarkan analisis terhadap kemandirian daerah pada tahun 2009 - 2013 bahwa perkembangan rasio kemandirian setiap tahunnya secara umum menunjukkan perkembangan yang liner, hal ini ditunjukkan yaitu pada tahun 2009 rasio kemandirian Kabupaten Kubu Raya sebesar 2,49% meningkat pada tahun 2013 menjadi 7,88. Perkembangan rasio kemandirian daerah sebagaimana terlihat pada gambar 5.3, menunjukkan bahwa walaupun tingkat kemandirian daerah semakin lama mengalami peningkatan, namun rasio

ketergantungan daerah dari pihak di atasnya masih tinggi yaitu mencapai 87,77%. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pengaturan terhadap supply pendapatan (DAU, DAK, maupun Sumber lain) terlebih dahulu pengaturan alokasinya diperuntukan untuk membiayai aktivitas pengeluaran pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan, kemudian sisanya diperuntukan untuk kegiatan pembangunan. Besarnya tingkat ketergantungan daerah menjadikan kapasitas pemerintah menjadi terbatas untuk menyerap usulan program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan kondisi keterbatasan dana tersebut, menjadikan program/kegiatan yang perlu dibiayai melalui APBD dilakukan mekanisme penyaringan yang cukup ketat dengan mengedepankan program dengan skala prioritas tinggi.

Gambar 5.4
Porsi Pendapatan daerah menurut sumbernya Tahun 2013

5.2.3. Analisis Sumber-sumber Pendapatan

Analisis terhadap sumber-sumber pendapatan terutama terhadap Pajak daerah dan Retribusi Daerah dilakukan untuk memastikan apakah kebijakan pemerintah yang diambil terkait dengan target pendapatan daerah tidak berdampak pada penambahan beban masyarakat miskin, menghambat peningkatan pendapatan masyarakat miskin, atau menghambat investasi dari sektor swasta



serta menghambat pengembangan kewirausahaan terutama keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Komposisi sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 dilihat pada gambar 5.4 berikut :

Pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak daerah sebaiknya berasal dari golongan ekonomi menengah, seperti Pajak Hotel, Restaurant dll. Sedangkan pendapatan dari retribusi daerah diarahkan apabila pemerintah sudah dapat menyediakan sarana yang memadai dan pelayanan yang lebih baik, seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan, retribusi pelayanan pendidikan dapat ditekan seminimal mungkin dan diarahkan kepada retribusi parkir kendaraan, sehingga bagi pemilik kendaraan R-4 yang secara tidak langsung bukan termasuk masyarakat miskin dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Pada gambar 5.4 diatas dapat dijelaskan bahwa 62% pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2013 bersumber dari Dana Alokasi Umum, selanjutnya 10% bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan yang ketiga dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 9%. Sedangkan pendapatan dari Pajak daerah hanya sebesar 4% dari total pendapatan daerah dan retribusi Daerah hanya 1% dari Total Pendapatan daerah, hal ini menunjukkan bahwa potensi pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah walaupun dapat ditingkatkan, namun peningkatannya tidak terlalu signifikan, hal yang sama juga terjadi pada retribusi daerah yang semakin lama semakin terbatas sumbernya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam hal penganggarkan pendapatannya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah sudah baik dan sesuai dengan prinsip bahwa pendapatan asli daerah tidak berdampak menambah beban pengeluaran masyarakat miskin.

5.3. Analisis Anggaran Belanja

5-3.1. Analisis anggaran Belanja menurut fungsi

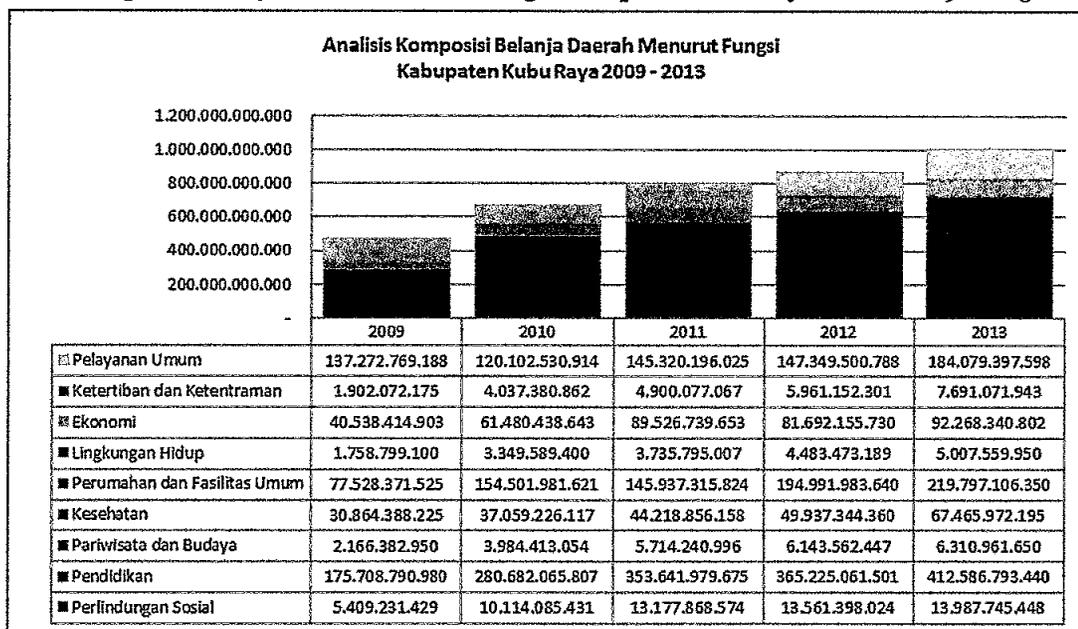
Masih banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya yang mencapai 32.100 jiwa dengan tingkat kemiskinan mencapai 6,04% pada tahun 2013, ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya mengintegrasikan prioritas intervensi bidang pembangunan yang berhubungan langsung dengan penanganan kemiskinan. Berdasarkan analisis terhadap pengalokasian anggaran menurut fungsinya terlihat bahwa sektor intervensi (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) senantiasa mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Namun demikian melihat hasil pembahasan sebelumnya, beberapa capaian indikator- intervensi masih ada yang di bawah target, sehingga perlu dilakukan link and match terhadap program guna mendorong peningkatan hasil capai yang diharapkan.

Pada Tabel 5.5 di atas terlihat bahwa belanja daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2009-2013 adalah mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan pada tahun 2009-2013 adalah sebesar 16,33%. Alokasi terbesar dari belanja daerah pada tahun 2015 yaitu terdapat pada



fungsi pendidikan yaitu sebesar Rp.412.5 milyar atau sebesar 40,88% dari total belanja daerah. Selanjutnya jika melihat alokasi belanja menurut fungsi, fungsi perumahan dan fasilitas umum dialokasikan sebesar Rp.219.7 milyar atau sebesar 21,78% dan fungsi pelayanan umum sebesar Rp. 184 milyar atau sebesar 18,24%. Sedangkan fungsi perlindungan sosial dialokasikan sebesar 1,93% atau sebesar Rp. 13.98 milyar

Tabel 5-5
Komposisi Belanja Daerah menurut Fungsi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 - 2013

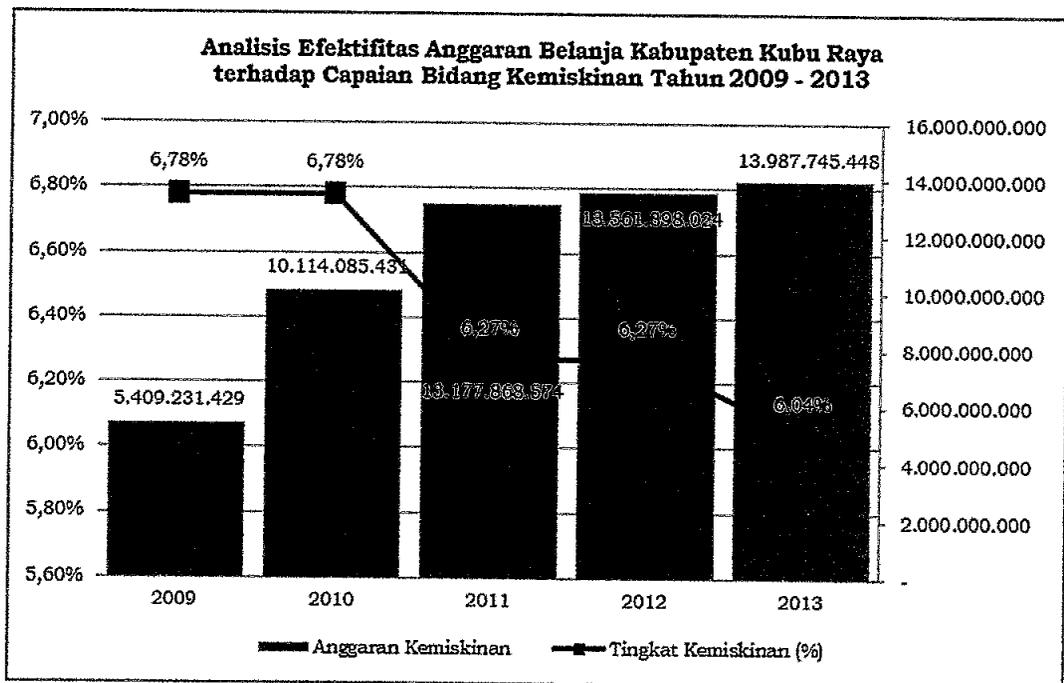


Sumber data : APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013

Berdasarkan alokasi anggaran belanja pada masing-masing urusan, efektivitas anggaran belanja terhadap capaian angka kemiskinan menunjukkan perkembangan yang meningkat dalam kurun periode 5 tahun (2009- 2013). Selanjutnya secara output, efektifitas dalam pemanfaatan anggaran kemiskinan terjadi pada tahun 2011. dengan anggaran yang terbatas mampu menekan angka kemiskinan sebesar 0,51%. Sebaliknya kondisi yang kurang efektif dicapai pada tahun 2012 dengan alokasi anggaran yang mencapai kenaikan hampir dua kali lipat namun hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,58%, dan menjadi lebih efektif pada tahun 2012 demikian juga halnya dengan tahun 2012, yang mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,79%. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas anggaran belanja pada tahun 2012 sudah baik, mengingat sudah tidak ada lagi pemisahan penduduk miskin dengan daerah lain dan dengan jumlah anggaran yang lebih besar, penurunan angka kemiskinan cukup menggembirakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan sudah cukup baik.



Gambar 5-5
 Analisis efektifitas anggaran belanja Kabupaten Kubu Raya terhadap capaian
 Bidang kemiskinan tahun 2009-2013



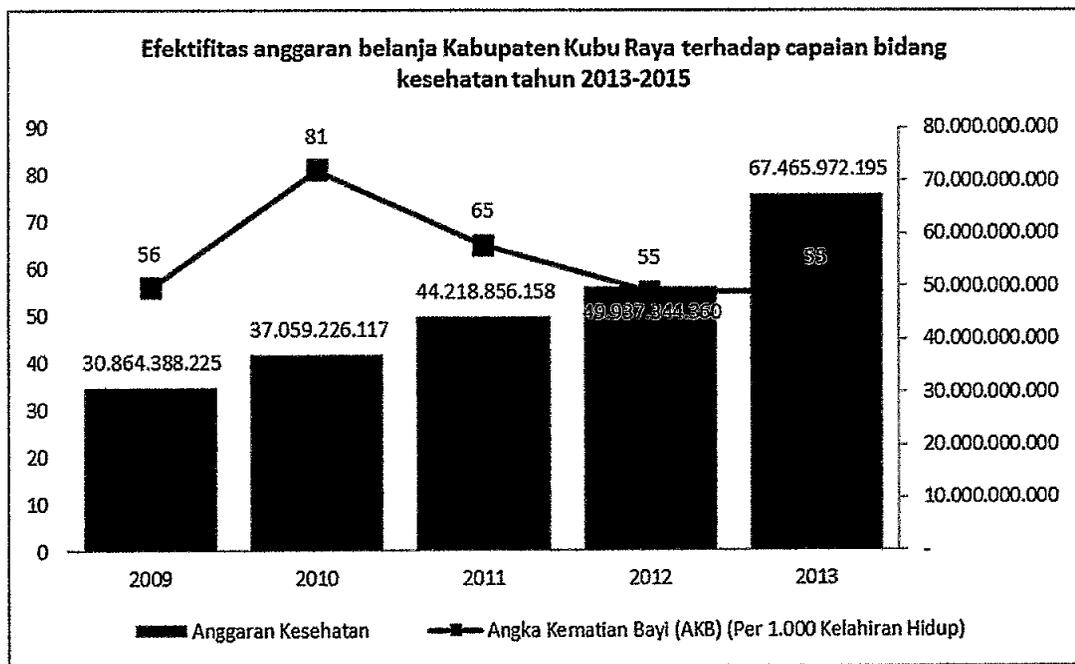
Sumber data : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2014

Analisis efektifitas anggaran belanja terhadap capaian bidang Kesehatan dilakukan untuk melihat seberapa besar tingkat tingkat efektifitas anggaran belanja kesehatan dalam meningkatkan capaian indikator utama/menurunkan Angka Kematian Bayi tahun 2009-2013. Dengan melihat kondisi di atas yang mana penurunan angka kematian bayi yang menurun secara dinamis tiap tahunnya dan untuk mengantisipasi kenaikan angka kematian bayi yang terjadi pada tahun 2010, maka pemerintah Kabupaten Kubu Raya sangat perlu untuk memberikan prioritas intervensi dan meningkatkan alokasi belanja bidang kesehatan agar AKB dapat ditekan sekecil mungkin.



Handwritten signature or initials.

Gambar 5.6
Efektifitas anggaran belanja Kabupaten Kubu Raya
terhadap capaian bidang kesehatan tahun 2013-2015



Sumber data : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2014

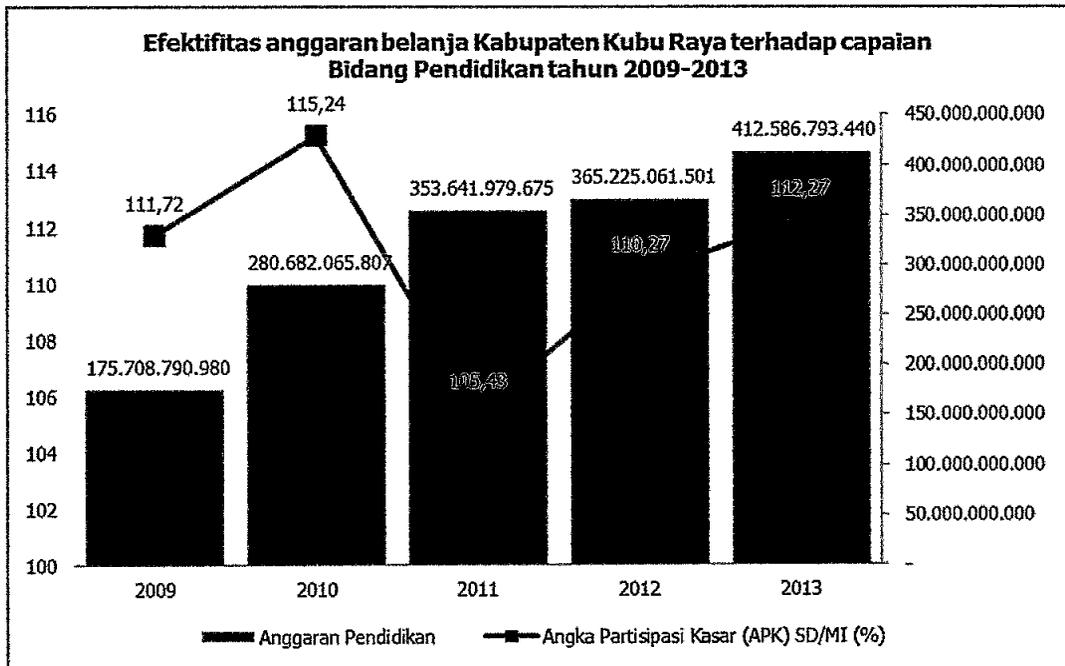
Pada gambar 5.7 diatas dapat dilihat bahwa meningkatnya alokasi anggaran urusan kesehatan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja bidang kesehatan. Terlihat pada tabel jumlah kematian bayi perkasus bergerak secara dimanis dan cenderung menurun tiap tahunnya. Tetapi pada tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah kematian bayi sebesar 25 perkasus dari tahun 2009 menjadi 81 perkasus pada tahun 2010 dan setelah itu cenderung menurun hingga pada tahun 2013 terhitung sampai bulan juni 2013, angka kematian bayi tercatat 55 perkasus. Dengan demikian bahwa alokasi anggaran belanja berjalan efektif dan kinerja kesehatan pada 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang baik terhadap penurunan angka kematian bayi.

Analisis efektifitas anggaran belanja kabupaten terhadap capaian bidang pendidikan dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif peningkatan alokasi anggaran belanja urusan pendidikan untuk meningkatkan APK SD/MI Kabupaten Kubu Raya, sebagai dasar perencanaan dimasa datang. Jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.8. Peningkatan alokasi anggaran dari tahun 2009-2013 terus mengalami kenaikan yang dibarengi dengan meningkatnya capaian bidang pendidikan pada APK SD/MI. Namun kondisi yang kurang baik terjadi pada tahun 2011, dimana peningkatan anggaran belanja pendidikan tidak dibarengi dengan peningkatan APK SD/MI. Kondisi membaik pada tahun 2012 dan 2013, dimana meningkatnya anggaran pendidikan sudah dibarengi dengan peningkatan APK.SD/MI. Hal ini berarti bahwa alokasi anggaran belanja pada urusan pendidikan cukup efektif. Walaupun alokasi anggaran pendidikan sudah cukup efektif untuk meningkatkan APK namun capaiannya masih dibawah Provinsi dan Nasional, sehingga masih



perlu prioritas intervensi pemerintah untuk meningkatkan kinerja bidang pendidikan agar capaian APK dapat melampaui Provinsi dan nasional.

Gambar 5.7
Efektifitas anggaran belanja Kabupaten Kubu Raya terhadap capaian Bidang Pendidikan tahun 2009-2013



Sumber data : BPS Kabupaten Kubu Raya, 2014

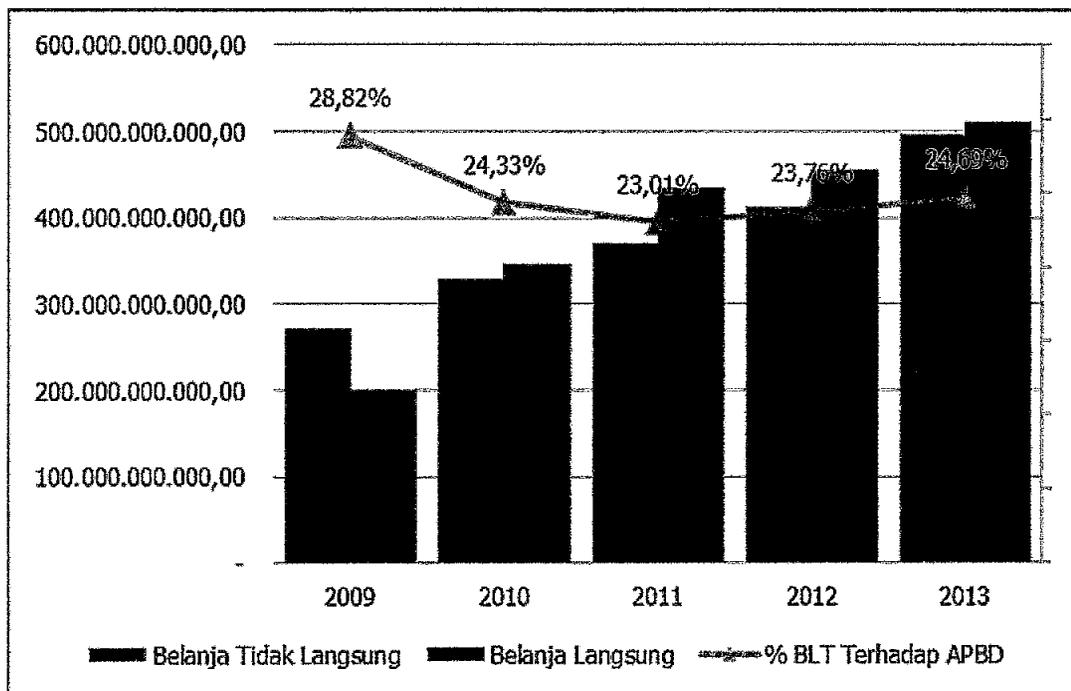
5.3.2. Analisis Struktur Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Analisis terhadap struktur anggaran belanja bermanfaat untuk melihat apakah anggaran belanja daerah telah digunakan secara efektif. Hal ini dilakukan dengan menganalisa pembagian proporsi belanja APBD antara belanja langsung dan belanja tidak langsung. Perkembangan proporsi belanja langsung dan tidak langsung tahun 2009-2013 dilihat pada gambar 5.9.

Handwritten signature/initials



Grafik 5.8
Perkembangan proporsi belanja langsung dan tidak langsung
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013



Sumber data : BPS dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2014

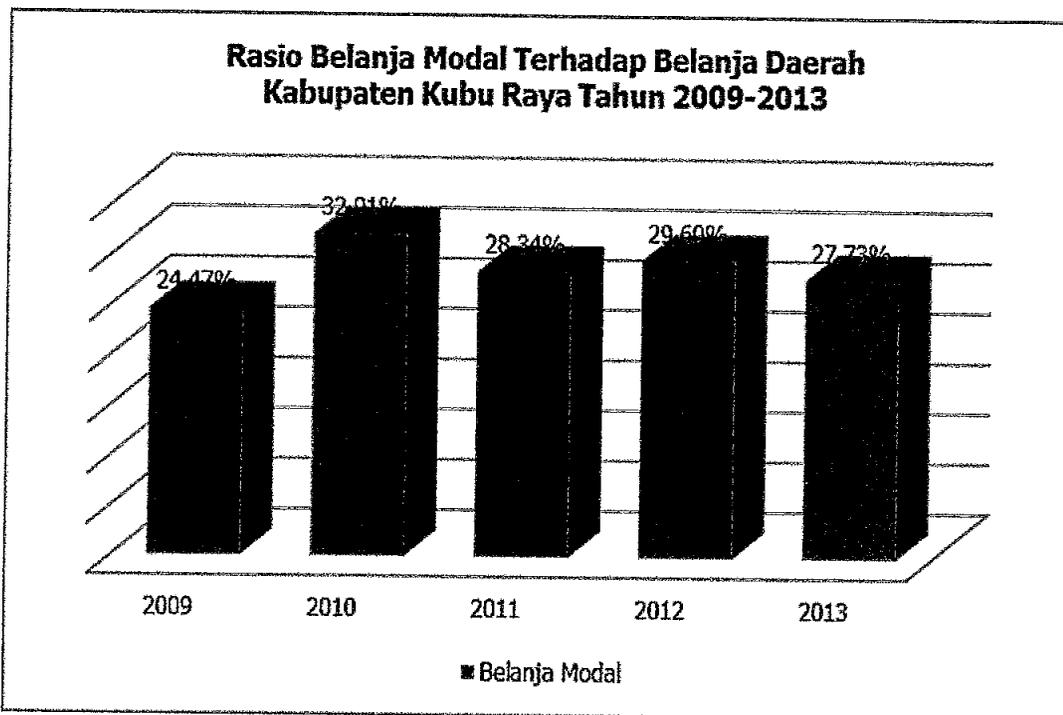
Berdasarkan Gambar 5.9 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan proporsi belanja langsung dan tidak langsung tahun 2009-2013 pada umumnya proporsi belanja langsung masih jauh lebih kecil disbanding belanja tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa masih kecilnya proporsi anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan daerah. Berbagai upaya perbaikan proporsi belanja terus dilakukan setiap tahunnya, dan terlihat bahwa perkembangan persentase belanja langsung semakin meningkat dan disisi lain perkembangan persentase belanja tidak langsung terlihat semakin menurun. Kondisi ini menandakan bahwa kebijakan pemerintah sudah baik dan harus terus ditingkatkan sehingga kondisi dimana proporsi belanja langsung akan lebih besar disbanding belanja tidak langsung.

5.3.3. Analisis Rasio Anggaran Belanja Modal Daerah

Analisis rasio anggaran belanja Modal terhadap belanja daerah Kabupaten Kubu Raya, dilakukan untuk melihat apakah alokasi anggaran belanja dapat mendukung peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dan apakah alokasi anggaran sudah mendukung pengembangan penjaminan keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil. belanja modal terhadap belanja daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013 dilihat pada gambar 5.10.



Gambar 5.9
 Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah
 Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013



Sumber data : APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2013

Berdasarkan gambar 5.10 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan rasio belanja modal terhadap belanja daerah dari tahun 2009 -2013 mengalami peningkatan yang cukup baik. Tahun 2009 Jumlah belanja Modal sebesar Rp.115.777.425.875,00 atau sebesar 24,47% dari total belanja daerah tahun 2009 sebesar Rp. 473.149.220.475,00 mengalami peningkatan menjadi Rp. 164.092.600.901,00 atau 142% pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 279.870.026.776,00. Hal ini berarti selama 4 tahun, peningkatan rata-rata pertahunnya sebesar Rp. 219.513.925.905,04 atau sebesar 20,00%. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan nilai modal tetap bruto terus dilakukan guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

Handwritten signature/initials



BAB VI

KAJI ULANG KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN

6.1 Pemetaan Program

Masalah kemiskinan tidak dapat dipecahkan melalui kebijakan yang bersifat sektoral, parsial dan berjangka pendek. Secara konseptual penanggulangan kemiskinan memerlukan penanganan yang komprehensif, multi sektor, konsisten, terpadu serta terencana. Kebijakan Penanggulangan kemiskinan bertumpu pada kebijakan publik yang berpihak kepada orang miskin (pro poor policy). Kebijakan yang berpihak kepada orang miskin dalam perspektif perencanaan pembangunan dimaknai sebagai cara pandang dalam menyusun berbagai program/kegiatan yang senantiasa berpihak kepada orang miskin (pro poor development). Hal itu berarti, segala daya dan kemampuan yang dimiliki mendahulukan kepentingan penduduk miskin. Sehingga diperlukan sinkronisasi tindakan untuk mendapatkan hasil kumulatif yang maksimal dari seluruh rangkaian program penanggulangan kemiskinan yang berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan itu sendiri,

Semakin kuatnya upaya pengentasan permasalahan kemiskinan, menjadikan program-program terobosan yang ditujukan langsung secara khusus untuk penanganan penduduk miskin menjadi semakin diperlukan. Program afirmatif ini secara khusus dirancang dan dijalankan untuk menjawab persoalan kemiskinan secara langsung kepada sasaran penduduk miskin meliputi individu, keluarga maupun rumah tangga, baik secara komunitas maupun perbaikan atas sumber penghidupannya.

Beberapa tahun belakangan ini review terhadap pelaksanaan kebijakan program penanggulangan kemiskinan, menghasilkan paradigma dan pendekatan baru penanganan kemiskinan secara lebih inklusif, yang secara umum bercirikan sebagai berikut :

1. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari karakteristik orang miskin statis, melainkan dilihat secara dinamis.
2. Indikator untuk mengukur kemiskinan adalah komposit.
3. Konsep kemampuan sosial dipandang dari pendapatan dalam memotret dinamika kemiskinan.
4. Pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin pada beberapa indikator kunci mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian



(lifelhoods), memenuhi kebutuhan dasar (basic needs fulfilment), mengelola asset (asset management), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan.

5. Berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
6. Bertumpu pada pembangunan berbasis komunitas dengan pola memberikan kewenangan kepada masyarakat sampai pada tingkat terbawah dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program.
7. Mengedepankan keterlibatan pelaku-pelaku kunci untuk diarahkan pada pemberdayaan potensi masyarakat miskin.
8. Terintegrasi dalam skema perencanaan pembangunan dan penganggaran.
9. Bersifat pemenuhan terhadap hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin.
10. Mengutamakan pendekatan partisipatif dalam setiap prosesnya, berbasis pemberdayaan masyarakat.
11. Berorientasi pada pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil.
12. Berperspektif Gender dan kelompok marjinal dalam pengambilan keputusan.
13. Memperhatikan keragaman budaya lokal.

Secara defenisi, Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan Kemiskinan, pada Pasal 1 memberikan pengertian penanggulangan kemiskinan sebagai suatu kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana pasal 2 memberikan arah penekanan : (1) arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); (2) arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Atas pemahaman itu, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak termasuk kategori sektor atau urusan, namun merupakan program lintas sektor yang bersifat pengutamaan, dan bisa melekat pada setiap urusan pembangunan daerah, sehingga penanganannya harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan seluruh komponen sumber daya.

Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 menyebutkan Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan :

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil;
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.



Sedangkan dalam pasal 5 disebutkan bahwa program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, mengembangkan potensi dan kelompok masyarakat miskin dalam pembangunan yang didasarkan pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
4. Program-program lainnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Berpijak dengan hal tersebut, Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya dalam 5 (lima) tahun mendatang secara umum diarahkan pada :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;
2. Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar serta Sarana Prasarana Pemerintahan;
3. Peningkatan Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat;
4. Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
5. Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi sesuai Potensi Wilayah;
6. Peningkatan Keunggulan dan Daya Saing Daerah.

Selain itu, dilakukan juga evaluasi terhadap capaian sasaran pembangunan yang belum tercapai dan memerlukan intervensi lebih lanjut, sehingga sasaran yang telah tercapai terus dapat ditingkatkan dan dipertahankan dalam menjaga momentum pembangunan periode lima tahun berikutnya.

6.1.1. Pemetaan program – program penanggulangan kemiskinan Kluster 1

Pemetaan program-program penanggulangan kemiskinan daerah dirumuskan pemerintah daerah dengan sarannya individu, keluarga dan rumah tangga miskin di Kabupaten Kubu Raya dengan cakupan 40% penduduk pengeluaran terendah (miskin dan rentan miskin)/ rumah tangga di bawah menengah. Tujuan program adalah untuk memperluas cakupan individu, keluarga dan rumah tangga miskin agar mendapat akses terhadap layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat, Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif yaitu :

1. perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial;
2. peningkatan akses pelayanan dasar;



3. pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan
4. pembangunan yang inklusif.

Mengacu kepada prinsip utama tersebut, pendekatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi :

1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan
4. membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Strategi kemiskinan yang dilakukan di daerah dijabarkan dalam berbagai program diantaranya, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan social, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Program/kegiatan pada cluster 1 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Program Penanggulangan Kemiskinan Kluster 1
Di Kabupaten Kubu Raya

NO	PROGRAM	SASARAN Tahun 2013	ALOKASI I/ JMLH	SASARAN	ALOKASI II/ JMLH	SASARAN	ALOKASI III/ JMLH
1.	Program Keluarga Harapan tahun	RTSM	TAHAP I	RTSM	TAHAP II	RTSM	TAHAP III
		2.844	945,000	2.832	2,030,200	2.700	1,132,750
2.	Raskin	TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013	
		RTM	49,086	RTM	49,086	RTM	26,248
3.	Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin	TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014	
	- Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	7-18 tahun	11.603.250.000	7-18 tahun	19.164.317.000	7-18 tahun	10.666.992.400
	-Pengadaan seragam bagi siswa tidak mampu	7-18 tahun	-	7-18 tahun	-	7-18 tahun	-
	-Beasiswa melanjutkan ke perguruan tinggi bagi siswa tidak mampu dan berprestasi	7-18 tahun	125.000.000	7-18 tahun	125.000.000	7-18 tahun	527.232.000

Sumber : Data SKPD, diolah

6.1.2. Pemetaan program-program penanggulangan kemiskinan Kluster 2

Pemetaan program-program penanggulangan kemiskinan daerah pada cluster 2 dirancang pemerintah daerah dengan sasarannya kelompok dan komunitas di Kabupaten Kubu Raya yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok dan komunitas untuk menunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, seperti pada tabel 6.2.



Tabel 6.2
Pemetaan program-program Kluster 2 Di Kabupaten Kubu Raya

NO	PROGRAM	SASARAN	ALOKASI I/ JMLH	ALOKASI II/ JMLH	ALOKASI III/ JMLH
1.	PNPM Generasi Sehat dan Cerdas	5 Kecamatan; -Kecamatan Batu Ampar -Kecamatan Kubu -Kecamatan Sungai Kakap -Kecamatan Sungai Raya -Kecamatan Terentang	Rp.9.230.050.000		-
2.	Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil	-	-	-	
	- Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Usaha Mikro	-	-	
3.	Peningkatan Kehidupan Nelayan dengan Target Sasaran Kelompok Tertentu, pada umumnya 60% RTS Termiskin	-	BLM (APBN)	BLM (APBD)	
	a.Pamsimas	Masyarakat berpenghasilan rendah	Tahun 2014		
			880.000.000,-	220.000.000	
			Tahun 2015		
			880.000.000,-	220.000.000,-	
	b.Bantuan.untuk Nelayan Miskin	Nelayan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
	-Penyediaan sarana perikanan tangkap (perahu/sampan bermotor		1.054.500.000	870.000.000	-
	-Sertifikasi rumah nelayan		-	-	-
	-Penyediaan sarana .air bersih		110.000.000	-	400.000.000
	-Pengadaan sarana .pemasaran .kendaraan roda dua		-	125.000.000	-
	-Pengadaan keramba .jaring apung		1.410.000.000	-	
4.	Bantuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
	-Pelayanan, pemenuhan kebutuhan makanan dan kesehatan jompo	160 Orang	Rp. 747.000.000		



1
R

NO	PROGRAM	SASARAN	ALOKASI I/ JMLH	ALOKASI II/ JMLH	ALOKASI III/ JMLH
	-Pelayanan, pemenuhan kebutuhan makanan dan kesehatan jompo	180 Orang		Rp. 765.000.000	
	-Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	60 Orang			Rp. 54.878.000
	-Pendidikan dan pelatihan berusaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	40 Orang			Rp. 31.186.000
	-Peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat dalam rangka penanganan PMKS	60 Orang			Rp. 39.570.000
	-Pemberdayaan tenaga kerja pedesaan	80 Orang			Rp. 80.173.000
	-Penyediaan bahan logistik jompo	90 Orang			Rp. 623.000.000

Sumber, Data SKPD, Di olah

6.2. Kaji Ulang Kebijakan menurut Bidang/Sektor

Setelah dilakukan kaji ulang terhadap program penanggulangan kemiskinan bersasaran menurut kelompok program yang dijalankan di daerah, selanjutnya dilakukan kaji ulang kebijakan menurut bidang/sector. Kaji ulang kebijakan menurut bidang/sector ini dilakukan untuk melihat ketidak sesuaian dan kekurangan-kekurangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dari kebijakan yang selama ini dijalankan, baik berupa program dan kegiatan, anggaran maupun regulasi.

Kaji ulang dilakukan berdasarkan bidang/sector sesuai dengan 5 bidang dalam analisis penanggulangan kemiskinan, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketenagakerjaan dan kewirausahaan, serta bidang ketahanan pangan. Kaji ulang ini merupakan gap analysis antara kebijakan yang seharusnya dijalankan dengan acuan prioritas kebijakan dan intervensinya yang dihasilkan dari analisis data kemiskinan.

6.2.1 Bidang Pendidikan

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan capaian pembangunan bidang pendidikan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Pendidikan merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam perumusan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi IPM suatu daerah menandakan semakin majunya daerah tersebut. Keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Kasar (APK dan Angka Partisipasi Murni (AMP).

Secara umum kondisi pendidikan di Kabupaten Kubu Raya meningkat dari tahun ke tahun. Namun terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil APK dan APM, yang artinya semakin tinggi jenjang pendidikan semakin banyak pula anak yang tidak meneruskan



pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut antara lain disebabkan karena ketidakmampuan secara ekonomi, terbatasnya akses ke sarana pendidikan di lingkungan terdekat. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya harus mengambil langkah kebijakan untuk menghasilkan program dan kegiatan yang mampu untuk meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan masyarakat Kabupaten Kubu Raya . Hal ini dikarenakan capaian indikator tersebut masih jauh dari yang ditargetkan, sehingga prioritas intervensi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya diarahkan kepada program-program yang dapat memperbaiki capaian indikator bidang pendidikan yang masih bermasalah, yaitu:

1. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2013, masih bermasalah dan berada pada kuadran 2 atau Zona kuning, capaiannya masih dibawah rata- rata Propinsi dan Nasional.
2. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs tahun 2013. Masih bermasalah dan berada pada Kuadran 2 atau Zona kuning, capaiannya masih dibawah rata- rata Propinsi dan Nasional.
3. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs tahun 2013, masih bermasalah dan berada pada kuadran 3 atau Zona merah, capaiannya masih dibawah rata- rata Propinsi dan Nasional.
4. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA, masih bermasalah dan berada pada kuadran 3 atau Zona merah, capaiannya berada dibawah rata-rata Propinsi dan Nasional.
5. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA, masih bermasalah dan berada pada kuadran 3 atau Zona merah, capaiannya masih dibawah rata- rata Propinsi dan Nasional.

6.2.2 Bidang Kesehatan

Sasaran utama pembangunan kesehatan untuk menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. upaya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian indikator kesehatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dari 7 indikator kesehatan yang dianalisis 7 diantaranya masih ada 1 indikator yang bermasalah yaitu Balita Gizi Kurang (Kasus), menurut data dari Dinas Kesehatan hingga Bulan Juni tahun 2013 meningkat sebanyak 972 Kasus. Terjadinya penurunan kasus Kematian Ibu dan Bayi pada Tahun 2013 dari 16% menurun menjadi 3%. Perkembangan status gizi balita menunjukkan perbaikan. Persalinan dengan tenaga kesehatan sudah cukup tinggi, namun masih ada sebagian masyarakat mencari pertolongan persalinan pada dukun. Indikator lain yang menggambarkan perkembangan pembangunan kesehatan adalah sarana dan prasarana kesehatan yang sudah cukup memadai.

6.2.3. Bidang Infrastruktur Dasar

Kaji ulang terhadap prioritas pembangunan daerah bidang infra struktur Kabupaten Kubu Raya dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan intervensi kebijakan yang seharusnya diprioritaskan berdasarkan hasil analisis dengan prioritas pembangunan



f r

berdasarkan kebijakan pemerintah. Berdasarkan kebijakan pembangunan pemerintah bidang infrastruktur diarahkan untuk peningkatan infrastruktur ;

1. Infrastruktur Jalan merupakan sarana yang sangat vital bagi perkembangan daerah, sarana mobilitas penduduk juga digunakan untuk mengangkut hasil-hasil ekonomi.
2. Infrastruktur Sumber Daya Air ditujukan pada pengendalian dan pengurangan dampak kerusakan akibat banjir, abrasi dan erosi pantai, terutama pada wilayah berpenduduk padat, wilayah strategis dan pusat-pusat perekonomian.
3. Infrastruktur Irigasi diarahkan pada sentra- sentra produksi padi sawah yang perlu diekstensifikasi yang difungsikan untuk kebutuhan air bagi pertanian dan mengeringkan kawasan-kawasan tertentu agar tidak terjadi genangan air atau banjir pada waktu musim hujan.
4. Infrastruktur perumahan dan permukiman, pada tahun 2012 Kabupaten Kubu Raya telah melakukan rehabilitasi pembangunan rumah tidak layak huni yang tersebar di beberapa kecamatan. Beberapa indikator utama masih bermasalah yaitu :
 1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang belum memadai.
 2. Indikator Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap dengan Air Minum Layak Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 berada pada kuadran 3 atau Zona Merah. Perkembangannya membaik dari tahun 2011 mencapai 7,5% membaik pada tahun 2014 menjadi 8,93%. Indikator ini masih bermasalah sehingga menjadi prioritas intervensi untuk segera diperbaiki.
 3. Indikator Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar Kabupaten Kubu Raya tahun 2014 berada pada kuadran 3 atau zona merah. Perkembangannya membaik dari tahun 2011 sebesar 35% membaik pada tahun 2014 menjadi 39,6%. Indikator ini juga masih bermasalah sehingga menjadi prioritas intervensi untuk segera diperbaiki.

6.2.4. Bidang Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan

Kaji ulang kebijakan pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan diarahkan pada program pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kelompok-kelompok produktif dengan memberdayakan sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, perikanan, usaha pengolahan, industry rumah tangga, perdagangan dan jasa-jasa kemasyarakatan. Pada tahun 2013, penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kubu Raya paling besar oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi.

Berdasarkan hasil analisis indikator Utama Bidang Ketenagakerjaan dan kewirausahaan masih ada beberapa indikator yang bermasalah yaitu :

1. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kubu Raya tahun 2013 sebesar 9,26% atau naik 52,81% terhadap tahun sebelumnya. Posisinya berada pada kuadran 1 atau Zona kuning, perkembangannya meningkat signifikan (jauh di atas rata-



fⁿ

rata Kalbar yang TPTnya sebesar 3,04%). Indikator ini masih bermasalah sehingga memerlukan prioritas intervensi pemerintah agar segera membaik.

2. Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013 sebesar 64,19% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sebesar 66,17%.
3. Rendahnya pendidikan para pencari kerja (rata-rata lulus SD/ sederajat), keterampilan relative terbatas sehingga tidak dapat bersaing dalam pasar kerja industri.
4. Penambahan jumlah pengangguran yang signifikan pada angkatan kerja akibatnya tutupnya industry kayu dan dan sector industry manufaktur dan moratorium PNS.
5. Ketidaksiesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan.

6.2.5. Bidang Ketahanan Pangan

Kaji ulang kebijakan pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap bidang ketahanan pangan diarahkan pada program peningkatan ketersediaan pangan, Desa Mandiri Pangan, Pemerataan Distribusi Pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman, beragam, bergizi dan imbang, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan.

Pada Tahun 2012 jumlah produksi tanaman padi sebesar 205.000 ton dengan rincian padi sawah sebanyak 203.523 ton dan padi lading 1.478 ton; turun sebesar 0,92% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan luas panen 60.694 ha menjadi 60.032 ha atau turun sebesar 1,10%. Kendala utama yang dihadapi adalah semakin meningkatnya alih fungsi lahan pertanian, terutama untuk kegiatan industry perkebunan skala besar. Untuk mempertahankan luas areal pertanian dilakukan dengan penetapan lahan-lahan pertanian abadi dalam bentuk food estate dan rice estate.

6.2.6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya tahun 2013 tercatat sebesar 6,79%. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun 2012 yang hanya mencapai 6,69%. Posisi Kabupaten Kubu Raya berada diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Barat.

6.3. Kelembagaan

Kelembagaan Pemerintah Daerah yang menangani upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya, telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Propinsi dan Kabupaten/Kota, TKPKD diamanahkan untuk memastikan dan memantau pelaksanaan PBDT-PPLS 2015, sekaligus melaksanakan tugas TKPKD daerah dalam melakukan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya maka



Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 ditetapkan dengan Salinan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 23 Tahun 2015, yang mempunyai tugas melakukan langkah – langkah konkrit untuk pelaksanaan percepatan pengurangan jumlah penduduk miskin melalui koordinasi penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan serta fungsi utama dalam mendukung Pemerintah Daerah dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan Kebijakan dan Program dalam rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang direncanakan dan bersifat lintas sektor berjalan secara sinergis.

Tugas dan fungsi utama TKPK adalah koordinasi dan pengendalian program-program penanggulangan kemiskinan di daerah. TKPK merupakan bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan yang menggerakkan strategi yang lain melalui instrument koordinasi dan pengendalian agar kebijakan dan program penanggulangfan kemiskinan yang direncanakan dan bersifat lintas sektor berjalan secara sinergis. Dalam operasional sehari-hari, dalam operasional TKPK dapat membentuk Tim teknis yang bertugas memfasilitasi koordinasi antara TKPK dengan satuan kerja lainnya di daerah.

Beberapa instrumen koordinasi dan pengendalian yang dapat dijalankan oleh TKPK adalah :

1. Melalui Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), dengan mengkoordinasikan penyusunannya, TKPK dapat mendorong RPJMD lebih memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dengan integrasi SPKD dalam RPJMD.
2. Mengkoordinasikan penajaman perencanaan program penanggulangan kemiskinan dalam dokumen Renstra , Renja dan RKPD.
3. Melaksanakan Rapat Koordinasi TKPK.
4. Mengembangkan sistem Monev terhadap program-program penanggulangan kemiskinan secara terpadu.
5. Menyusun Laporan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah.
6. Mengelola pengaduan masyarakat.
7. Menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati.

6.3.1. Sistim Koordinasi dan Pengendalian

Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 memosisikan TKPK Propinsi dan Kabupaten/Kota agar berperan dalam supervisi, pemantauan dan evaluasi terpadu terhadap kinerja seluruh Tim Koordinasi yang menangani berbagai program penanggulangan kemiskinan di daerah. TKPK melakukan koordinasi berdasarkan fungsinya yaitu :

1. Mengkoordinasikan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan.



2. Mengkoordinasikan forum SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan renstra SKPD.
3. Mengkoordinasikan forum SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKP.
4. Mengkoordinasikan forum SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan renja SKPD, dalam rangka penyusunan SPKD TKPK dapat melaksanakan rapat koordinasi dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama rapat persiapan penyusunan SPKD, koordinasi dalam proses penyusunan dan finalisasi SPKD.
5. Evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

6.3.2. Penguatan kelompok Kerja TKPK

Kelompok Kerja dalam struktur TKPK mempunyai fungsi membantu kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat TKPK. Kelompok kerja TKPK meliputi:

1. Kelompok kerja pendataan dan Sistem Informasi (Kabid Stapel Bappeda)
2. Kelompok kerja Pengembangan kemitraan (Kabid. Ekonomi Bappeda)
3. Kelompok kerja Pengaduan Masyarakat (Sekretaris Inspektorat)

Masing-masing kelompok kerja berperan sangat penting dalam menghasilkan informasi yang akan diimplementasikan oleh Kelompok Program, sehingga terjadi kerjasama yang saling mendukung kinerja antar kelompok kerja dan kelompok program.

6.3.3. Permasalahan Koordinasi Penanggulangan kemiskinan

Salah satu tantangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya adalah integrasi dan koordinasi. Bagaimana instrument pengintegrasian program penanggulangan kemiskinan ke dalam dokumen perencanaan, identifikasi programnya serta alokasi pembiayaannya. Hal lainnya adalah koordinasi, karena kesekretariatan TKPK ada di Sekretariat Bappeda, sedangkan kelompok Program dan kelompok kerja lintas sektor, adanya kepentingan dan ego sektor masih menjadi kendala dalam mensinkronisasikan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah :

1. Koordinasi antar SKPD, masih kurangnya pertemuan, komunikasi antar kelompok kerja, kelompok program dan terbatasnya komunikasi kesekretariatan dengan ketua TKPK menyebabkan koordinasi dan komunikasi antar SKPD masih kurang.
2. Pelaksanaan kegiatan kelembagaan TKPK Kabupaten belum berjalan optimal, hal ini disebabkan masih terbatasnya pemahaman SKPD selaku Kelompok Kerja, kelompok Program dalam satu satuan kelembagaan TKPK Kabupaten. Kondisi ini juga disebabkan masih kurangnya koordinasi dan pembinaan TKPK Propinsi kepada TKPK Kabupaten.
3. Kesekretariatan TKPK Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 di kepalai oleh Sekretaris Bappeda, sedangkan kesekretariatan TKPK Propinsi berada pada Bidang Ekonomi, demikian juga dengan kesekretariatan TKPK



Kabupaten/Kota lainnya berada pada bidang yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan koordinasi dan pemahaman serta komunikasi menjadi agak berbeda.

R
R



BAB VII

ISSUE STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH

7.1. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus menjadi fokus perhatian dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Satu isu strategis dapat memuat beberapa indikator utama dalam satu bidang. Isu-isu strategis tersebut menjadi arah dari suatu hal yang akan dicapai melalui program-program secara bersama. Isu strategis dipilih dari banyak isu yang dihasilkan dari hasil analisis kemiskinan dan determinan kemiskinan pada setiap bidang, hasil evaluasi anggaran, dan kaji ulang kebijakan, yang kemudian dianalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamannya atau dianalisis faktor pendorong dan penghambatnya (Analisis SWOT) untuk selanjutnya dapat dirumuskan isu strategisnya.

Berikut adalah analisis SWOT program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya :

1. Kekuatan

- a) Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi apabila sumber daya manusia yang ada berkualitas sebagai potensi pembangunan di Kabupaten Kubu Raya;
- b) Kabupaten Kubu Raya memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, yang meliputi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, sektor pertambangan dan sektor lainnya;
- c) Posisi geografis Kabupaten Kubu Raya cukup strategis sebagai beranda terdepan Provinsi Kalimantan Barat dan berada dalam kawasan Pontianak Metropolitan Area yang berpotensi untuk pengembangan wilayah perkotaan serta akses langsung wilayah perairan Selat Karimata yang berpotensi untuk pengembangan sektor kelautan.



- d) Kondisi masyarakat yang multietnis/heterogen memiliki keberagaman budaya aset dan potensi pembangunan daerah;
 - e) Potensi tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - f) Potensi sumber pendapatan asli daerah yang cukup sebagai sumber penerimaan daerah.
2. Kelemahan
- a) Jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dengan kualitas sumber daya manusia rendah;
 - b) Keterbatasan infrastruktur dasar yang mengakibatkan keterbatasan pengembangan usaha dan pelayanan publik;
 - c) Belum tergalinya secara maksimal potensi daerah sebagai sumber-sumber pendapatan asli daerah;
 - d) Masih belum optimalnya pengelolaan hasil sumber daya alam;
 - e) Pembangunan ekonomi yang belum merata sebagai akibat rentang wilayah yang cukup luas dan terisolir;
 - f) Tingkat pengangguran yang tinggi dan minimnya lapangan pekerjaan yang dapat diserap oleh angkatan kerja yang ada;
 - g) Belum optimalnya kompetensi, sistem kinerja dan kesejahteraan aparat birokrasi;
 - h) Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan dan penyelenggaraan urusan publik;
 - i) Degradasi lingkungan terus berlangsung akibat kegiatan pemanfaatan/eksploitasi sumber daya alam;
 - j) Rendahnya produktivitas dan pemasaran hasil sumber daya alam;
 - k) Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat berpengaruh kepada kualitas keluarga, kesehatan masyarakat, lapangan pekerjaan, penyediaan fasilitas pendidikan dan fasilitas lainnya.
3. Peluang:
- a) Kerjasama/kemitraan dalam skala lokal, Kerjasama/kemitraan dalam skala lokal, regional, nasional dan global penanggulangan kemiskinan di daerah.
 - b) Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kebijakan lainnya yang berbasis daerah dalam rangka pemberdayaan, pengetasan kemiskinan masyarakat dan pembangunan daerah yang terdepan, terluas, terpencil dan terisolir.
 - c) Komitmen Global terhadap mitigasi perubahan iklim dan percepatan pencapaian tujuan Milleneum Development Goals (MDGs).
 - d) Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Masterplan Program Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia Koridor III, akan memberikan dampak ikutan bagi Kabupaten Kubu Raya;
 - e) Perekonomian regional, nasional bahkan internasional yang dapat mempengaruhi investasi dan pengembangan usaha berbasis lokal, ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan;
 - f) Pertumbuhan ekonomi regional yang relatif tinggi.



4. Ancaman :

- a) Masuknya budaya negatif sebagai pengaruh langsung dari globalisasi yang dapat mempengaruhi eksistensi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Kubu Raya;
- b) Pemberlakuan Zona Bebas Perdagangan (Free Trade Zone) mengakibatkan arus masuk barang dan jasa dari pasar internasional yang akan memberikan determinansi terhadap pasar lokal;
- c) Arus informasi yang bersifat negatif sulit dihindarkan akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi yang dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat;
- d) Perubahan iklim dan pemanasan global berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat;
- e) Angka kriminalitas, gangguan keamanan dan ketertiban yang tidak segera teratasi berpengaruh pada stabilitas wilayah dan ketentraman masyarakat.

Berbagai isu strategis dan permasalahan yang dialami masyarakat miskin pada umumnya menunjukkan bahwa kemiskinan bersumber dari ketidakberdayaan/ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, karena terbatasnya akses, persaingan usaha, mutu pelayanan dasar, kesetaraan gender dan masih banyaknya daerah yang sulit terjangkau, pesisir dan perbatasan yang dapat mempengaruhi laju penurunan angka kemiskinan.

Faktor lain yang menjadi penyebab kemiskinan adalah yang bersifat struktural, yaitu pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan, peran dan fungsi TKPK yang masih terbatas, Koordinasi antar pemangku kebijakan masih lemah, pengelolaan anggaran dan penataan kelembagaan kurang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.pada pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu juga kebutuhan energi, tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya lapangan pekerjaan yang tersedia serta belum optimalnya sektor-sektor yang berpotensi dapat mendorong pembangunan sektor ekonomi daerah, seperti sektor pertambangan, pariwisata, perikanan dan pertanian. Pembangunan ekonomi wilayah dapat dilakukan dengan pendekatan terhadap sektor unggulan komparatif wilayah. Isu-isu strategis Bidang Ekonomi, antara lain meliputi :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim investasi dan kesempatan berusaha yang lebih baik;
3. Revitalisasi pertanian dan peningkatan ketahanan pangan; dan
4. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

7.1.1. Isu Strategis Bidang Sosial Budaya

Dalam mencapai tujuan pembangunan bidang sosial budaya akan diselenggarakan dalam 10 (sepuluh) urusan pemerintahan yang akan disinergikan, meliputi: urusan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan desa serta kertransmigrasian. Isu-isu strategis bidang sosial budaya, meliputi:

1. Tingkat pendidikan wajib belajar belum dapat tercapai dengan baik;



2. Ketersediaan sarana pendidikan dan prasarana pendukung pendidikan yang masih terbatas;
3. Kualitas sarana pendidikan yang belum memadai;
4. Aksesibilitas, sarana, prasarana, tenaga dan mutu pelayanan kesehatan masih belum baik;
5. Masih terdapatnya penduduk Kabupaten Kubu Raya yang termasuk kedalam kategori miskin dan belum meratanya hasil-hasil pembangunan; dan
6. Masih tingginya angkatan kerja yang belum terserap dalam kesempatan kerja yang ada.

7.1.2. Isu Strategis Bidang Infrastruktur

Isu strategis bidang infrastruktur dikelompokkan ke dalam 6 (enam) urusan yang meliputi urusan pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, hidup dan energi serta sumber daya mineral. Beberapa isu strategis bidang infrastruktur antara lain meliputi:

1. Kuantitas dan kualitas infrastruktur darat dan air yang masih rendah dalam melayani kebutuhan masyarakat;
2. Terbatasnya pengembangan akses perhubungan untuk daerah pesisir maupun daerah terisolir lainnya akibat limitasi kondisi fisik alam;
3. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi/rawa;
4. Rendahnya pelayanan jaringan air bersih dan sanitasi;
5. Rencana pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional di Kabupaten Kubu Raya terhadap kualitas lingkungan hidup;
6. Percepatan pembangunan jalan lingkar luar (outer ring road) dan kanal lingkar luar (outer ring canal);
7. Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana, prasarana dan layanan komunikasi dan informatika di daerah pesisir maupun pulau terluar untuk melayani kebutuhan masyarakat;
8. Penurunan kualitas lingkungan hidup;
9. Meningkatnya konversi lahan-lahan produktif dalam merespon perkembangan aktivitas perkotaan;
10. Jangkauan pelayanan energi listrik yang belum optimal; dan
11. Penataan ruang yang masih belum dilaksanakan secara optimal.

7.1.3. Isu Strategis Kewilayahan

Isu strategis kewilayahan Kabupaten Kubu Raya secara geografis dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori wilayah, yaitu wilayah pesisir yang meliputi Kecamatan Sungai Kakap, Teluk Pakedai, Kubu dan Batu Ampar serta wilayah daratan yang meliputi Kecamatan Kuala Mandor B, Sungai Ambawang, Sungai Raya, Terentang dan Rasau Jaya.

7.1.3.1. Isu Strategis Wilayah Pesisir

Isu-isu strategis wilayah pesisir antara lain meliputi:

1. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang relatif lebih tinggi;
2. Belum optimalnya implementasi penanganan daerah pesisir, misalnya untuk aspek infrastruktur, pendanaan, pelayanan kesehatan, pendidikan;



3. Pemerataan pembangunan, pengembangan desa tertinggal, pengembangan wilayah perbatasan, keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan, penanganan masalah perkotaan dan kerjasama antar daerah belum terwujud;
4. Degradasi lingkungan kawasan pesisir;
5. Penetapan kawasan lindung belum diikuti oleh kebijakan yang bersifat khusus bagi kawasan yang bersangkutan;
6. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, persampahan, sanitasi, energi serta air bersih.

7.1.3.2. Isu Strategis Wilayah Daratan

Isu-isu strategis wilayah daratan antara lain meliputi:

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, persampahan, sanitasi, energi serta air bersih;
2. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk;
3. Konversi lahan-lahan pertanian produktif menjadi lahan pemukiman sebagai respon perkembangan aktivitas perkotaan.

7.2. Rencana Aksi Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan

Rencana Aksi Daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya, merupakan penjabaran dari beberapa Isu Strategis bidang penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam matrik sesuai dengan format RPJMD. Rencana aksi bidang penanggulangan kemiskinan memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, SKPD pengelola serta pagu indikatif selama 5 tahun kedepan.

Dengan disusunnya rencana aksi daerah bidang penanggulangan kemiskinan, diharapkan dapat memudahkan SKPD menerjemahkan program dan kegiatan yang berorientasi kepada penanggulangan kemiskinan dalam rencana kerja dan anggaran SKPD terkait.



Handwritten signature or initials.

Tabel 7.1
RENCANA AKSI DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	LOKASI	SKPD PENGELOLA	PAGU INDIKATIF				
						2015	2016	2017	2018z	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Menengah melalui peningkatan sarana prasarana dan tenaga pendidik, dengan memprioritaskan wilayah-wilayah terpencil	Program Pendidikan dasar	Penyelenggaraan Paket A setara SD	Kubu Raya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	54.456.000	45.200.000.000	46.330.000.000	53.279.500.000	63.935.400.000
			Penyelenggaraan Paket B setara SMP	Kubu Raya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	55.448.000	75.484.000.000	77.371.100.000	88.976.765.000	106.772.118.000
			Beasiswa Berprestasi Siswa Kurang Mampu SD dan SMP	Kubu Raya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	180.000.000.000	180.000.000.000	198.000.000.000	227.700.000.000	273.240.000.000
		Program Indonesia Pintar	Fasilitasi Pelayanan Kartu Indonesia Sejahtera dan Kartu Indonesia Pintar (KIS, KIP) SD	Kubu Raya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.615.750.000.000	3.706.143.750.000	3.798.797.343.750	4.368.616.945.313	5.242.340.334.375
			Fasilitasi Pelayanan Kartu Indonesia Sejahtera dan Kartu Indonesia Pintar (KIS, KIP) SMP	Kubu Raya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.841.750.000.000	2.912.793.750.000	2.985.613.593.750	3.433.455.632.813	4.120.146.759.375
		Program Peningkatan Kinerja Sekolah	Bantuan Operasional Sekolah Daerah (TK, SD, SMP)	Kubu Raya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.806.944.000.000	4.740.373.000.000	4.858.882.325.000.000	4.980.354.383.125.000	5.104.863.242.703.120
		Program Dikmen	Penyelenggaraan Paket C setara SMA	Kubu Raya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63.200.000.000	63.200.000.000	64.780.000.000	74.497.000.000	89.396.400.000
		Program PAUD	Pengembangan PAUD	Kubu Raya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	650.000.000.000	650.000.000.000	666.250.000.000	766.187.500.000	919.425.000.000

Handwritten signature or initials.

NO	KEBLAJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	LOKASI	SKPD PENGELOLA	PAGU INDIKATIF				
						2015	2016	2017	2018z	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pelayanan Sosial Dasar (Generasi Sehat Cerdas)	Kec. Sungai Raya Kec. Sungai Kakap Kec. Kubu Ampar Kec. Terentang	BPMPD	8.438.000.000	6.806.229.000	6.806.229.000	-	-
2	Peningkatan kualitas kesehatan Dasar, melalui peningkatan sarana prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dengan prioritas pelayanan kesehatan bayi dan Balita	Program perbaikan gizi masyarakat	Penyeragaman makanan dan vitamin	Kubu Raya	Dinas Kesehatan	312.690.500	823.801.000	864.991.050	908.240.603	953.652.633
			Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Kubu Raya	Dinas Kesehatan					
			Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi		Dinas Kesehatan					
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Penyempitan/fogging sarung nyamuk	Kubu Raya	Dinas Kesehatan	1.874.662.708	1.260.709.901	1.260.709.902	1.260.709.903	1.260.709.904
			Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Kubu Raya	Dinas Kesehatan					
			Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Kubu Raya	Dinas Kesehatan					



NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	LOKASI	SKPD PENGELOLA	PAGU INDIKATIF				
						2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	Kubu Raya	Dinas Kesehatan					
			Peningkatan imunitasi	Kubu Raya	Dinas Kesehatan					
			Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Kubu Raya	Dinas Kesehatan					
			Pelaksanaan Pengobatan Pencegahan Masal Filaria atau kaki gajah	Kubu Raya	Dinas Kesehatan					
		Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Jaminan kesehatan penduduk miskin	Kubu Raya	Dinas Kesehatan	10.998.951.21 4	1.458.990.250	1.458.990.251	1.458.990.252	1.458.990.253
	Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)		Kubu Raya	Dinas Kesehatan						
	Jaminan Persalinan (Jampersal)		Kubu Raya	Dinas Kesehatan						
	Pelayanan kesehatan non kapitasi persalinan		Kubu Raya	Dinas Kesehatan						
		Pelayanan kesehatan non kapitasi rawat inap	Kubu Raya	Kubu Raya	Dinas Kesehatan					
		Pelayanan kesehatan non kapitasi rujukan pasien BPJS	Kubu Raya	Kubu Raya	Dinas Kesehatan					
		Fasilitasi Kartu Indonesia Sehat	Kubu Raya	Kubu Raya	Dinas Kesehatan					
		Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Kubu Raya	Kubu Raya	Dinas Kesehatan	403.687.980	1.657.716.610	1.823.488.271	2.006.837.098	2.206.420.808



NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	LOKASI	SKPD PENGELOLA	PAGU INDIKATIF				
						2015	2016	2017	2018	2019
						7	8	9	10	11
1	2	3 dan anak	4 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu Pelayanan pra persalinan Surveilans Bumil Resiko tinggi Penyuluhan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi Pertemuan audit maternal perinatal	5 Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya	6 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan	7	8	9	10	11
3	Peningkatan kualitas pelayanan KB untuk meningkatkan Peserta KB Baru maupun Peserta KB Aktif khususnya MKJP dengan memprioritaskan Keluarga Pra KS dan KS I (Keluarga Miskin)	Keluarga Berencana	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Pelayanan KIE (Konseling, Informasi dan Edukasi) Pembinaan Keluarga Berencana Bulan Bhakti Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB (IUD dan Implant) Pelayanan KB Medis Operasi (MOW/MOP)	Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya	BP2AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB	55.000.000	53.599.400	60.000.000	80.000.000	100.000.000
						34.500.000	33.978.000	50.000.000	70.000.000	90.000.000
						51.000.000	43.986.000	60.000.000	80.000.000	90.000.000
						60.000.000	95.000.000	110.000.000	130.000.000	150.000.000
						57.000.000	88.800.000	100.000.000	120.000.000	150.000.000
						30.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000	90.000.000



TR 7

NO	KEBLAJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	LOKASI	SKPD PENGELOLA	PAGU INDIKATIF				
						2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Posyandu	Kubu Raya	BP3AKB	1.210.160.000	35.100.000	60.000.000	75.000.000	95.000.000
		Penyiapan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok UPPKS	Kubu Raya	BP3AKB	30.000.000	40.440.000	60.000.000	80.000.000	100.000.000
		Kespro Remaja	Advokasi dan KIE tentang Kespro Remaja	Kubu Raya	BP3AKB	20.000.000	18.030.000	30.000.000	50.000.000	70.000.000
		Pengembangan Pusat Konseling Remaja	Pendirian PIK Remaja	Kubu Raya	BP3AKB	30.000.000	35.000.000	50.000.000	70.000.000	90.000.000
		Promosi KHIBA	Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak	Kubu Raya	BP3AKB	35.000.000	26.120.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000
		Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	9 Kecamatan	BP3AKB	-	40.000.000	70.000.000	90.000.000	100.000.000
			Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Pemanfaatan Lahan Lingskung	1 Desa 9 Kecamatan	BP3AKB	25.000.000	30.000.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000



77

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	LOKASI	SKPD PENGELOLA	PAGU INDIKATIF				
						2015	2016	2017	2018%	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Peningkatan Kualitas Hidup dan Perindungan Perempuan	Pengajian Strategi Pengembangan Lingkungan Sehat melalui GSI	9 Kecamatan	BP3AKB	58.000.000	65.000.000	70.000.000	73.000.000	75.000.000
		Penguatan Kelembagaan Pengarusstamaan Gender dan Anak	Pelatihan dan Pendidikan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	9 Kecamatan	BP3AKB	-	49.120.000	52.000.000	55.000.000	60.000.000
		Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha	9 Kecamatan	BP3AKB	-	20.000.000	22.000.000	23.000.000	25.000.000
4	Peningkatan Aksesibilitas antar wilayah, melalui peningkatan sarana prasarana jalan, sarana prasarana dasar perumahan dan moda transportasi, dengan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan Lingkungan	Kubu Raya	Cipta Karya	34.887.001.600	40.120.051.840	46.138.059.616	53.058.768.558	61.017.583.842
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pembangunan Jembatan	Kubu Raya	Cipta Karya	7.701.568.500	8.856.803.775	10.185.324.341	11.713.122.992	13.470.091.441
			Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Perdesaan	Kubu Raya	Cipta Karya	108.919.900	125.257.885	144.046.567	165.653.552	190.501.585

TR 7

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	LOKASI	SKPD PENGELOLA	PAGU INDIKATIF				
						2015	2016	2017	2018	2019
1	2 memprioritaskan Rumah Tangga miskin dan daerah-daerah yang sulit dijangkau	3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	4 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	5 Kubu Raya	6 Cipta Karya	7 430.151.400	8 4.946.744.110	9 568.875.226	10 654.206.510	11 752.337.487
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	Kubu Raya	Cipta Karya	1.886.478.900	2.169.450.735	2.492.868.345	2.869.098.597	3.299.463.386
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perbaikan Perumahan dan Perumahan Tidak Layak Huni	Kubu Raya	Cipta Karya	325.850.000	374.727.500	430.936.625	495.577.118	569.913.686
5	Peningkatan Penyediaan Lapangan Pekerjaan Melalui Peningkatan Investasi, Peningkatan Keterampilan SDM dan Peningkatan Alokasi Belanja Modal, Dengan Memprioritaskan Pertumbuhan Wirausaha Baru dan	Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Workshop penyusunan kemas produk Pelatihan keterampilan UKM Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi Bimtek pengembangan kerajinan daerah Bimtek wirausaha potensial	Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya	Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM	464.594.200	511.331.600	562.000.000	618.000.000	680.000.000
						840.000.000	870.000.000	900.000.000	930.000.000	960.000.000



Handwritten signature/initials

NO	KEBLAJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	LOKASI	SKPD PENGELOLA	PAGU INDIKATIF				
						2015	2016	2017	2018z	2019
1	2 Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif	3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	4 Temu Usaha Pengusaha dengan UMKM	5 Kubu Raya	6 Koperasi dan UMKM	7 59.000.000	8 85.000.000	9 110.000.000	10 145.000.000	11 199.000.000
6	Pemanfaatan Sumber Daya Lokal, melalui diversifikasi pangan dengan memprioritaskan daerah rawan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Kegiatan Peningkatan Produksi Beras Nasional Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Kegiatan Pengembangan Pembibitan / Pembibitan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Mutu P2HP Pertanian Hortikultura Pengembangan Kawasan Agribisnis Pertanian Kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian unggul	Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya	Distannak Distannak Distannak Distannak Distannak Distannak Distannak Distannak	-	100.000.000 350.000.000 200.000.000 495.000.000 70.000.000 4.000.000.000 300.000.000	125.000.000 400.000.000 300.000.000 660.000.000 80.000.000 4.100.000.000 200.000.000	150.000.000 400.000.000 200.000.000 660.000.000 90.000.000 4.000.000.000 150.000.000	175.000.000 500.000.000 200.000.000 660.000.000 100.000.000 4.000.000.000 150.000.000



RP 7

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	LOKASI	SKPD PENGELOLA	PAGU INDIKATIF				
						2015	2016	2017	2018	2019
						7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			daerah							
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Kegiatan Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering	Kubu Raya	Distannak	799.000.000	918.000.000	1.055.000.000	1.214.000.000	1.396.000.000
			Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija	Kubu Raya	Distannak	-	825.000.000	990.000.000	1.188.000.000	1.425.000.000
			Penguatan dan Pemberdayaan Brigade Proteksi Tanaman	Kubu Raya	Distannak	147.060.000	16.177.000	177.940.000	195.740.000	215.310.000
			Pemberdayaan sumber daya lokal	Kubu Raya	Distannak	33.000.000	40.000.000	44.000.000	49.000.000	53.000.000
			Pengawasan peredaran Pupuk dan Pestisida (Tim)	Kubu Raya	Distannak	265.000.000	275.000.000	285.000.000	295.000.000	300.000.000
			Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DFI	Kubu Raya	Distannak	219.000.000	241.000.000	265.000.000	291.000.000	320.000.000
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan Produksi Peternakan	Kubu Raya	Distannak	285.000.000	300.000.000	315.000.000	330.000.000	345.000.000
			Kegiatan Pengawasan Lalu Lintas Ternak	Kubu Raya	Distannak	56.000.000	65.000.000	75.000.000	85.000.000	90.000.000
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kubu Raya	Distannak	50.000.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000



TR 7

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	LOKASI	SKPD PENGELOLA	PAGU INDIKATIF				
						2015	2016	2017	2018z	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kegiatan Pekan Promosi / Pameran / Visualisasi Produk Peternakan	Kubu Raya	Distannak	180.000.000	60.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
			Kegiatan Pembinaan Penataan dan Pengembangan Penyebaran Ternak	Kubu Raya	Distannak	-	1.051.000.000	1.103.000.000	1.158.000.000	1.215.000.000
		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kubu Raya	Dinas Perikanan dan Kelautan	2.394.332.000	626.596.660	1.150.000.000	950.000.000	950.000.000
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kegiatan Pengadaan Alat Penangkapan Ikan	Kubu Raya	Dinas Perikanan dan Kelautan	554.400.000	919.920.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Laut	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Kubu Raya	Dinas Perikanan dan Kelautan	326.561.000	396.940.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Air Tawar, Air Payau dan Air Laut	Kubu Raya	Dinas Perikanan dan Kelautan	809.484.000	1.176.608.400	1.600.000.000	1.850.000.000	2.250.000.000
		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Perikanan	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Perikanan	Kubu Raya	Dinas Perikanan dan Kelautan	596.600.000	263.000.000	350.000.000	500.000.000	550.000.000
			Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan	Kubu Raya	Dinas Perikanan dan Kelautan	459.000.000	237.875.000	500.000.000	600.000.000	750.000.000
7	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi,	Pengembangan pemasaran pariwisata	Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan luar daerah	Kubu Raya	Disparekrappora	80.000.000	13.527.300	150.000.000	165.000.000	175.000.000



[Handwritten signature]

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	LOKASI	SKPD PENGELOLA	PAGU INDIKATIF				
						2015	2016	2017	2018z	2019
						7	8	9	10	11
1	2 melalui peningkatan sarana prasarana pasar tradisional, kuliner dengan prioritas pertumbuhan wirausaha baru dan pertumbuhan investasi	3	4 Pengembangan dan penguatan event pariwisata tingkat provinsi Kalimantan Barat	5 Kubu Raya	6 Disparekrafpورا	7 38.000.000	8 55.000.000	9 65.000.000	10 75.000.000	11 95.000.000
		Pengembangan destinasi pariwisata	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Kubu Raya	Disparekrafpورا	40.000.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000	75.000.000
		Program pengembangan kemitraan pariwisata	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Kubu Raya	Disparekrafpورا	-	497.808.000	80.000.000	90.000.000	100.000.000
			Pembinaan terhadap usaha/ kegiatan di bidang pariwisata	Kubu Raya	Disparekrafpورا	25.000.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000	65.000.000
		Program pengembangan sumber daya ekonomi kreatif	Bimtek Pengembangan Industri Kreatif	Kubu Raya	Disparekrafpورا	40.000.000	40.000.000	55.000.000	60.000.000	60.000.000
			Promosi ekonomi kreatif	Kubu Raya						
		Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pembinaan dan Pelatihan IKM	Kubu Raya	Disperindag	-	41.286.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000
		Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Fasilitasi Perizinan IKM	Kubu Raya	Disperindag	-	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000



[Handwritten signature]

NO	KEBUJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	LOKASI	SKPD PENGELOLA	PAGU INDIKATIF				
						2015	2016	2017	2018z	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Kegiatan Pasar Murah	Kubu Raya	Disperindag	-	129.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000
			Pembinaan PKL	Kubu Raya	Disperindag	-	30.000.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000

TR

BAB VIII

SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

8.1. Mekanisme dan Prosedur Monitoring

Berbagai upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dapat dimaksimalkan bila diikuti dengan pelaksanaan monitoring secara rutin, berkala dan berkelanjutan, serta adanya upaya perbaikan pelaksanaan yang ditindaklanjuti dari hasil evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Dua kata tersebut yaitu Monitoring dan Evaluasi, merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan target kinerja yang ingin dicapai.

Monitoring dan evaluasi atau pemantauan adalah kegiatan observasi berkelanjutan atas sejumlah indikator terkait status pelaksanaan dan kemajuan sebuah program, dalam kurun waktu tertentu baik regular maupun tematik untuk memberikan informasi pada pengelola serta pemangku kepentingan mengenai capaian-capaian program. Selanjutnya informasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk perbaikan maupun peningkatan efektivitas proses implementasi dari program.

Aktivitas pada kegiatan pemantauan ini dapat meliputi supervisi di lapangan, pengisian instrument pemantauan, uji petik, dan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh tim koordinasi pemantauan pusat dan daerah serta tim teknis daerah.

Tujuan pemantauan adalah untuk mendapatkan informasi terkait proses pelaksanaan program percepatan dan perluasan perlindungan social (P4S) dan program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) mulai dari distribusi kartu hingga pelaksanaan program-program yang berafiliasi dengan P4S seperti Raskin, BSM, PKH dan BLSM, menyangkut kesesuaian prosedur dan kualitas pelaksanaan program. Sedangkan tujuan khusus pemantauan adalah :

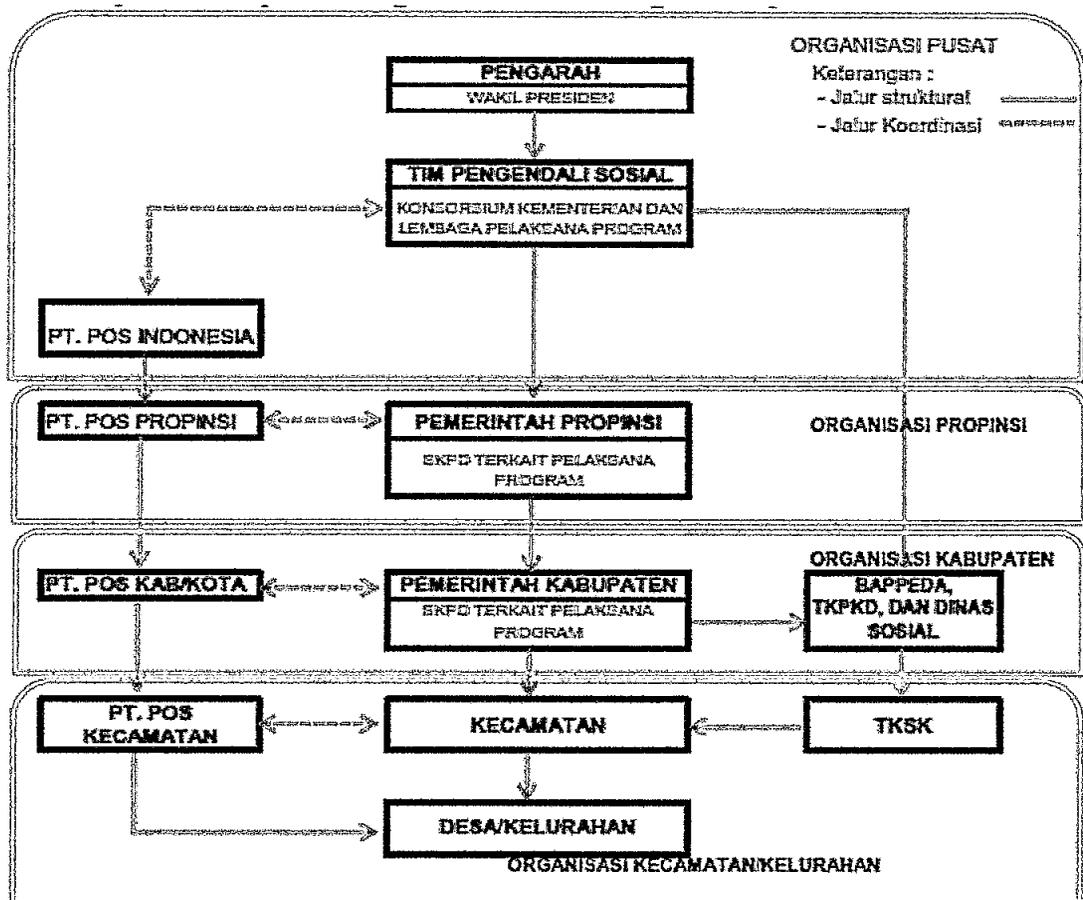
1. Memastikan bahwa program dijalankan sesuai dengan desain yang ditentukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Member informasi kepada pengelola program jika ada hambatan yang membuat program tidak berjalan sesuai rencana, agar tindakan-tindakan koreksi bias segera diambil.
3. Dokumentasi untuk memberikan pembelajaran bagi perbaikan pelaksanaan program/kebijakan serupa dimasa mendatang.



- Kegiatan pemantauan akan dapat berjalan, bila ada kelembagaan yang berfungsi melakukan pemantauan secara aktif, baik ditingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai pada tingkat Kecamatan serta Desa/Kelurahan.

Kegiatan pemantauan akan dapat berjalan, bila ada kelembagaan yang berfungsi melakukan pemantauan secara aktif, baik ditingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai pada tingkat Kecamatan serta Desa/Kelurahan. Organisasi/kelembagaan pelaksana pemantauan di berbagai level pemerintahan lebih jelas dapat dilihat pada gambar 8.1

Gambar 8.1
Organisasi/kelembagaan pelaksana pemantauan program percepatan dan perluasan perlindungan social di berbagai level pemerintahan



Ditingkat Pusat kelembagaan pelaksana pemantauan adalah Tim Pengendali Sosial, berada di sekretariat TNP2K yang terdiri dari kelompok kerja monitoring dan evaluasi, Tim Advokasi TNP2K dan Kelompok Kerja Bantuan Sosial Kluster I.



Ditingkat Provinsi dukungan terhadap keberhasilan P\$S dan BLSM menjadi tanggungjawab Gubernur dan TKPK Provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota dan TKPK Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3150/SJ tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Gubernur selaku penanggungjawab TKPK Provinsi memberikan arahan kepada TKPK Provinsi (yang diketuai oleh Wakil Gubernur) untuk berkoordinasi dengan PT.POS Indonesia di tingkat Provinsi, dan SKPD di Lingkup Provinsi serta arahan kepada Bupati/Walikota selaku penanggungjawab TKPK Kabupaten/Kota di wilayah provinsi tersebut, menyangkut koordinasi dan pengendalian P4S dan BLSM. TKPK Provinsi dalam hal ini bertanggungjawab melakukan pemantauan dan supervise terhadap kegiatan pemantauan, sebagai bagian penting dari tugas koordinasi dan pengendalian yang dilakukan oleh TKPK Kabupaten/Kota.

Arahan yang diberikan oleh penanggungjawab TKPK Kabupaten/Kota bertujuan untuk mendorong pelaksanaan pemantauan P4S di tingkat Kabupaten/Kota. Selanjutnya Bupati dan Walikota memberikan arahan kepada TKPK Kabupaten/Kota (yang diketuai oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota) untuk berkoordinasi dengan SKPD dan Camat terkait di Kabupaten/Kota bersangkutan, kemudian diteruskan kepada Kepala Desa/Kelurahan.

Ketua TKPK Kabupaten/Kota bertanggungjawab menggerakkan fungsi TKPK dalam pelaksanaan pemantauan P4S di tingkat Kabupaten sebagai satuan wilayah pemerintahan yang dapat menjangkau sampai tingkat penerima manfaat program, dalam bentuk kegiatan-kegiatan teknis pemantauan dan pengendalian yang melibatkan pelaksana program yaitu SKPD terkait seperti Dinas Sosial dan Camat. Ketua TKPK Kabupaten/Kota menunjuk Tim teknis dari sekretariat TKPK sebagai Koordinator pemantauan pelaksanaan P4S di tingkat Kabupaten/Kota.

Camat diarahkan untuk menugaskan minimal satu orang pelaksana pemantauan pelaksanaan P4S di Tingkat kecamatan. Pelaksana tersebut bertugas melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kantor Pos tingkat Kecamatan serta TKSK, terkait hal teknis seperti pemantauan lapangan, pelaporan dan administrasi data.

Metode Pemantauan dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti survey, metode partisipatif, analisis anggaran, dan kunjungan lapangan. Namun demikian, untuk keperluan pemantauan program oleh pemerintah, metode kunjungan lapangan lebih sering direkomendasikan. Ada beberapa alasan untuk ini, selain karena metodologinya yang digunakan dalam metode ini relative sederhana, sumberdaya (waktu, dana dan manusia) yang diperlukan juga relative lebih kecil daripada pemantauan lainnya. Dengan persiapan matang metode kunjungan lapangan juga dapat menghasilkan informasi yang akurat.



Kunjungan lapangan yang dilakukan, tidak untuk menggantikan pemantauan yang secara regular dilakukan oleh TKPK, namun dapat bersifat insidental, ketika penyelenggara program di tingkat daerah ingin mengetahui, apakah penyebab suatu kejadian yang sering muncul dalam pemantauan regular.

8.2. Indikator Monitoring

Indikator monitoring dilakukan terhadap 2 (dua) katagori yaitu : (1) Indikator Monitoring terhadap Program-Program Pemerintah khususnya Klaster I meliputi dan (2) Indikator Monitoring Program-program Daerah dari Rencana Aksi yang sudah dibuat.

8.2.1 Indikator Monitoring Program-Program Pemerintah

Indikator monitoring terhadap program pemerintah dilakukan terhadap program di cluster 1 sebaga berikut :

- Aspek Pemantauan menurut Fokus pemantauan PKH

Fokus Pemantauan Fokus	Aspek Pemantauan	Sumber Data dan Informasi
Pemenuhan Kewajiban oleh Peserta PKH	<p>Komponen Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase Ibu hamil yang diverifikasi ▪ Persentase Balita dan anak prasekolah (0-6 thn) yg diverifikasi ▪ Persentase anak peserta PKH usia 0-6 tahun yg tidak dapat memenuhi komitmen sesuai protokol kesehatan ▪ Persentase Ibu Hamil yg tidak dapat memenuhi komitmen sesuai protokol kesehatan ▪ Faktor-faktor yg mempengaruhi tinggi rendahnya pemenuhan kewajiban peserta PKH ▪ Kendala-kendala yg dialami oleh peserta PKH untuk memenuhi kewajibannya di bidang kesehatan. 	<p>Sumber Data</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Data sekunder dari data administrasi peserta PKH pd Dinas Sosial ▪ Wawancara dengan pelaksana PKH pada Dinas Sosial, Fasilitator PKH. ▪ Wawancara dengan penerima PKH
	<p>Komponen Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase siswa yang tidak dapat memenuhi komitmen kehadiran, berdasarkan kelas, tk.Sekolah, Kecamatan ▪ Persentase siswa yang keluar dari program, berdasarkan tingkatan sekolah dan kecamatan. ▪ Faktor-faktor yg mempengaruhi pemenuhan kewajiban kehadiran di sekolah. ▪ Kendala-kendala yg dialami oleh peserta PKH untuk memenuhi kewajibannya di bidang pendidikan. 	
Pembayaran bantuan kepada peserta PKH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketepatan waktu pembayaran. ▪ Persentase peserta yang mengambil pembayaran. ▪ Persentase peserta PKH yang 	<p>Sumber Data</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Data sekunder dari data administrasi peserta PKH pd Dinas



P 7

	<ul style="list-style-type: none"> mendapatkan potongan bantuan karena tidak memenuhi kewajiban sbg peserta PKH. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran bantuan. 	<p>Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> Wawancara dengan pelaksana PKH pada Dinas Sosial, Fasilitator PKH. Wawancara dengan penerima PKH
Komplementaritas PKH dengan program lain dalam klaster I	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penerima PKH yang memiliki kartu jamkesmas Persentase jumlah anak SD dari keluarga PKH yg mendapat BSM Persentase jumlah anak SMP dari keluarga PKH yg mendapat BSM Persentase penerima PKH yg mendapat Raskin 	<p>Sumber Data</p> <ul style="list-style-type: none"> Data sekunder dari data administrasi peserta PKH pd Dinas Sosial Wawancara dengan pelaksana PKH pada Dinas Sosial, Fasilitator PKH. Wawancara dengan penerima PKH
Kontribusi Pemda dalam pelaksanaan PKH	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi masalah-masalah dan tantangan dlm operasional pelaksanaan PKH Penambahan petugas fasilitas kesehatan untuk mendukung PKH Penambahan guru untuk mendukung PKH Kontribusi yg sudah diberikan Pemda untuk operasional pelaksanaan PKH 	<p>Sumber Data</p> <ul style="list-style-type: none"> Data sekunder dari data administrasi peserta PKH pd Dinas Sosial Wawancara dengan pelaksana PKH pada Dinas Sosial, Fasilitator PKH. Wawancara dengan penerima PKH
Kepemilikan Identitas kependudukan bagi peserta PKH	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah peserta PKH yg tidak memiliki KTP Upaya-upaya yg dilakukan untuk membantu mendapatkan KTP Hambatan-hambatan untuk memperoleh KTP 	<p>Sumber Data</p> <ul style="list-style-type: none"> Data sekunder dari peserta PKH pd Dinas Sosial Wawancara dengan pelaksana PKH pada Dinas Sosial, Fasilitator PKH. Wawancara dengan penerima PKH

▪ Aspek dan Indikator Pemantauan program Jamkesmas

Fokus Pemantauan Fokus	Aspek Pemantauan	Sumber Data dan Informasi
Kepesertaan	<ul style="list-style-type: none"> Kartu Jamkesmas terdistribusi 100% Tercakupnya penduduk miskin dalam program jaminan kesehatan Adanya unit pengaduan terkait validasi data peserta dan ketepatan sasaran Kesesuaian data peserta dengan identitas Peserta memahami haknya dan memahami prosedur untuk mendapatkannya Adanya alternative jaminan kesehatan bagi warga miskin yg tdk tercakup jamkesmas. 	
Akses ke Fasilitas kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya data jaringan FASKES yg melakukan kerjasama dan yg tidak melakukan kerjasama. Terlayannya peserta jamkesmas di seluruh FASKES jejaring. Tidak ada 	



R →

	<ul style="list-style-type: none"> penolakan peserta JAMKESMAS yg membutuhkan pelayanan kesehatan. ▪ Terselenggaranya pelayanan berjenjang yang efektif. 	
Pembayaran dana ke PPK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses Klaim dan pelaporan oleh FASKES sesuai jadwal. Tersedianya APBD untuk mendukung penyelenggaraan Jamkesmas. ▪ Peserta Jamkesmas tidak boleh dipungut biaya tambahan. 	

▪ Aspek Pemantauan Program BSM

Fokus Pemantauan Fokus	Aspek Pemantauan	
Ketepatan sasaran dan proses penetapan sasaran	Memastikan sasaran/siswa penerima BSM berasal dari keluarga miskin sesuai data dari TNP2K dengan mekanisme pengiriman kartucalon penerima BSM	
Ketepatan jumlah/nilai bantuan yg diterima oleh siswa	Mamastikan siswa menerima jumlah bantuan sesuai dengan yang ditetapkan.	
Ketepatan waktu penyaluran BSM	Memastikan waktu penyaluran sesuai dengan ketentuan	
Keberlanjutan bantuan antar jenjang	Memastikan keberlanjutan sasaran/siswa penerima BSM, untuk memastikan keberlanjutan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs dan ke SMA/MA	
Komplementaritas program	Memastikan orangtua siswa yg menerima BSM juga menerima PKH, RASKIN dan Jamkesmas.	
Keterjangkauan BSM untuk anak di luar sekolah	Memastikan orangtua mendaftarkan anaknya ke sekolah karena adanya kepastian memperoleh BSM.	

8.2.2 Indikator Monitoring Program Daerah dari RAD

Pemantauan dan evaluasi terhadap indikator program daerah yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah diharapkan dapat menunjang pencapaian indikator-indikator penunjang dari program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya, seperti yang tertuang pada Tabel 8.1.



ra

Tabel 8.1
Indikator dan Target Kinerja Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Kegiatan pokok	Skpd pengelola	PAGU INDIKATIF											
							2015		2016		2017		2018		2019			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Menengah melalui peningkatan sarana prasarana dan tenaga pendidik, dengan memprioritaskan wilayah-wilayah terpencil	Meningkatnya APM Pendidikan dasar dan Menengah Desa Intervensi	Meningkatnya Persentase anak usia 7-12 tahun yang bersekolah menjadi 100% pada akhir tahun 2019	Program Pendidikan dasar	Penyelingg anan Paket A setara SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					Penyelingg anan Paket B setara SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10 klp	54.455,000	10 klp	45.200,000,00	10 klp	46.330,000,00	10 klp	55.275,500,000	10 klp	63.935,400,000		
					Basiswa Berprestasi Siswa Kurang Mampu SD dan SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10 klp	55.448,000	10 klp	75.484,000,00	10 klp	77.371,100,000	10 klp	88.976,765,000	10 klp	106.772,118,000		
					Fasilitas Kartu Indonesia Sejahtera dan Kartu Indonesia Pintar (KIS, KIP) SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 kegiatan	180,000,000,000	1 kegiatan	180,000,000,000	1 kegiatan	198,000,000,000	1 kegiatan	227,700,000,000	1 kegiatan	273.240,000,000		
				Program Indonesia Pintar	Fasilitas Kartu Indonesia Sejahtera dan Kartu Indonesia Pintar (KIS, KIP) SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 kegiatan	3.615,750,00,000	1 kegiatan	3.706,143,750,000	1 kegiatan	3.798,797,343,750	1 kegiatan	4.368,616,945,313	1 kegiatan	5.242.349,334,375		
				Program Peningkatan Kinerja Sekolah	Fasilitas Pelayanan Kartu Indonesia Sejahtera dan Kartu Indonesia Pintar (KIS, KIP) SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 kegiatan	2.841,750,00,000	1 kegiatan	2.912,793,750,000	1 kegiatan	2.985,613,593,750	1 kegiatan	3.433,455,632,813	1 kegiatan	4.120,146,759,375		
					Bantuan Operasional 1 Sekolah Daerah (TUK, SD, SMP)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 kegiatan	1.806,944,00,000	2 kegiatan	4.740,373,000,000	2 kegiatan	4.858,882,325,000,000	2 kegiatan	4.980,354,383,125,000	2 kegiatan	5,104,563,242,703,120		



TP 7

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Kegiatan pokok	Skpd pengelola	PAGU INDIKATIF											
							2015		2016		2017		2018		2019			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				misikin	Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)	Dinas Kesehatan												
					Jaminan Persalinan (JamPersal)	Dinas Kesehatan												
					Pelayanan kesehatan non kapitasi persalinan	Dinas Kesehatan												
					Pelayanan kesehatan non kapitasi rawat inap	Dinas Kesehatan												
					Pelayanan kesehatan non kapitasi rujukan pasien BPJS	Dinas Kesehatan												
					Fasilitasi Kartu Indonesia Sehat	Dinas Kesehatan												
				Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Dinas Kesehatan												
					Perolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	Dinas Kesehatan		403,687,980		1,657,716,610		1,823,488,271		2,005,887,098		2,206,420,808		
					Pelayanan pra	Dinas Kesehatan	57%		58%		62%		65%		70%			



[Handwritten signature]

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Kegiatan pokok	Skpd pengelola	PAGU INDIKATIF											
							2015		2016		2017		2018		2019			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					persalinan													
					Surveilans Bumil Resiko tinggi	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Penyuluhan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Pertemuan audit maternal perinatal	Dinas Kesehatan	75,65%	80,00%	85,00%	88,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%		
3	Peningkatan kualitas pelayanan KB untuk KB utuk meningkatkan Peserta KB Baru maupun Peserta KB Aktif Khususnya MKJP dengan memprioritaskan Keluarga Pra KS dan KSI (Keluarga Miskin)	Jumlah Peserta KB Baru dan KB Aktif PUS	Meningkatnya Jumlah Peserta KB Aktif Per PUS sebesar 100% di akhir tahun 2019	Keluarga Berencana	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	BP3AKB	55,000,000	53,599,400	60,000,000	80,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000		
		Pelayanan Kontrasepsi	Tercapainya Pelayanan Kontrasepsi PUS		Pelayanan KIE (Konseling, Informasi dan Edukasi)	BP3AKB	34,500,000	33,978,000	50,000,000	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%		
		Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Terselenggaranya advokasi KB/KR mandiri		Pembinaan Keluarga Berencana	BP3AKB	51,000,000	43,986,000	60,000,000	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%		
					Bulan Bhakti Keluarga Berencana dan Keluarga	BP3AKB	60,000,000	95,000,000	110,000,000	130,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Kegiatan pokok	Skpd pengelola	PAGU INDIKATIF											
							2015		2016		2017		2018		2019			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					Sejahtera													
				Felayanan Kontrasepsi	Felayanan Pemasangan Kontrasepsi KB (IUD dan Implant)	BP3AKB	25%	57,000,000	30%	88,800,000	35%	100,000,000	40%	120,000,000		150,000,000		
					Felayanan KB Medis Operasi (MCW/MOP)	BP3AKB		30,000,000		40,000,000		60,000,000		80,000,000		90,000,000		
				Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Felayanan KB/KK yang mandiri	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Posyandu	BP3AKB	2 kali	1,210,160,000	2 kali	35,100,000	2 kali	60,000,000	2 kali	75,000,000	2 kali	95,000,000		
				Penyiapan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok UPPKS	BP3AKB	-	30,000,000	-	40,440,000	-	60,000,000	-	80,000,000	-	100,000,000		
				Kespro Remaja	Advokasi dan KIE tentang Kespro Remaja	BP3AKB	45%	20,000,000	50%	18,030,000	55%	30,000,000	60%	50,000,000	65%	70,000,000		
				Pengembangan Pusat Konseling Remaja	Pendirian PIK Remaja	BP3AKB	1 kegiatan	30,000,000	1 kegiatan	35,000,000	1 kegiatan	50,000,000	1 kegiatan	70,000,000	1 kegiatan	90,000,000		
				Promosi KHIBA	Penyuluhan Kesehatan Ibu dan	BP3AKB	1 kali	35,000,000	1 kali	25,120,000	1 kali	40,000,000	1 kali	60,000,000	1 kali	80,000,000		



Handwritten signature/initials

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Kegiatan pokok	Skpd pengelola	PAGU INDIKATIF											
							2015		2016		2017		2018		2019			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					Anak													
					Perwujudan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	BP3AKB				40,000,000		70,000,000		90,000,000		100,000,000		
					Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan				9 kali	20,000,000	9 kali	22,000,000	9 kali	23,000,000	9 kali	25,000,000		
					Peningkatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Pemantapan Lahan Lingkungan	BP3AKB	9 kali	25,000,000		30,000,000		50,000,000		60,000,000		70,000,000		
					Pengkajian Strategi Pengembangan Lingkungan Sehat melalui GSI	BP3AKB	2 kali	58,000,000	3 kali	65,000,000	4 kali	70,000,000	5 kali	73,000,000	6 kali	75,000,000		
					Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	BP3AKB			50%	49,120,000	65%	55,000,000	70%	55,000,000	85%	60,000,000		



Handwritten signature/initials

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Kegiatan pokok	Skpd pengelola	PAGU INDIKATIF											
							2015		2016		2017		2018		2019			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
4	Peningkatan Aksesibilitas antar wilayah, melalui peningkatan sarana prasarana jalan, sarana prasarana dasar perumahan dan moda transportasi, dengan memprioritaskan Kumah Tangga miskin dan daerah-daerah yang sulit dijangkau	Infrastruktur transportasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	Bertambahnya infrastruktur transportasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	Program Pengembangan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan Perumahan dan Infrastruktur Perdesaan Program Pengembangan Kinerjanya Pengelolaan Air Minum dan Limbah Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Perumahan dan Jembatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Perdesaan Pelayanan Pasaran dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pelayanan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Perbaikan Perumahan dan Perumahan Tidak Layak Huni	Cipta Karya Cipta Karya Cipta Karya Cipta Karya Cipta Karya Cipta Karya Cipta Karya	-	34.887.001,600	-	40.120.051,840	-	46.338.059,616	-	53.058.768,558	-	61.017.583,842		
							-	7.701.568,500	-	8.856.809,775	-	10.185.324,941	-	11.713.122,992	-	13.470.091,441		
							-	108.919,900	-	125.257,885	-	144.046,567	-	165.663,552	-	190.501,585		
							-	430.151,400	-	4.946,744,110	-	568.875,226	-	654.206,510	-	752.337,487		
							-	1.886.478,900	-	2.169.450,735	-	2.492.868,345	-	2.869.098,597	-	3.299.463,386		
							-	325.850,000	-	374.727,500	-	430.936,625	-	495.377,118	-	569.913,686		



RP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Kegiatan pokok	Skpd pengelola	PAGU INDIKATIF											
							2015		2016		2017		2018		2019			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	stok daerah rawan pangan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Meningkatnya kesejahteraan petani dan peternak		Penanaman dan Pengolahan Hasil Pertanian		1 kegiatan	421.000,000	1 kegiatan	200.000,000	1 kegiatan	300.000,000	1 kegiatan	200.000,000	1 kegiatan	200.000,000		
					Pengembangan Kegiatan Pangan		19,278 ton	350.000,000	20 ton	495.000,000	21 ton	660.000,000	22 ton	660.000,000	23 ton	660.000,000		
			Deversifikasi pertanian		Pengembangan Kegiatan Pembenihan													
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Mutu PaHP Pertanian/ Hortikultura		1 kegiatan	60.000,000	1 kegiatan	70.000,000	1 kegiatan	80.000,000	1 kegiatan	90.000,000	1 kegiatan	100.000,000		
			Meningkatkan sarana pendukung pertanian dan peternakan		Pengembangan Kawasan Agribisnis Pertanian		12 unit	3.874.000,000	15 unit	4.000.000,000	15 unit	4.100.000,000	15 unit	4.000.000,000	15 unit	4.000.000,000		
					Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah		8 pameran	550.000,000	10 pameran	300.000,000	10 pameran	200.000,000	8 pameran	150.000,000	8 pameran	150.000,000		
					Kegiatan Pengembangan Peranian pada Lahan Kering		30 orang	799.000,000	30 orang	918.000,000	30 orang	1.055.000,000	30 orang	1.214.000,000	30 orang	1.396.000,000		
					Kegiatan Pengembangan		-	0	1500 ku	825.000,000	1600 ku	990.000,000	1700 ku	1.188.000,000	1800 ku	1.425.000,000		



TP 7

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Kegiatan pokok	Skpd pengelola	PAGU INDIKATIF											
							2015		2016		2017		2018		2019			
							Target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					Intensifikasi Tanaman Padi Palawija Penguatan dan Pemberdayaan Brigade Proteksi Tanaman Pemberdayaan sumber daya lokal Pengawasan peredaran Pupuk dan Pestisida (Um) Penguatan Perindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DFI	Distanak	54 kali	147,060,000	57 kali	16,177,000	60 kali	177,940,000	63 kali	195,740,000	65 kali	215,310,000		
					Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kegiatan Pengawasan Lintas Ternak Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Distanak	1 kegiatan	33,000,000	1 kegiatan	40,000,000	1 kegiatan	44,000,000	1 kegiatan	49,000,000	1 kegiatan	53,000,000		
						Distanak	10 sample	265,000,000	12 sample	275,000,000	15 sample	285,000,000	20 sample	295,000,000	25 sample	300,000,000		
						Distanak	1 kegiatan	219,000,000	1 kegiatan	241,000,000	1 kegiatan	265,000,000	1 kegiatan	291,000,000	1 kegiatan	320,000,000		
					Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan	Distanak	1 kegiatan	285,000,000	1 kegiatan	300,000,000	1 kegiatan	315,000,000	1 kegiatan	330,000,000	1 kegiatan	345,000,000		
						Distanak	Waslalnak k 16 kali	56,000,000	Waslalnak k 20 kali	65,000,000	Waslalnak k 24 kali	75,000,000	Waslalnak k 24 kali	85,000,000	Waslalnak k 24 kali	90,000,000		
						Distanak	1 kegiatan	50,000,000	1 kegiatan	60,000,000	1 kegiatan	70,000,000	1 kegiatan	80,000,000	1 kegiatan	90,000,000		



RP 7

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Kegiatan pokok	Skpd pengelola	PAGU INDIKATIF									
							2015		2016		2017		2018		2019	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Kegiatan Pekan Promosi / Pameran / Visualisasi Produk Peternakan Kegiatan Pembinaan Penataan dan Pengembangan Persebaran Ternak Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kegiatan Pengadaan Alat Penangkap Ikan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Kegiatan Pengembangan Perikanan dan Kelautan	Distanmak	4 kali	180,000,000	4 kali	60,000,000	4 kali	100,000,000	4 kali	100,000,000	4 kali	100,000,000
					Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Distanmak	-	0	60 ekor	1,051,000,000	80 ekor	1,103,000,000	100 ekor	1,158,000,000	120 ekor	1,215,000,000
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan dan Kelautan	70%	2,394,332,000	77%	626,596,660	85%	1,150,000,000	95%	950,000,000	120%	950,000,000
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan dan Kelautan		554,400,000	24,020 ton	919,920,000	24,981 ton	1,000,000,000	25,855 ton	1,000,000,000	26,760 ton	1,000,000,000
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan dan Kelautan		326,561,000	22,986 ton	396,940,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan dan Kelautan		809,484,000	2,609 ton	1,176,608,400	3,156 ton	1,600,000,000	3,475 ton	1,850,000,000	3,819 ton	2,250,000,000



RP 7

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Kegiatan pokok	Skpd pengelola	PAGU INDIKATIF											
							2015		2016		2017		2018		2019			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasaran Pengolahan Hasil	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Perikanan Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan	-	596,600,000	20 petani ikan	268,000,000	20 petani ikan	350,000,000	20 petani ikan	500,000,000	-	550,000,000		
				Program Pengembangan Perikanan	Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan luar daerah	Dinas Perikanan dan Kelautan	-	459,000,000	-	237,875,000	-	500,000,000	-	600,000,000	-	750,000,000		
				Program Pengembangan pariwisata	Pengembangan dan promosi pariwisata di dalam dan luar daerah	Disparekrafora	30 event	80,000,000	49 event	13,527,300	51 event	150,000,000	58 event	165,000,000		175,000,000		
				Program Pengembangan pariwisata	Pengembangan dan promosi pariwisata tingkat provinsi Kalimantan Barat	Disparekrafora		38,000,000		55,000,000		65,000,000		75,000,000		95,000,000		
				Program Pengembangan pariwisata	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Disparekrafora	11 kegiatan	40,000,000	14 kegiatan	60,000,000	17 kegiatan	65,000,000	20 kegiatan	70,000,000	23 kegiatan	75,000,000		
				Program pengembangan kemitraan pariwisata	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Disparekrafora	13 kegiatan	0	16 kegiatan	497,808,000	22 kegiatan	80,000,000	27 kegiatan	90,000,000	32 kegiatan	100,000,000		



RP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Kegiatan pokok	Skpd pengelola	PAGU INDIKATIF											
							2015		2016		2017		2018		2019			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah inudteri kecil dan menengah	Jumlah inudteri kecil dan menengah	Pembinaan terhadap usaha/ kegiatan di bidang pariwisata	Pembinaan terhadap usaha/ kegiatan di bidang pariwisata	Disparekrafpo ra	25,000,000	45,000,000	50,000,000	55,000,000	60,000,000	65,000,000						
		Jumlah inudteri kecil dan menengah	Jumlah inudteri kecil dan menengah	Program pengembangan sumber daya ekonomi kreatif	Pengembangan Industri Kreatif	Disparekrafpo ra	40,000,000	40,000,000	55,000,000	60,000,000								
		SDM Pelaku industri kreatif	Meningkatkan kemampuan teknologi industri kreatif	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pembinaan dan Pelatihan IKM	Disperindag	45 unit usaha	41,286,000	45 unit usaha	50,000,000	45 unit usaha	60,000,000	45 unit usaha	70,000,000				
				Program pengembangan sentra industri potensial	Fasilitasi Perizinan IKM	Disperindag	0	15,000,000	20,000,000	25,000,000								
				Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Kegiatan Pasar Murah	Disperindag	40,000,000	129,000,000	200,000,000	250,000,000	300,000,000							
					Pembinaan PKL	Disperindag	10%	30,000,000	40,000,000	50,000,000	50%							



7

8.3. Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.

Penanganan pengaduan masyarakat adalah suatu proses kegiatan untuk menampung, mencatat, menelaah, menyalurkan, mengkonfirmasi, mengklarifikasi memberikan solusi kepada pengadu, mendokumentasikan dan mensosialisasikan hasil pengelolaan pengaduan kepada masyarakat agar masalah yang dialami, dirasakan atau dihadapi masyarakat dapat segera dicarikan solusi terbaik bagi semua pihak. Mekanisme ini juga akan menjadi alat monitoring program secara eksternal.

Di Kabupaten Kubu Raya, mekanisme pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan seperti : Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya melalui mekanisme yang ditetapkan yaitu :

1. Masyarakat (individu/Kelompok Masyarakat), baik sebagai pemegang kartu KPS ataupun bukan pemegang kartu, bila menjumpai ada ketidaksesuaian pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di sekitarnya, dapat menyampaikan pengaduan kepada SKPD Pelaksana Program secara mandiri atau didampingi oleh Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di setiap Kecamatan dan tergabung dalam Kampung Media, atau langsung ke TNP2K Jakarta.
2. SKPD Pelaksana Program, menerima pengaduan dari masyarakat, selanjutnya melakukan analisis terhadap informasi dan mengupayakan solusinya, secara intern.
3. Apabila SKPD pelaksana program, belum dapat menyelesaikan kasus pengaduan masyarakat atas pelaksanaan program secara intern, selanjutnya materi pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada TKPK melalui POKJA PENGADUAN MASYARAKAT, selanjutnya Pokja Pengaduan Masyarakat akan menindaklanjuti dan melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada Ketua TKPK melalui sekretaris TKPK.
4. Secara rutin/berkala Ketua TKPK melaporkan hasil penanganan pengaduan individu/kelompok masyarakat kepada Bupati selaku Penanggungjawab TKPK



f
n

BAB IX

P E N U T U P

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu isu strategis yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu isu kemiskinan juga harus secara sistematis dan terencana masuk kedalam perencanaan strategis daerah sampai menjadi prioritas dalam rencana kerja daerah dan rencana kerja SKPD.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) adalah dokumen perencanaan 5 tahunan, yang berisikan strategi pemerintah daerah yang dituangkan dalam rencana aksi daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sangat diperlukan untuk menetapkan konsep, pemahaman dan ruang lingkup intervensi kebijakan menanggulangi kemiskinan, menjabarkan strategi dasar kedalam konteks lokal (Kabupaten Kubu Raya), serta untuk memastikan indikator tersebut menjadi prioritas dalam rencana intervensi.

Dokumen SPKD ini disusun pada saat proses penyusunan dokumen RPJMD dilaksanakan, dengan demikian keseluruhan Rencana Aksi Daerah diharapkan dapat terintegrasi pada dokumen RPJMD dan keseluruhan indikator rencana monitoring juga dapat dijadikan sebagai target indikator kinerja dalam RPJMD dan atau Renstra SKPD, sehingga keselarasan dan keterpaduan perencanaan pembangunan dapat terwujud.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang mempunyai tugas dan fungsi menyusun dokumen SPKD dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap indikator kinerja diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya dengan mempedomani dokumen SPKD ini dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019.

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 4 April 2016
PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TANGGAL 2016 NOMOR 10

BUPATI KUBU RAYA

RUSMAN ALI

